

LAPORAN CAPAIAN

PROGRAM DAN KEGIATAN

BPIP



—
TRIWULAN II
TAHUN 2026



www.bpip.go.id

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR ISTILAH	vii
KATA PENGANTAR	ix
RINGKASAN EKSEKUTIF	x
BAB I PEMETAAN SASARAN STRATEGIS	1
BAB II CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2026	5
A. Terwujudnya Penguatan Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi dan Pembudayaan Ideologi Pancasila yang Efektif	5
A.1. Persentase Rekomendasi Implementasi Peta Jalan PIP yang Ditindaklanjuti	6
A.2. Persentase Sosialisasi dan Komunikasi Nilai-Nilai Pancasila yang Efektif	10
A.3. Persentase Penguatan Jaringan dan Pembudayaan Pancasila yang Efektif	19
B. Terwujudnya Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyusunan dan Pengawasan Regulasi, serta Advokasi Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila yang Efektif	30
B.1. Persentase Rekomendasi Hasil Penyelarasan Rancangan Produk Hukum yang Ditindaklanjuti	31
B.2. Persentase Rekomendasi Hasil Advokasi Nilai-nilai Pancasila yang Dimanfaatkan	38
B.3. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Regulasi yang Ditindaklanjuti	45
C. Terwujudnya Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyusunan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Efektif	49
C.1. Persentase Rekomendasi Hasil Pengkajian Kebijakan yang Dimanfaatkan	50
C.2. Persentase Rekomendasi Hasil Pengkajian Materi yang Dimanfaatkan 64	64
C.3. Persentase Rekomendasi Kajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila yang Ditindaklanjuti	77
D. Terwujudnya pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila yang Komprehensif	83
D.1. Persentase Tenaga Pengajar Pancasila yang Tersertifikasi	84
D.2. Persentase Lembaga Penyelenggaraan Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila yang Terakreditasi	88
D.3. Persentase Peserta Diklat Berkepribadian Pancasila Dengan Tingkat Baik	92



E. Terwujudnya Pengukuran dan Evaluasi Pembinaan Ideologi Pancasila yang Efektif.....	101
E.1. Persentase Rekomendasi Hasil Pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila yang Dimanfaatkan.....	101
E.2. Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Pembinaan Ideologi Pancasila yang Dimanfaatkan.....	105
E.3. Persentase Rekomendasi Hasil Pengukuran Pelembagaan Pancasila yang Dimanfaatkan.....	110
E.4. Persentase Rekomendasi Hasil Pengukuran Aktualisasi Pancasila yang Ditindaklanjuti.....	117
F. Terwujudnya tata kelola pemerintahan BerAKHLAK dan Pelayanan Prima berbasis Elektronik.....	124
F.1. Terlaksananya Koordinasi Perencanaan, Penyusunan Anggaran, Pengelolaan Keuangan, Pemantauan, Evaluasi, dan Analisis, serta Pelaporan Akuntabilitas Kinerja	125
F.2. Terlaksananya Koordinasi Produk Hukum, Organisasi dan Tata Laksana, serta Reformasi Birokrasi	135
F.3. Pelaksanaan Layanan Kerumahtanggaan, Pengelolaan BMN, dan Manajemen SDM Kepada Unit Kerja	159
F.4. Pelaksanaan Dukungan Teknis dan Administrasi, Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan bagi Pimpinan	181
F.5. Pelaksanaan Pengawasan Internal di Lingkungan BPIP	197
F.6. Pelaksanaan Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).....	205
BAB III REALISASI ANGGARAN TRIWULAN II TAHUN 2026	216
BAB IV EVALUASI DAN UPAYA PERBAIKAN	219
BAB V PENUTUP	249



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Ukuran Keberhasilan Sasaran Strategis BPIP	3
Tabel 2. 1 Indikator Kinerja Program Terwujudnya Penguatan Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi dan Pembudayaan Ideologi Pancasila yang Efektif	5
Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya Hubungan Kerjasama dengan Lembaga Tinggi Negara, Kementerian/Lembaga, Pemerintahan Daerah, Organisasi Sosial Politik Serta Komponen Masyarakat Lainnya	7
Tabel 2. 3 Tahapan Penyusunan Rekomendasi Hubungan Kerjasama Pembinaan Ideologi Pancasila	7
Tabel 2. 4 Aktivitas Terlaksananya Hubungan Kerjasama dengan Lembaga Tinggi Negara, Kementerian/Lembaga, Pemerintahan Daerah, Organisasi Sosial Politik serta Komponen Masyarakat Lainnya	10
Tabel 2. 5 Indikator Kinerja Kegiatan Terselenggaranya Sosialisasi dan Komunikasi Pembinaan Ideologi Pancasila yang Efektif Hingga ke Daerah dan Desa	11
Tabel 2. 6 Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila	12
Tabel 2. 7 Komunikasi Pembinaan Ideologi Pancasila	14
Tabel 2. 8 Rekomendasi Hasil Sosialisasi dan Komunikasi Ideologi Pancasila yang Diselesaikan	15
Tabel 2. 9 Aktivitas Terselenggaranya Sosialisasi dan Komunikasi Pembinaan Ideologi Pancasila yang Efektif Hingga ke Daerah dan Desa	16
Tabel 2. 10 Indikator Kinerja Kegiatan Terselenggaranya Pembudayaan dan Penguatan Jaringan Relawan Kebajikan Pancasila	19
Tabel 2. 11 Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila	22
Tabel 2. 12 Relawan Pancasila yang Terfasilitasi dan Terbina	23
Tabel 2. 13 Aktivitas Penyelenggaraan Pembudayaan Ideologi Pancasila	26
Tabel 2. 14 Indikator Kinerja Program Terwujudnya Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyusunan dan Pengawasan Regulasi, serta Advokasi Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila yang Efektif	30
Tabel 2. 15 Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya Analisis dan Penyelarasan Rancangan Produk Hukum Nasional dengan Nilai-Nilai Pancasila	31
Tabel 2. 16 Rekomendasi Rancangan Produk Hukum yang Diselaraskan dengan Indikator Nilai Pancasila	32
Tabel 2. 17 Aktivitas Terlaksananya Analisis dan Penyelarasan Rancangan Produk Hukum Nasional dengan Nilai-Nilai Pancasila	35
Tabel 2. 18 Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya Layanan Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila	39
Tabel 2. 19 Aktivitas Terlaksananya Layanan Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila	43
Tabel 2. 20 Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya Pengawasan Kebijakan dan Regulasi yang Bertentangan dengan Nilai Pancasila	45
Tabel 2. 21 Aktivitas Terlaksananya Pengawasan Kebijakan dan Regulasi yang Bertentangan dengan Nilai Pancasila	47
Tabel 2. 22 Indikator Kinerja Program Terwujudnya Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyusunan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Efektif	50
Tabel 2. 23 Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila	51



Tabel 2. 24 Aktivitas Terlaksananya Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila	60
Tabel 2. 25 Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya Pengkajian Standardisasi Materi Pembinaan Ideologi Pancasila	64
Tabel 2. 26 Aktivitas Terlaksananya Pengkajian Standardisasi Materi Pembinaan Ideologi Pancasila	73
Tabel 2. 27 Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya pengkajian implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila	77
Tabel 2. 28 Aktivitas Terlaksananya Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila	80
Tabel 2. 29 Indikator Kinerja Program Terwujudnya pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila yang Komperhensif	84
Tabel 2. 30 Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya Sertifikasi Pengajar Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila	85
Tabel 2. 31 Aktivitas Terlaksananya Sertifikasi Pengajar Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila	87
Tabel 2. 32 Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Lembaga Penyelenggaraan Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila yang Terakreditasi	89
Tabel 2. 33 Aktivitas Persentase Lembaga Penyelenggaraan Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila yang Terakreditasi	91
Tabel 2. 34 Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya Pembinaan Purnapaskibraka Duta Pancasila	93
Tabel 2. 35 Aktivitas Kegiatan Terlaksananya Pembinaan Purnapaskibraka Duta Pancasila	95
Tabel 2. 36 Indikator Kinerja Kegiatan Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	99
Tabel 2. 37 Peserta Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	99
Tabel 2. 38 Aktivitas Kegiatan Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	100
Tabel 2. 39 Indikator Kinerja Program Terwujudnya Pengukuran dan Evaluasi Pembinaan Ideologi Pancasila yang Efektif	101
Tabel 2. 40 Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya Pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila	102
Tabel 2. 41 Aktivitas Kegiatan Terlaksananya Pengendalian PIP	105
Tabel 2. 42 Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya Evaluasi Pembinaan Ideologi Pancasila	106
Tabel 2. 43 Aktivitas Kegiatan Terlaksananya Evaluasi Pembinaan Ideologi Pancasila	108
Tabel 2. 44 Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya Evaluasi Pembinaan Ideologi Pancasila	111
Tabel 2. 45 Aktivitas Kegiatan Terlaksananya Pengukuran Pelembagaan Pancasila	114
Tabel 2. 46 Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya Evaluasi Pembinaan Ideologi Pancasila	118
Tabel 2. 47 Aktivitas Kegiatan Terlaksananya Pengukuran Aktualisasi Pancasila	121
Tabel 2. 48 Indikator Kinerja Program Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan BerAKHLAK dan Pelayanan Prima Berbasis Elektronik	124
Tabel 2. 49 Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya Koordinasi Perencanaan, Penyusunan Anggaran, Pengelolaan Keuangan, Pemantauan, Evaluasi, dan	



Analisis, serta Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pelaksanaan Manajemen Program, Keuangan dan Kinerja	126
Tabel 2. 50 Aktivitas Pelaksanaan Manajemen Program, Keuangan, dan Kinerja	131
Tabel 2. 51 Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya Koordinasi Produk Hukum, Organisasi dan Tata Laksana, serta Reformasi Birokrasi	135
Tabel 2. 52 Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya Koordinasi Produk Hukum, Organisasi dan Tata Laksana, serta Reformasi Birokrasi	140
Tabel 2. 53 Aktivitas Kegiatan Terlaksananya Koordinasi Produk Hukum, Organisasi dan Tata Laksana, serta Reformasi Birokrasi	154
Tabel 2. 54 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Layanan Kerumahtanggaan, Pengelolaan BMN, dan Manajemen SDM kepada Unit Kerja	159
Tabel 2. 55 Aktivitas Pelaksanaan Layanan Kerumahtanggaan, Pengelolaan BMN, dan Manajemen SDM Kepada Unit Kerja	173
Tabel 2. 56 Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Teknis dan Administrasi, Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan bagi Pimpinan	181
Tabel 2. 57 Pengawasan Kearsipan	189
Tabel 2. 58 Aktivitas Pelaksanaan Dukungan Teknis dan Administrasi, Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan bagi Pimpinan	192
Tabel 2. 59 Indikator Kinerja Kegiatan Pengawasan Internal di Lingkungan BPIP	197
Tabel 2. 60 Aktivitas Pelaksanaan Pengawasan Internal di Lingkungan BPIP	202
Tabel 2. 61 Indikator Keluaran Pelaksanaan Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	205
Tabel 2. 62 Aktivitas Pelaksanaan Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	214
Tabel 3. 1 Realisasi Anggaran berdasarkan Unit Kerja	217
Tabel 4. 1 Kendala dan Tindak Lanjut Terwujudnya Hubungan Antar Lembaga, Kerja Sama, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan, serta Pembudayaan PIP	219
Tabel 4. 2 Kendala dan Tindak Lanjut Terwujudnya Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyusunan dan Pengawasan Regulasi, serta Advokasi Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila	224
Tabel 4. 3 Kendala dan Tindak Lanjut Terwujudnya Perumusan Arah Kebijakan, Pengkajian, dan Standardisasi Materi PIP	227
Tabel 4. 4 Kendala dan Tindak Lanjut Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	230
Tabel 4. 5 Kendala dan Tindak Lanjut Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi PIP	236
Tabel 4. 6 Kendala dan Tindak Lanjut terlaksananya Dukungan Manajemen	242



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Strategis BPIP	2
Gambar 3.1 Realisasi Anggaran Total	216
Gambar 3.2 Realisasi Anggaran per Program	217

DAFTAR ISTILAH

ADKASI	: Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia
AHP	: <i>Analytical Hierarchy Process</i>
APIP	: Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah
ARJUNA	: Akreditasi Jurnal Nasional
ASN	: Aparatur Sipil Negara
Bakesbangpol	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Bappenas	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BerAKHLAK	: Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif
BIMTEK	: Bimbingan Teknis
BIN	: Badan Intelijen Negara
BNN	: Badan Narkotika Nasional
BNPT	: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
BPIP	: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPKP	: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BPSPDM	: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
BTU	: Buku Teks Utama
CPMK	: Capaian Pembelajaran Mata Kuliah
Diklat	: Pendidikan dan Pelatihan
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
DKT	: Diskusi Kelompok Terpumpun
DPPI	: Duta Pancasila Paskibraka Indonesia
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
GBHIP	: Garis Besar Haluan Ideologi Pancasila
GMKI	: Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia
GNSTA	: Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip
IAP	: Indeks Aktualisasi Pancasila
IKU	: Indikator Kinerja Utama
INP	: Indikator Nilai Pancasila
K/L	: Kementerian/Lembaga
Kemendagri	: Kementerian Dalam Negeri
Kemendikbud	: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
KemenPANRB	: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Kemenpora	: Kementerian Pemuda dan Olahraga
Kesbangpol	: Kesatuan Bangsa dan Politik
Lemhanas	: Lembaga Ketahanan Nasional
LPSE	: Layanan Pengadaan Secara Elektronik
MKWK	: Mata Kuliah Wajib Kurikulum
MI	: Madrasah Ibtidaiyah
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
NSPK	: Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria
Ormas	: Organisasi Masyarakat
Orsospol	: Organisasi Sosial dan Politik
Paskbiraka	: Pasukan Pengibar Bendera Pusaka
PDN	: Pusat Data Nasional



LAPORAN CAPAIAN
PROGRAM DAN KEGIATAN
TRIWULAN II TAHUN 2026



PDP	: Purnapaskibraka Duta Pancasila
PEMDA	: Pemerintah Daerah
Perpres	: Peraturan Presiden
PIP	: Pembinaan Ideologi Pancasila
PJK	: Pancasila Jurnal Keindonesiaan
PKS	: Perjanjian Kerja Sama
PMK	: Peraturan Menteri Keuangan
PMPRB	: Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
PN	: Prioritas Nasional
POLRI	: Kepolisian Republik Indonesia
PSP	: Pusat Studi Pancasila
PPKn	: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
RAPERDA	: Rancangan Peraturan Daerah
Renstra	: Rencana Strategis
RO	: Rincian <i>Output</i>
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJPN	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
RUU	: Rancangan Undang-Undang
SAKIP	: Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
SDM	: Sumber Daya Manusia
SIKN	: Sistem Informasi Kearsipan Nasional
SINTA	: <i>Science and Technology Index</i>
SMA	: Sekolah Menengah Atas
SMK	: Sekolah Menengah Kejuruan
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SOP	: Standar Operasional Prosedur
SPBE	: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
SPIP	: Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
TA	: Tahun Anggaran
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
ToT	: <i>Training of Trainer</i>
TP3DN	: Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
TTIS/CSIRT	: Tim Tanggap Insiden Siber/ <i>Computer Security Incident Response Team</i>
TVRI	: Televisi Republik Indonesia
UGM	: Universitas Gadjah Mada
UI	: Universitas Indonesia
UNY	: Universitas Negeri Yogyakarta
UIN	: Universitas Islam Negeri
UKM	: Usaha Kecil Menengah
UKPBJ	: Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa
UMKM	: Usaha Mikro Kecil dan Menengah
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
WTP	: Wajar Tanpa Pengecualian

KATA PENGANTAR

Laporan Capaian Program & Kegiatan merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Berdasarkan Pasal 56 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bahwa Kepala dan Wakil Kepala melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden melalui Ketua Dewan Pengarah Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Laporan Capaian Program & Kegiatan Pada Triwulan II Tahun 2026 bertujuan untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas kinerja hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) terhadap penggunaan anggaran BPIP periode Januari s.d. Juni 2026. Segala hal yang termuat dalam laporan ini kiranya dapat memberi manfaat dalam Pembinaan Ideologi Pancasila, mewujudkan Pancasila sebagai *leitstar* atau bintang penuntun menuju cita-cita kemerdekaan Indonesia, juga sebagai pandangan hidup (*weltanschauung*) sehingga nilai-nilai Pancasila teraktualisasi dalam laku hidup rakyat Indonesia.

Jakarta, 17 Juli 2026

KEPALA,

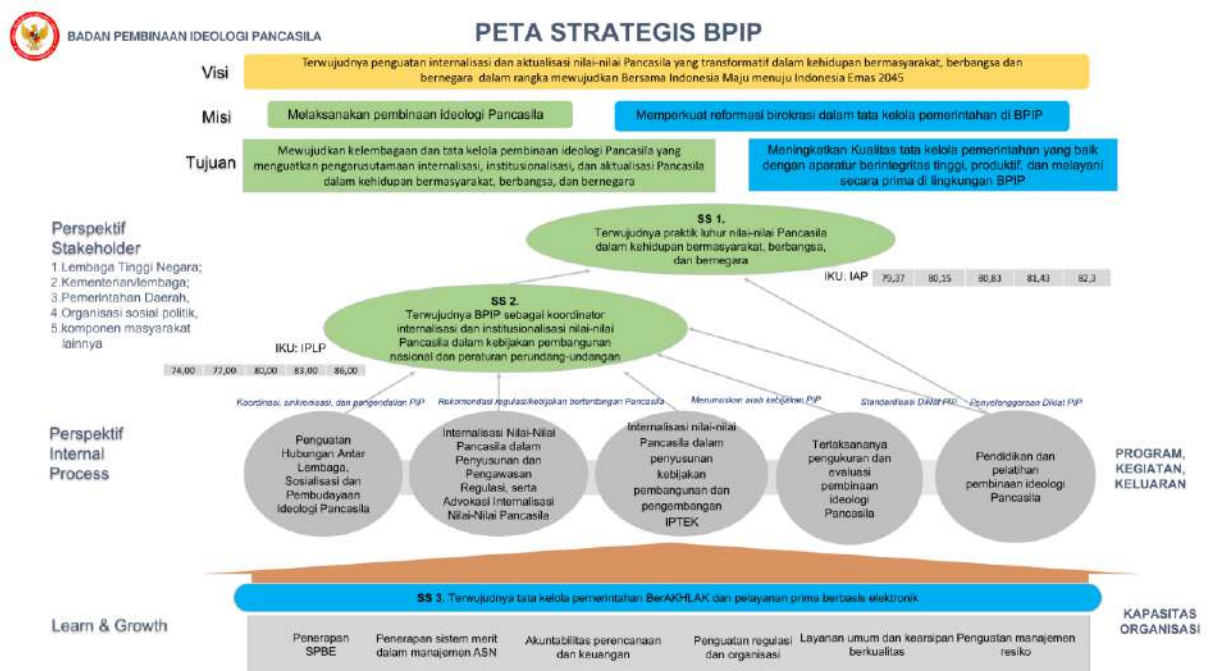
YUDIAN WAHYUDI

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sasaran strategis BPIP sebagaimana telah dimandatkan dalam Rencana Strategis BPIP 2026-2029 adalah:

1. Terwujudnya praktik luhur nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
2. Terwujudnya BPIP sebagai koordinator internalisasi dan institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan pembangunan nasional dan peraturan perundang-undangan; dan
3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif (BerAKHLAK) dan pelayanan prima berbasis elektronik.

Ketiga sasaran strategis tersebut dapat terwujud dengan dukungan Sasaran Program Kedeputan dan Sekretariat Utama. Sasaran Program dicapai dengan berbagai kegiatan teknis. Hubungan sasaran strategis dan Sasaran Program PIP dipetakan berikut ini:



PETA STRATEGIS BPIP

Capaian kinerja sasaran program merupakan kinerja pelaksanaan kegiatan yang melekat pada masing-masing sasaran. Pelaksanaan kegiatan periode Triwulan II Tahun 2026 adalah:

1. Terwujudnya Penguatan Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi dan Pembudayaan Ideologi Pancasila;
 - a. Persentase Rekomendasi Implementasi Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti 40%;
 - b. Persentase Sosialisasi dan Komunikasi nilai-nilai Pancasila yang Efektif dengan capaian 80,56%;
 - c. Persentase Penguatan Jaringan dan Pembudayaan Pancasila yang Efektif dengan capaian 42,06%.
2. Terwujudnya Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyusunan dan Pengawasan Regulasi, serta Advokasi Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila;
 - a. Persentase Rekomendasi Hasil Penyelarasan Rancangan Produk Hukum yang ditindaklanjuti dengan capaian 44%;
 - b. Persentase Rekomendasi Hasil Advokasi Nilai-Nilai Pancasila dimanfaatkan dengan capaian 50%;
 - c. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Regulasi yang ditindaklanjuti dengan capaian 40%.
3. Terwujudnya internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam penyusunan kebijakan pembangunan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - a. Persentase rekomendasi hasil pengkajian kebijakan yang dimanfaatkan dengan capaian 45%;
 - b. Persentase rekomendasi hasil pengkajian materi yang dimanfaatkan dengan capaian 50%;
 - c. Persentase rekomendasi hasil pengkajian implementasi yang dimanfaatkan dengan capaian 47,61%.
4. Terwujudnya pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila;
 - a. Persentase tenaga pengajar Pancasila yang tersertifikasi dengan capaian 50% ;
 - b. Persentase lembaga penyelenggara diklat Pembinaan ideologi Pancasila yang terakreditasi dengan capaian 52,5%;

- c. Persentase peserta Diklat berkepribadian Pancasila dengan tingkat baik 52,01%;
5. Terwujudnya pengukuran dan evaluasi Pembinaan ideologi Pancasila;
 - a. Persentase rekomendasi hasil pengendalian pembinaan ideologi Pancasila yang dimanfaatkan dengan capaian 57,3%;
 - b. Persentase rekomendasi hasil evaluasi pembinaan ideologi Pancasila yang dimanfaatkan dengan capaian 45,83%;
 - c. Persentase rekomendasi hasil pengukuran Pelembagaan Pancasila yang dimanfaatkan dengan capaian 50%.
 - d. Persentase rekomendasi hasil pengukuran aktualisasi Pancasila sila 1 s.d. 5 yang ditindaklanjuti dengan capaian 83%
6. Terwujudnya tata kelola pemerintahan BerAKHLAK dan pelayanan prima berbasis elektronik.
 - a. Layanan koordinasi perencanaan, penyusunan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dan analisis, serta pelaporan akuntabilitas kinerja dengan capaian 50%;
 - b. Layanan pengawasan intern di lingkungan BPIP dengan capaian 50%;
 - c. layanan kerumahtanggaan, pengelolaan BMN, dan manajemen SDM kepada unit kerja dengan capaian 50%;
 - d. Layanan dukungan teknis dan administrasi, hubungan masyarakat dan keprotokolan bagi Pimpinan dengan capaian 50%;
 - e. Layanan koordinasi produk hukum, organisasi dan tata laksana, serta reformasi birokrasi dengan capaian 50%;
 - f. Layanan pengelolaan data dan teknologi informasi mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 50 %.

Pada Triwulan II Tahun 2026, berdasarkan aplikasi SAKTI per tanggal 30 Juni 2026 realisasi anggaran BPIP adalah 50,80% atau sebesar 146.000.065.853,00 dari alokasi pagu DIPA TA 2026 sebesar 287.412.742.000,00 Berikut adalah data realisasi anggaran BPIP periode Triwulan II Tahun 2026:



Realisasi Anggaran BPIP

Beberapa rekomendasi atas hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan selama Pada Triwulan II Tahun 2026, antara lain adalah (i) Perlu adanya penyempurnaan tata laksana guna mendukung pelaksanaan tugas; (ii) mengoptimalkan sumberdaya dan potensi yang ada untuk dapat meningkatkan kinerja pada tahun selanjutnya; (iii) Menyusun Perpres tentang Arah Kebijakan dan Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila; (iv)



Pembangunan sistem manajemen terintegrasi diklat PIP berbasis teknologi informasi dan komunikasi; (v) Mendorong Rancangan Undang-Undang BPIP.

Pada Triwulan II Tahun 2026 optimalisasi pelaksanaan kegiatan diupayakan sesuai dengan *timeline* kegiatan, bila terdapat kendala teknis dan non teknis yang ada pada pelaksanaan kegiatan, akan dilakukan perbaikan sesuai rencana aksi agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai guna terus membangun penguatan akuntabilitas kinerja, BPIP akan terus mengoptimalkan potensi yang ada untuk disinergikan dengan lembaga tinggi negara, kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya, sehingga tercipta aturan, arahan dan praktek yang tepat dalam revitalisasi dan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila.

BAB I

PEMETAAN SASARAN STRATEGIS

Pancasila telah menjadi konsensus para pendiri bangsa sebagai dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup yang menaungi tata peraturan perundang-undangan, kebijakan pembangunan negara dengan kedudukannya sebagai sumber dari segala sumber hukum, dan terkonstruksi secara menyebar ke dalam berbagai sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pancasila menjadi jiwa dalam tujuan Negara Republik Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pancasila selalu menjadi dasar dalam setiap proses pembangunan semenjak Indonesia berdiri. Saat ini sesuai Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, dalam melaksanakan misi pembangunan Indonesia Emas Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial, dimana kebijakan terkait ideologi Pancasila diarahkan pada:

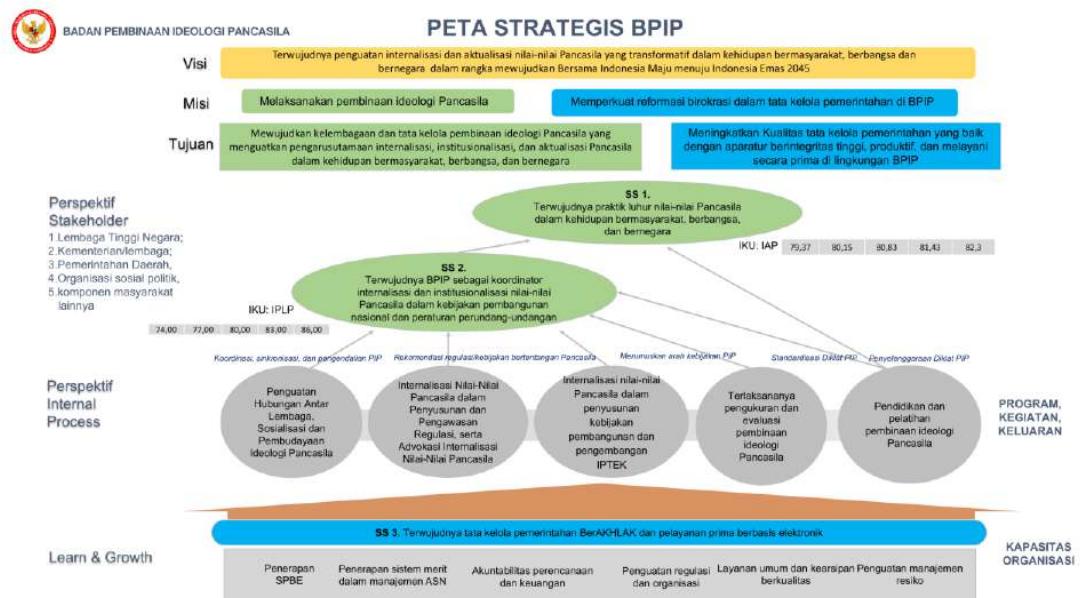
1. Pengarusutamaan internalisasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan Bernegara;
2. Pembinaan ideologi Pancasila untuk mewujudkan kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, kepribadian dalam kebudayaan, serta penguatan karakter dan identitas bangsa.

Rencana strategis pelaksanaan Program PIP diarahkan mewujudkan 3 sasaran strategis BPIP, yaitu:

1. Terwujudnya praktik luhur nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

2. Terwujudnya BPIP sebagai koordinator internalisasi dan institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan pembangunan nasional dan peraturan perundang-undangan; dan
3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan BerAKHLAK dan pelayanan prima berbasis elektronik.

Ketiga sasaran strategis tersebut diwujudkan melalui dukungan Sasaran Program Kedeputan teknis dan Sekretariat Utama dukungan kapasitas organisasi. Sasaran program dicapai dengan berbagai kegiatan. Peta strategis keterkaitan sasaran-sasaran melalui pendekatan perspektif *stakeholder*, pelaksanaan program dan kegiatan, serta dukungan kapasitas organisasi tampak pada Peta Strategis BPIP berikut ini:



Gambar 1.1 Peta Strategis BPIP

Tujuan sasaran-sasaran strategis BPIP sebagaimana telah dipetakan di atas, yaitu:

1. Terciptanya kelembagaan dan tata kelola pembinaan ideologi Pancasila yang menguatkan pengarusutamaan internalisasi, institusionalisasi, dan aktualisasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan

2. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dilingkungan BPIP;

Ukuran keberhasilan sasaran strategis BPIP adalah, sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Ukuran Keberhasilan Sasaran Strategis BPIP

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2026
Kelembagaan dan tata kelola pembinaan ideologi Pancasila yang menguatkan pengarusutamaan internalisasi, institusionalisasi, dan aktualisasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara	Terwujudnya praktik luhur nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	Nilai Indeks Aktualisasi Pancasila	80,15
	Terwujudnya BPIP sebagai koordinator internalisasi dan institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan pembangunan nasional dan peraturan perundang-undangan	Indeks Pelembagaan Pancasila	77
Kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dilingkungan BPIP	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BerAKHLAK dan pelayanan prima berbasis elektronik BPIP	Nilai Reformasi Birokrasi	79
		Kategori SAKIP	B
		Nilai Sistem Merit	335
		Opini Laporan Keuangan BPK	WTP
		Indeks SPBE	4
		Indeks Kepuasan Masyarakat	88

Kinerja tersebut didukung dengan pelaksanaan kegiatan yang tercakup dalam Program PIP dan Program Dukungan Manajemen dengan Sasaran Program, yaitu:

1. Terwujudnya Penguatan Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi dan Pembudayaan Ideologi Pancasila yang Efektif;
2. Terwujudnya Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyusunan dan Pengawasan Regulasi, serta Advokasi Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila yang Efektif;
3. Terwujudnya internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam penyusunan kebijakan pembangunan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang efektif;
4. Terwujudnya pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila yang komperhensif;
5. Terwujudnya pengukuran dan evaluasi Pembinaan ideologi Pancasila yang efektif;
6. Terwujudnya tata kelola pemerintahan BerAKHLAK dan pelayanan prima berbasis elektronik.

BAB II

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2026

A. Terwujudnya Penguatan Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi dan Pembudayaan Ideologi Pancasila yang Efektif

Sebagai Lembaga yang diberi mandat dalam PIP maka fungsi koordinasi dan sinkronisasi melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Ukuran keberhasilan Sasaran Program Terwujudnya Penguatan Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi dan Pembudayaan Ideologi Pancasila:

Tabel 2. 1 Indikator Kinerja Program Terwujudnya Penguatan Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi dan Pembudayaan Ideologi Pancasila yang Efektif

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2026	REALISASI 2026	KET
Persentase Rekomendasi Implementasi Peta Jalan PIP yang ditindaklanjuti	100%	40%	 40%
Persentase Sosialisasi dan Komunikasi nilai-nilai Pancasila yang Efektif	100%	80,56%	 80,56%
Persentase Penguatan Jaringan dan Pembudayaan Pancasila yang Efektif	100%	42,06%	 42,06%

Realisasi capaian kinerja program tersebut diperoleh dan dicapai sebagai berikut:

A.1. Persentase Rekomendasi Implementasi Peta Jalan PIP yang Ditindaklanjuti

Indikator Keberhasilan Program:

Target Persentase Rekomendasi Implementasi Peta Jalan PIP yang ditindaklanjuti pada Tahun 2026 adalah 100%.

Jika dilihat perkembangannya selama Triwulan II Tahun 2026 Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan mendukung dan menjadi salah satu Koordinator dalam memfasilitasi dan menghubungkan kegiatan-kegiatan yang berdampak dalam rangka implementasi Peta Jalan pembinaan ideologi Pancasila.

Peta Jalan PIP merupakan pedoman yang disusun BPIP sebagai pembantu Presiden untuk melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian (Korsindal) atas program, kegiatan, serta subkegiatan PIP lembaga negara, K/L, dan pemerintah daerah (PEMDA) dalam rangka mengaktualisasikan Arah Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila (AK PIP) secara bertahap hingga 2045.

Pada Triwulan II Tahun 2026 ini Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan telah melakukan tahap perencanaan dan identifikasi masalah. Tahap awal ini bertujuan untuk mengenali isu, permasalahan, atau kebutuhan kebijakan yang mendesak atau strategis dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila. Identifikasi dilakukan berdasarkan data, laporan, pengamatan, atau masukan dari mitra-mitra BPIP yang telah menandatangani Kerjasama.

Pada Triwulan II Tahun 2026 capaian target tersebut adalah sebesar 40% (Tahapan penyusunan rekomendasi):

$$\frac{\text{tahap} \text{ hingga TW II}}{(5 \text{ tahap} \text{ penyusunan})} \times 100\% = \frac{2}{5 \text{ tahap} \text{ penyusunan}} \times 100\% = 40\%$$

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan hingga Pada Triwulan II Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya Hubungan Kerjasama dengan Lembaga Tinggi Negara, Kementerian/Lembaga, Pemerintahan Daerah, Organisasi Sosial Politik Serta Komponen Masyarakat Lainnya

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Persentase Implementasi Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila	Rekomendasi Hubungan Kerjasama Pembinaan Ideologi Pancasila	3	40%	40%

Dari tabel di atas dapat disimpulkan capaian yang telah diperoleh pada Triwulan II Tahun 2026 yaitu:

Penyusunan dokumen Rekomendasi Hubungan Kerjasama Pembinaan Ideologi Pancasila dalam lima tahap yaitu:

Tabel 2. 3 Tahapan Penyusunan Rekomendasi Hubungan Kerjasama Pembinaan Ideologi Pancasila

No.	Kementerian/Lembaga/Pemda
1.	Tahap Perencanaan dan Identifikasi Masalah, Tahap awal ini bertujuan untuk mengenali isu, permasalahan, atau kebutuhan kebijakan yang mendesak atau strategis dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila. Identifikasi dilakukan berdasarkan data, laporan, pengamatan, atau masukan dari mitra-mitra BPIP yang telah menandatangani Kerjasama.
2.	Pengumpulan Data dan Informasi, Setelah masalah diidentifikasi, dilakukan pengumpulan data yang relevan dan akurat, baik berupa data primer (hasil riset, survei, wawancara) maupun data sekunder (laporan, dokumen resmi, kajian akademis) kepada mitra-mitra BPIP yang telah bekerjasama.
3.	Analisis Masalah dan Perumusan Alternatif Solusi, Data yang sudah dikumpulkan dianalisis untuk memahami akar penyebab, dampak, tren, dan potensi risiko. Analisis ini bisa bersifat kualitatif, kuantitatif, atau gabungan keduanya, tergantung pada sifat masalahnya. Berdasarkan hasil analisis, disusun beberapa opsi atau alternatif solusi yang mungkin dilakukan. Setiap alternatif perlu disertai dengan

No.	Kementerian/Lembaga/Pemda
	kelebihan, kekurangan, risiko, dan dampaknya.
4.	Penyusunan Naskah Rekomendasi, Merupakan proses penyusunan naskah formal yang akan diajukan kepada Kepala BPIP. Naskah disusun dengan gaya bahasa resmi, struktur yang baku, dan mencakup ringkasan eksekutif, rekomendasi utama, dan lampiran data pendukung.
5.	Penyampaian Rekomendasi kepada Kepala, Tahap akhir adalah pengajuan rekomendasi secara resmi kepada Kepala BPIP melalui Deputi Bidang Hubungan antar lembaga, sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan. Penyampaian dilakukan melalui Nota Dinas yang disampaikan kepada Kepala BPIP dengan dilampirkan naskah rekomendasi.

Berdasarkan tahapan penyusunan rekomendasi kerjasama Pembinaan Ideologi Pancasila tahapan yang telah dicapai oleh Direktorat Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama dalam menyusun rekomendasi Kerjasama Pembinaan Ideologi Pancasila yang efektif, efisien serta berkelanjutan sehingga implementasi nilai-nilai Pancasila dilaksanakan secara menyeluruh kepada elemen Masyarakat pada Triwulan II tahun 2026 adalah Tahap Pengumpulan data dan Informasi. Berikut upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama BPIP sampai dengan Tahap Pengumpulan data dan informasi:

1. Rapat internal Direktorat Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama dalam penyusunan isu-isu dan kebutuhan kebijakan dan strategis bagi BPIP dalam percepatan pembedaan nilai-nilai Pancasila
2. Rapat dengan melibatkan unit kerja di BPIP dan juga mitra-mitra BPIP yang telah bekerjasama dalam mengidentifikasi permasalahan tindak lanjut kerjasama pembinaan ideologi Pancasila telah dilakukan selama ini.
3. Rapat dengan mitra dilakukan baik melalui *zoom meeting* atau mengundang mitra BPIP yang telah bekerjasama ke kantor BPIP

4. Berkoordinasi dengan mitra kerja sama BPIP untuk mendapat gambaran atas kerjasama melalui kegiatan Forum Ekspose Capaian kegiatan peta jalan Pembinaan Ideologi Pancasila Kementerian/Lembaga Tahun 2026.
5. Rapat Pembahasan Persiapan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peta Jalan PIP Triwulan 1 Tahun 2026 dalam rangka pengumpulan data dan informasi.
6. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Implementasi Peta Jalan PIP Periode Triwulan I Tahun 2026 Kementerian/Lembaga untuk mendapatkan data dan informasi terhadap K/L yang menindaklanjuti Peta Jalan PIP.

Melalui kegiatan-kegiatan tersebut telah menghasilkan rumusan masalah dan masukan-masukan dari mitra untuk menjadi data awal dalam penyusunan rekomendasi serta identifikasi awal oleh Direktorat Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama dalam penyusunan Rekomendasi Hubungan Kerjasama Dengan Lembaga tinggi negara, K/L, Pemda dan Orsospol, serta komponen masyarakat lainnya yang ditindaklanjuti. Dengan demikian berdasarkan data diatas bahwa persentase rekomendasi hubungan kerjasama dengan lembaga tinggi negara, K/L, Pemda dan Orsospol, serta komponen masyarakat lainnya yang ditindaklanjuti pada Triwulan II Tahun 2026 telah mencapai 40%.

Sehinga dapat disimpulkan capaian pada Rekomendasi Hubungan Kerjasama Pembinaan Ideologi Pancasila dengan metode perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{tahap an hingga TW II}}{(5 \text{ tahap an penyusunan})} \times 100\% = \frac{2}{5 \text{ tahap an penyusunan}} \times 100\% = 40\%$$

Aktivitas dan kilas peristiwa selama dalam rangka capaian kinerja Terlaksananya Hubungan Kerjasama dengan Lembaga Tinggi Negara, Kementerian/Lembaga, Pemerintahan Daerah, Organisasi Sosial Politik Serta Komponen Masyarakat Lainnya pada Triwulan II Tahun 2026 yaitu:

Tabel 2. 4 Aktivitas Terlaksananya Hubungan Kerjasama dengan Lembaga Tinggi Negara, Kementerian/Lembaga, Pemerintahan Daerah, Organisasi Sosial Politik serta Komponen Masyarakat Lainnya

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Persiapan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peta Jalan PIP Tahun 2026 (Jakarta, tanggal 21 April 2026)	
2.	Koordinasi dan Sinkronisasi Implementasi Peta Jalan PIP Periode Triwulan I Tahun 2026 Kementerian/Lembaga (Bekasi, tanggal 12 Mei 2026)	

A.2. Persentase Sosialisasi dan Komunikasi Nilai-Nilai Pancasila yang Efektif

Indikator Keberhasilan Program

Target Persentase Sosialisasi dan Komunikasi nilai-nilai Pancasila yang Efektif pada Tahun 2026 adalah 100%.

Pada Triwulan II Tahun 2026 capaian target tersebut adalah sebesar 80,56% (rata-rata capaian hasil Persentase Konten Sosialisasi dan Komunikasi Pembinaan Ideologi Pancasila yang Efektif dan Persentase Rekomendasi Hasil Sosialisasi dan Komunikasi yang Ditindaklanjuti):

$$\frac{\text{Capaian 2026}}{3} \times 100\% = \frac{70,58\% + 131,10\% + 40\%}{3} \times 100\% = 80,56\%$$

Capaian IKU sasaran program tersebut didukung oleh sasaran kegiatan: Terselenggaranya Sosialisasi dan Komunikasi Pembinaan Ideologi Pancasila yang Efektif Hingga ke Daerah dan Desa.

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan hingga Pada Triwulan II Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 5 Indikator Kinerja Kegiatan Terselenggaranya Sosialisasi dan Komunikasi Pembinaan Ideologi Pancasila yang Efektif Hingga ke Daerah dan Desa

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Persentase Konten Sosialisasi dan Komunikasi	Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila	20.000	14.117	70,58% (14.117 orang)
Pembinaan Ideologi Pancasila yang Efektif.	Komunikasi Pembinaan Ideologi Pancasila	1.000.000 Orang	1.311.062 Orang	131,10% (1.311.062 orang)
Persentase Rekomendasi Hasil Sosialisasi dan Komunikasi yang Ditindaklanjuti	Jumlah Rekomendasi Hasil Sosialisasi dan Komunikasi Ideologi Pancasila yang Diselesaikan	1	40%	40% (Rekomendasi Kebijakan)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan capaian yang telah diperoleh pada Triwulan II Tahun 2026 yaitu:

a. Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila

Target tahun 2026 Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila adalah 20.000 Orang Pada Triwulan II tahun 2026 telah dilakukan sosialisasi PIP terhadap 14.117 orang, dengan begitu maka presentase perhitungan adalah sebesar 70,58% dengan rincian sosialisasi yaitu:

$$\frac{\text{Capaian TW II 2026}}{20.000 \text{ orang}} \times 100\% = \frac{14.117 \text{ orang}}{20.000 \text{ orang}} \times 100\% = 70,58\%$$

Tabel 2. 6 Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila

No	Kegiatan	Tempat dan tanggal Pelaksanaan	Keterangan
1.	Pembinaan Ideologi Pancasila dengan tema “Moderasi Beragama dalam Kerangka Pancasila”	Makassar, 31 Januari 2026	293 Orang (Tokoh Agama, Dai dan Daiyah)
2.	Pembinaan Ideologi Pancasila dengan tema “Penguatan Ideologi Pancasila dalam Bingkai Kearifan Lokal ditengah Tantangan Arus Digital”	Batam, 19 Februari 2026	509 Orang (Organisasi Masyarakat, Mahasiswa dan Paskibraka)
3.	Pembinaan Ideologi Pancasila dengan tema “Memahami Pancasila Berbasis Keislaman”	Lombok, 22 Februari 2026	400 Orang (Tokoh Agama dan Santri)
4.	Kegiatan Ngabuburit Kebangsaan “Penguatan Nilai-Nilai Ideologi Pancasila dalam rangka Memperkuat Ukhuwah Islamiyah” di Universitas Nahdlatul Ulama	Jakarta, 24 Februari 2026	118 Orang (Akademisi, Guru dan Mahasiswa)
5.	Pembinaan Ideologi Pancasila dengan tema “Penguatan Nilai-Nilai Pancasila ditengah Masyarakat dalam rangka Mewujudkan Indonesia Raya”	Pekanbaru, 28 Februari 2026	408 Orang (Organisasi Masyarakat)
6.	Pembinaan Ideologi Pancasila dengan tema “Peran Mahasiswa Mewujudkan Nilai-Nilai Pancasila dalam rangka Membangun Peradaban Bangsa Menuju Indonesia Raya”	Purwokerto, 12 Maret 2026	474 Orang (Akademisi dan Mahasiswa)
7.	Pembinaan Ideologi Pancasila Goes to Campus dengan tema “Penanaman Nilai-Nilai Ideologi Pancasila bagi Mahasiswa dalam Mewujudkan Mahasiswa yang Berkarakter Pancasila di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	Yogyakarta, 13 Maret 2026	466 Orang (Akademisi dan Mahasiswa)
8.	Pembinaan Ideologi Pancasila dengan tema “Penanaman Nilai-Nilai Pancasila Kepada Generasi	Yogyakarta, 6 s.d. 9 Mei 2026	500 Orang (Akademisi dan Mahasiswa)

No	Kegiatan	Tempat dan tanggal Pelaksanaan	Keterangan
	Muda dalam Mewujudkan Generasi Muda yang Berkarakter Pancasila"		
9.	Koordinasi Uji Kelayakan Aplikasi Pancasila Virtual Expo dalam Rangka Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026	Jakarta, 30 Mei s.d. 1 Juni 2026	1000 Orang (Masyarakat Umum)
10.	Pancasila Virtual Expo Tahun 2026	Jakarta, 30 Mei s.d. 18 Agustus 2026	5.599 Orang (Masyarakat Umum)
11.	Sosialisasi dan Komunikasi Pembinaan Ideologi Pancasila Bagi Guru dan Generasi Muda	Bali, 3 s.d. 6 Juni 2026	1.000 Orang (Guru Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi serta Pelajar dan Organisasi Kepemudaan)
12.	Pembinaan Ideologi Pancasila Melalui Festival Anak Pancasila "Lima Rasa Selaras Dalam Satu Jiwa"	Tangerang Selatan, 20 Juni 2026	350 Orang (masyarakat umum, pelajar, dan organisasi kepemudaan)
13.	Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Guru dan Generasi Muda	Maluku Utara, 23 s.d. 26 Juni 2026	1.000 Orang (Guru Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi serta Pelajar dan Organisasi Kepemudaan)
14.	Pembinaan Ideologi Pancasila dengan tema "Menggaungkan Gelora Spirit Pancasila dari Magelang untuk Indonesia yang lebih Bermartabat"	Magelang, 27 Juni s.d. 1 Juli 2026	2.000 Orang (Pelajar, organisasi kepemudaan dan masyarakat umum)

b. Komunikasi Pembinaan Ideologi Pancasila

Target tahun 2026 Komunikasi Pembinaan Ideologi Pancasila adalah 1.000.000 Orang Pada Triwulan II tahun 2026 sudah dilakukan dilakukan kegiatan Komunikasi Pembinaan Ideologi Pancasila, yaitu:

Tabel 2. 7 Komunikasi Pembinaan Ideologi Pancasila

No	Kegiatan	Tempat dan tanggal Pelaksanaan	Keterangan
1.	Penguatan Komunikasi Publik pada Program Pembinaan Ideologi Pancasila	13 Februari s.d. 24 April 2026	Program memperoleh <i>Gross Rating Point (GRP)</i> sebesar 1,10% dengan estimasi akumulasi rata-rata pemirsa (<i>Audience</i>) mencapai 1.311.062 individu pada periode Februari s.d. April 2026 berdasarkan pengukuran Nielsen
2.	Penyiaran Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026	26 Mei s.d. 2 Juni 2026	Perfoma Tayangan Upacara Hari Lahir Pancasila 2026, sebanyak 389.959 <i>viewers</i>
3.	Produksi Video Dialog Tematik Nilai-Nilai Pancasila dalam Rangka Strategi Penguatan Narasi Publik dan Komunikasi Pancasila	2 April s.d. 9 Juni 2026	Hasil video berjumlah 15 episode dimana setiap episode berdurasi ±20–30 menit
4.	Produksi Video Animasi Materi Komunikasi Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2026	2 April s.d. 9 Juni 2026	Hasil video animasi berjumlah 5 video mengenai Sejarah Hari Lahir Pancasila

dengan begitu maka presentase perhitungan adalah sebesar 131,10% dengan rincian sosialisasi yaitu:

$$\frac{\text{Capaian TW II 2026}}{1.000.000 \text{ orang}} \times 100\% = \frac{1.311.062 \text{ orang}}{1.000.000 \text{ orang}} \times 100\% = 131,10\%$$

c. Rekomendasi Hasil Sosialisasi dan Komunikasi Ideologi Pancasila yang Diselesaikan

Untuk mencapai 1 dokumen rekomendasi kebijakan hasil Sosialisasi dan Komunikasi Ideologi Pancasila dibutuhkan 5 tahapan. Pada Triwulan II Tahun 2026 telah tercapai 2 tahapan yaitu Identifikasi Masalah dan Kebutuhan Sosialisasi dan Komunikasi PIP maka presentase perhitungan saat ini sekitar 40 % dengan alur proses sebagai berikut:

$$\frac{\text{Capaian 2026}}{5 \text{ Tahapan}} \times 100\% = \frac{2 \text{ Tahapan tercapai}}{5} \times 100\% = 40\%$$

Tabel 2. 8 Rekomendasi Hasil Sosialisasi dan Komunikasi Ideologi Pancasila yang Diselesaikan

No	Tahapan	Uraian	Keterangan
1.	Identifikasi Masalah dan Kebutuhan Sosialisasi dan Komunikasi PIP	Konsinyering internal dalam hal pemetaan sosialisasi dan komunikasi Pancasila	Tercapai
2.	Pengumpulan dan Analisis Data yang melibatkan pakar, <i>stakeholder</i> , dsb	Pembuatan instrument survei kegiatan luring /daring	Tercapai
3.	Perumusan Strategi dan Alternatif Pendekatan Sosialisasi dan Komunikasi PIP	Perhitungan hasil survei, diskusi komprehensif dengan pihak terkait	Belum dilakukan
4.	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Sosialisasi dan Komunikasi PIP	Perancangan strategi sosialisasi dan komunikasi	Belum dilakukan
5.	Hasil Rekomendasi Kebijakan Sosialisasi dan Komunikasi PIP	Melakukan harmonisasi pedoman dan implementasi alur kebijakan	Belum dilakukan

Aktivitas dan kilas peristiwa selama dalam rangka capaian kinerja Terselenggaranya Sosialisasi dan Komunikasi Pembinaan Ideologi Pancasila yang Efektif Hingga ke Daerah dan Desa pada Triwulan II Tahun 2026 yaitu:

Tabel 2. 9 Aktivitas Terselenggaranya Sosialisasi dan Komunikasi Pembinaan Ideologi Pancasila yang Efektif Hingga ke Daerah dan Desa

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	FGD Penyusunan Cetak Biru dan Materi Sosialisasi Ideologi Pancasila (Tangerang, tanggal 7 s.d. 10 April 2026)	
2.	Penayangan Program (<i>Blocking Time</i>) di Televisi untuk acara “Mengenang 40 Hari Wafatnya Alm. Bapak Try Sutrisno (Jakarta, tanggal 10 April 2026)	
3.	Produksi dan Penayangan Liputan Media Televisi untuk Penguatan Komunikasi Publik pada Program Pembinaan Ideologi Pancasila (Jakarta, tanggal 13 Februari s.d. 24 April 2026)	
4.	FGD Penyusunan Rekomendasi Materi dan Kriteria Pemateri Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila (Jakarta, tanggal 27 s.d. 30 April 2026)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
5.	Pembinaan Ideologi Pancasila dengan tema "Penanaman Nilai-Nilai Pancasila Kepada Generasi Muda dalam Mewujudkan Generasi Muda yang Berkarakter Pancasila" (Yogyakarta, tanggal 6 s.d. 9 Mei 2026)	
6.	Uji Kelayakan Aplikasi Pancasila <i>Virtual Expo</i> dalam Rangka Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 (Jakarta, tanggal 30 Mei s.d. 1 Juni 2026)	
7.	TV Pool Penyiaran Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila (Jakarta, tanggal 1 Juni 2026)	
8.	Produksi dan Pengelolaan Program Pancasila <i>Virtual Expo</i> Tahun 2026 (Jakarta, tanggal 30 Mei s.d. 18 Agustus 2026)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
9.	Sosialisasi dan Komunikasi Pembinaan Ideologi Pancasila Bagi Guru dan Generasi Muda di Kabupaten Jembrana (Bali, tanggal 4 Juni 2026)	
10.	Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Guru dan Generasi Muda di Kabupaten Halmahera Barat (Maluku Utara, tanggal 25 Juni 2026)	
11.	Pembinaan Ideologi Pancasila Melalui Festival Anak Pancasila "Lima Rasa Selaras Dalam Satu Jiwa" (Tangerang Selatan, tanggal 20 Juni 2026)	
12.	Pembinaan Ideologi Pancasila dengan tema "Menggaungkan Gelora Spirit Pancasila dari Magelang untuk Indonesia yang lebih Bermartabat" di Magelang (Jawa Tengah, tanggal 27 Juni s.d. 1 Juli 2026)	

A.3. Persentase Penguatan Jaringan dan Pembudayaan Pancasila yang Efektif

Indikator Keberhasilan Program

Target Persentase Penguatan Jaringan dan Pembudayaan Pancasila yang Efektif Triwulan II Tahun 2026 adalah 100%.

Pada Triwulan II Tahun 2026 capaian target tersebut adalah sebesar 42,06% $(20\%+66\%+48,64\%+33,63\%)/4$ (rata-rata capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pembudayaan Pancasila yang Ditindaklanjuti dan Persentase Jaringan Relawan yang Mengaktualisasikan Pancasila):

$$\frac{\text{Capaian 2026}}{4} \times 100\% = \frac{20\%+66\%+48,64\%+33,63\%}{4} \times 100\% = 42,06\%$$

Capaian IKU sasaran program tersebut didukung oleh sasaran kegiatan: Terselenggaranya Pembudayaan dan Penguatan Jaringan Relawan Kebajikan Pancasila.

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan hingga Pada Triwulan II Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 10 Indikator Kinerja Kegiatan Terselenggaranya Pembudayaan dan Penguatan Jaringan Relawan Kebajikan Pancasila

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Persentase Rekomendasi Hasil Pembudayaan Pancasila yang Ditindaklanjuti	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembudayaan Nilai-nilai Pancasila yang Diselesaikan	2	20%	20% (Rekomendasi)
Persentase Jaringan Relawan yang Mengaktualisasikan Pancasila	Pemberian Penghargaan Pembinaan Ideologi Pancasila	3	2	66% (2 Event)
	Jumlah Fasilitas Pembinaan Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila	37	18 (48,64%)	48,64% (18 Kelompok Masyarakat)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
	Fasilitasi dan Pembinaan Pengarusutamaan Nilai Pancasila dan Pembudayaan Gerakan Relawan Pancasila	16.000	5.381 (33,63%)	33,63% (5.381Orang)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan capaian yang telah diperoleh pada Triwulan II Tahun 2026 yaitu:

a. Rekomendasi Hasil Pembudayaan Pancasila yang Ditindaklanjuti

Tersusunnya Rekomendasi hasil pembudayaan Pancasila yang ditindaklanjuti, yaitu saat ini masih dalam tahapan mulai tahapan perencanaan dan indentifikasi masalah. Sehingga Jumlah Rekomendasi Hasil Pembudayaan Nilai-Nilai Pancasila yang Diselesaikan, telah tercapai 20% dengan metode perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Rekomendasi} = \frac{\text{capaian tahapan}}{5 \text{ tahapan}}$$

$$= \frac{1 \text{ tahapan}}{5 \text{ tahapan}} = 20\%$$

Adapun tahapan-tahapan untuk menghasilkan rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan dan Identifikasi Masalah

Tahap awal ini bertujuan untuk mengumpulkan hasil pembudayaan Pancasila dari berbagai diskusi kelompok terarah yang sudah dilakukan dan menentukan rekomendasi utama yang perlu ditindaklanjuti.

2. Penetapan Prioritas

Setelah penentuan rekomendasi utama yang perlu ditindaklanjuti, maka perlu menyusun skala prioritas untuk

pelaksanaan berdasarkan sumber daya, waktu, dan target capaian.

3. Penyusunan Rencana Tindak Lanjut

Setelah menetapkan prioritas, perlu untuk menyusun rencana aksi yang jelas dan terukur: tujuan, langkah kerja, waktu pelaksanaan, indikator keberhasilan, serta pihak yang bertanggung jawab dan melibatkan pemangku kepentingan seperti lembaga pendidikan, pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan media.

4. Implementasi Program

Pada tahap ini Direktorat Jaringan dan Pembudayaan melaksanakan pembudayaan Pancasila sesuai dengan rencana tindak lanjut.

5. Menyusun Rekomendasi Hasil Pembudayaan yang Ditindaklanjuti

Setelah dari implementasi program pembudayaan yang ditindaklanjuti, maka tahap terakhir adalah menyusun rekomendasi hasil pembudayaan yang ditindaklanjuti.

b. Pemberian Penghargaan Pembinaan Ideologi Pancasila

Tahun 2026 ini target dari Pemberian Penghargaan Pembinaan Ideologi Pancasila yaitu 3 Event. Pada Triwulan II Tahun 2026 telah dilakukan 2 event Pemberian Penghargaan Pembinaan Ideologi Pancasila yaitu Penguatan Jaringan Pembudayaan Pancasila Bersama PIP dan Donor Darah dan Cek Kesehatan Gratis dalam rangka Peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 atau sebesar 66% dari total keseluruhan capaian dengan metode perhitungan sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Event Pemberian Penghargaan PIP}}{3 \text{ Event}} = \frac{2 \text{ Event}}{3 \text{ Event}} = 66\%$$

c. Fasilitas dan Pembinaan Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila

Tahun 2026 ini target dari Fasilitas dan Pembinaan Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila yaitu 100 Kelompok Masyarakat. Pada Triwulan II Tahun 2026 telah dilakukan Fasilitas dan Pembinaan Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila terhadap 18 Kelompok Masyarakat atau sebesar 48,64% dari total keseluruhan capaian dengan metode perhitungan sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Kelompok Masyarakat yang difasilitasi dan dibina}}{37 \text{ Kelompok Masyarakat}}$$

$$= \frac{18 \text{ Kelompok Masyarakat}}{37 \text{ Kelompok Masyarakat}} = 48,64\%$$

Adapun Kelompok Masyarakat tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 11 Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila

No.	Nama Komunitas/Kelompok Masyarakat	Asal Komunitas
1.	Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika (ANBTI)	Jakarta
2.	Pondok Salafiah Asholihin Al Abror	Jakarta Utara, Jakarta
3.	Kampung Adat Cireunde	Cimahi, Jawa Barat
4.	Perkumpulan Program Studi Pendidikan Sejarah se-Indonesia (P3SI)	Jakarta
5.	Lorong Buku Batavia	Jakarta Timur, Jakarta
6.	Holopis Kuntul Baris	Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta
7.	Akur Sunda Wiwitan Cireunde	Kota Cimahi, Jawa Barat
8.	Kampung Jimpitan KB2	Kota Tangerang, Banten
9.	Kampung Darling	Kota Tangerang, Banten
10.	Wisata Edukasi kampung Lempeni	Kabupaten Lumajang, Jawa Timur
11.	Traditional Games Returns (TGR)	Kota Bekasi, Jawa Barat
12.	Sena Wangi (Pondok Seni dan Budaya Boediardjo)	Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta

No.	Nama Komunitas/Kelompok Masyarakat	Asal Komunitas
13.	Yayasan Uswatun Hasanah	Kota Cimahi, Jawa Barat
14.	Nanang dan Galuh Kalimantan Selatan (Duta Wisata Kalimantan Selatan)	Kota Banjar, Kalimantan Selatan
15.	Laung Kuning Banjar	Kota Banjar, Kalimantan Selatan
16.	Naposo HKBP Sukamandi	Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara
17.	Relawan Palito	Kota Medan, Sumatera Utara
18.	PPSD Siahaan Kota Medan	Kota Medan, Sumatera Utara

- d. Fasilitasi dan Pembinaan Pengarusutamaan Nilai Pancasila dan Pembudayaan Gerakan Relawan Pancasila

Triwulan II Tahun 2026 ini target dari Fasilitasi dan Pembinaan Pengarusutamaan Nilai Pancasila dan Pembudayaan Gerakan Relawan Pancasila yaitu 16.000 Orang. Pada Triwulan II Tahun 2026 tercapai 5.381 orang yang Terfasilitasi dan Terbina melalui Pengarusutamaan Nilai Pancasila dan Pembudayaan Gerakan Relawan Pancasila atau sebesar 33,63 % dari total keseluruhan capaian dengan metode perhitungan sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah Relawan Pancasila yang terfasilitasi dan terbina}}{16.000 \text{ Orang}}$$

$$= \frac{5.381 \text{ Orang}}{16.000 \text{ Orang}} = 33,63\%$$

Adapun Relawan Pancasila yang terfasilitasi dan terbina tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 12 Relawan Pancasila yang Terfasilitasi dan Terbina

No.	Nama Kegiatan	Jumlah Peserta
1.	Kegiatan Audiensi Inovasi Pembudayaan Pancasila Bersama Kampung Adat Cireundeu Tahun 2026 di Kota Cimahi Tanggal 27 s.d. 29 Januari 2026	4 Orang

No.	Nama Kegiatan	Jumlah Peserta
2.	Kegiatan Penguatan Jaringan Pembudayaan Pancasila Bersama Ikon Pancasila di Yogyakarta Pada Tanggal 02 s.d. 05 Maret 2026	750 Orang
3.	Kegiatan Penguatan Jaringan Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila Melalui Seminar Nasional dan Penguatan Sejarah Pancasila di Surakarta, Jawa Tengah, 3 s.d. 6 Februari 2026	300 Orang
4.	Kegiatan Menyapa Komunitas dan Budayawan di Pasar Gembong, Jakarta Timur Pada Tanggal 20 Februari 2026	100 Orang
5.	Kegiatan Donor Darah dan Cek Kesehatan Gratis dalam rangka Peringatan Hari Lahir Pancasila 2026	127 orang
6.	Kegiatan Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila Kepada Masyarakat Tahun di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada tanggal 09 s.d. 12 Juni 2026	300 orang
7.	Kegiatan Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila Kepada Masyarakat Tahun di Kota Medan, Sumatera Utara pada tanggal 12 .d. 15 Juni 2026	300 orang
8.	Kegiatan Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Serang, Banten Pada Tanggal 15 s.d. 18 Juni 2026	300 orang
9.	Kegiatan Penguatan Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara: Melestarikan Danau Toba Sebagai Kawasan Strategis Nasional Pada Tanggal 16 s.d. 19 Juni 2026	300 orang
10.	Kegiatan Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila Bersama Masyarakat di Kota Palembang, Sumatera Selatan pada tanggal 20 s.d. 23 Juni 2026	300 orang
11.	Kegiatan Penguatan Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila Kepada Masyarakat di Kota Cilegon, Banten Tanggal 25 s.d. 28 Juni 2026	300 orang

No.	Nama Kegiatan	Jumlah Peserta
12.	Kegiatan Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung Tanggal 25 s.d. 28 Juni 2026	300 orang
13.	Kegiatan Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila Kepada Masyarakat: Pancasila Untuk Pemula di Jakarta Pada Tanggal 28 Juni 2026	300 orang
14.	Kegiatan Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila Bersama Masyarakat Kabupaten Barito Kuala di Banjarmasin, Kalimantan Selatan Pada Tanggal 25 s.d. 28 Juni 2026	300 orang
15.	Kegiatan Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila Bersama Masyarakat Kabupaten Banjar di Banjarmasin, Kalimantan Selatan Pada Tanggal 28 s.d. 30 Juni 2026	300 orang
16.	Kegiatan Penguatan Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila Kepada Masyarakat di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan Tanggal 26 s.d. 29 Juni 2026	300 orang
17.	Kegiatan Penguatan Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat Pada Tanggal 27 Juni s.d. 30 Juni 2026	300 orang
18.	Kegiatan Penguatan Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2026 di Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat Pada Tanggal 29 Juni s.d. 02 Juli 2026	300 orang
19.	Kegiatan Penguatan Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat Pada Tanggal 30 Juni s.d. 02 Juli 2026	300 orang

Aktivitas dan kilas peristiwa dalam rangka capaian kinerja Terselenggaranya Pembudayaan dan Penguatan Jaringan Relawan Kebajikan Pancasila Pada Triwulan II Tahun 2026 adalah:

Tabel 2. 13 Aktivitas Penyelenggaraan Pembudayaan Ideologi Pancasila

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Kegiatan Penguatan Jaringan Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila Melalui Seminar Kebudayaan "Menghidupkan Kartini di Era Digital" (Depok, tanggal 11 s.d. 12 Mei 2026)	
2.	Kegiatan Donor Darah dan Cek Kesehatan dalam Rangka Peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 (Jakarta, tanggal 30 Mei s.d. 1 Juni 2026)	
3.	Rapat Pelaksanaan Penyusunan Survey Efektivitas Pembudayaan Tahun 2026 (Jakarta, tanggal 3 Juni 2026)	
4.	Kegiatan Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila Kepada Masyarakat Di Kabupaten Deli Serdang (Sumatera Utara, tanggal 9 s.d. 12 Juni 2026)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
5.	Kegiatan Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila Kepada Masyarakat di Kota Medan (Jakarta, tanggal 12 s.d. 15 Juni 2026)	
6.	Kegiatan Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila Kepada Masyarakat di Kabupaten Serang (Banten, tanggal 15 s.d 18 Juni 2026)	
7.	Penguatan Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila Kepada Masyarakat di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara: Melestarikan Danau Toba Sebagai Kawasan Strategis Nasional (Sumatera Utara, tanggal 16 s.d. 19 Juni 2026)	
8.	Kegiatan Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila Bersama Masyarakat di Kota Palembang (Sumatera Selatan, tanggal 20 s.d. 23 Juni 2026)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
9.	Kegiatan Penguatan Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila Kepada Masyarakat di Kota Cilegon (Banten, tanggal 25 s.d. 28 Juni 2026)	
10.	Kegiatan Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila Kepada Masyarakat: Pancasila untuk Pemula di Jakarta (Jakarta, tanggal 28 Juni 2026)	
11.	Kegiatan Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila Kepada Masyarakat di Kabupaten Pesawaran (Lampung, tanggal 25 s.d. 28 Juni 2026)	
12.	Kegiatan Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila Bersama Masyarakat Kabupaten Barito Kuala di Banjarmasin (Kalimantan Selatan, tanggal 25 s.d. 28 Juni 2026)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
13.	Kegiatan Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila Bersama Masyarakat Kabupaten Banjar di Banjarmasin (Kalimantan Selatan, tanggal 28 s.d. 30 Juni 2026)	
14.	Kegiatan Penguatan Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila Kepada Masyarakat di Kabupaten Bantaeng (Sulawesi Selatan, tanggal 26 s.d. 29 Juni 2026)	
15.	Kegiatan Penguatan Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila Kepada Masyarakat di Kabupaten Sanggau (Kalimantan Barat, tanggal 27 Juni s.d. 30 Juni 2026)	
16.	Penguatan Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila Kepada Masyarakat 2026 di Kota Padang Panjang (Yogyakarta, tanggal 2 s.d. 5 Maret 2026)	

B. Terwujudnya Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyusunan dan Pengawasan Regulasi, serta Advokasi Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila yang Efektif

Melembagakan Pancasila pada setiap peraturan perundang-undangan dilakukan dengan mendorong terjadinya pelembagaan Pancasila dalam setiap penyusunan program pembangunan nasional, dasar peraturan, perundang-undangan, serta kebijakan pemerintah. Pancasila sebagai falsafah, pandangan hidup, dan ideologi kenegaraan Indonesia mengandung cita hukum tersendiri yang secara terus menerus dilakukan internalisasi dan institusionalisasi. Bahwa nilai-nilai Pancasila harus dipandang sebagai norma dasar bernegara (*grundnorm/staatsfundamentalnorn*) yang menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.

Indikator Keberhasilan Sasaran Program Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyusunan dan Pengawasan Regulasi, serta Advokasi Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila adalah termanfaatkan dan ditindaklanjutnya capaian keluaran yang dihasilkan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. 14 Indikator Kinerja Program Terwujudnya Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyusunan dan Pengawasan Regulasi, serta Advokasi Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila yang Efektif

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2026	REALISASI	Ket
Persentase Rekomendasi Hasil Penyelarasan Rancangan Produk Hukum yang ditindaklanjuti	100%	44%	 44%
Persentase Rekomendasi Hasil Advokasi Nilai-Nilai Pancasila dimanfaatkan	100%	50%	 50%
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Regulasi yang ditindaklanjuti	100%	40%	 40%

Realisasi capaian kinerja program tersebut diperoleh dan dicapai sebagai berikut:

B.1. Persentase Rekomendasi Hasil Penyelarasan Rancangan Produk Hukum yang Ditindaklanjuti

Indikator Keberhasilan:

Target Persentase Rekomendasi Hasil Penyelarasan Rancangan Produk Hukum yang Ditindaklanjuti Tahun 2026 adalah 100%.

Pada Triwulan II Tahun 2026 capaian target tersebut adalah sebesar 44% (rata-rata persentase capaian *output*) dengan uraian capaian sebagai berikut:

$$\frac{\text{Capaian tahapan 2026}}{(22 \text{ rekomendasi} \times 3 \text{ tahapan penyusunan})} \times 100\% = \frac{29 \text{ Tahapan}}{66 \text{ Tahapan}} \times 100\% = 44\%$$

Capaian IKU sasaran program tersebut didukung oleh sasaran kegiatan: Terlaksananya analisis dan penyelarasan rancangan produk hukum nasional dengan nilai-nilai Pancasila.

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan hingga Pada Triwulan II Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 15 Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya Analisis dan Penyelarasan Rancangan Produk Hukum Nasional dengan Nilai-Nilai Pancasila

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Persentase rekomendasi hasil analisis dan penyelarasan rancangan produk hukum nasional dengan nilai-nilai Pancasila yang ditindaklanjuti	Jumlah Rekomendasi Hasil Analisis dan Penyelarasan Rancangan Produk Hukum yang Selaras dengan Nilai Pancasila yang ditindaklanjuti	22	44%	44% (Rekomendasi Kebijakan)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan capaian yang telah diperoleh pada Triwulan II Tahun 2026 yaitu:

Dalam hal pelaksanaan analisis dan penyelarasan rancangan produk hukum nasional dengan nilai Pancasila pada tahun anggaran 2026 memiliki target 22 rekomendasi terhadap rancangan produk hukum nasional yang diselaraskan dengan Indikator Nilai Pancasila. Dimana untuk mencapai target ini dibutuhkan 3 tahapan tiap rekomendasinya, yaitu tahapan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Penyampaian. Hingga Triwulan II Tahun 2026 (Januari s.d. Juni), Direktorat Analisis dan Penyelarasan telah melakukan beberapa tahapan dari total 66 tahapan untuk menyelesaikan 22 rekomendasi kebijakan dari rancangan produk hukum nasional yang diselaraskan dengan Indikator Nilai Pancasila dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 16 Rekomendasi Rancangan Produk Hukum yang Diselaraskan dengan Indikator Nilai Pancasila

No	Output	Perencanaan	Pelaksanaan	Penyampaian
1.	Rekomendasi Atas Pelaksanaan Analisis dan Penyelarasan Rancangan Undang-Undang/Rancangan Peraturan Pemerintah/Rancangan Peraturan Presiden	1	1	0
2.	Rekomendasi Atas Pelaksanaan Analisis dan Penyelarasan Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga	1	1	0
3.	Rekomendasi Atas Pelaksanaan Analisis dan Penyelarasan Rancangan Produk Hukum Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	1	1	1
4.	Rekomendasi Atas Pelaksanaan Analisis dan Penyelarasan Rancangan Produk Hukum Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Bidang Perekonomian, Maritim, dan Investasi	1	1	0

No	Output	Perencanaan	Pelaksanaan	Penyampaian
5.	Rekomendasi Atas Pelaksanaan Analisis dan Penyelarasan Rancangan Produk Hukum Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	1	1	1
6.	Rekomendasi Atas Pelaksanaan Internalisasi Nilai Pancasila Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	1	0	0
7.	Rekomendasi Atas Pelaksanaan Internalisasi Nilai Pancasila Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perekonomian, Maritim, dan Investasi	1	0	0
8.	Rekomendasi Atas Pelaksanaan Internalisasi Nilai Pancasila Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	1	0	0
9.	Rekomendasi Atas Pelaksanaan Partisipasi Bermakna Rancangan Produk Hukum Nasional di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara	1	0	0
10.	Rekomendasi Atas Pelaksanaan Partisipasi Bermakna Rancangan Produk Hukum Nasional di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau	1	0	0
11.	Rekomendasi Atas Pelaksanaan Partisipasi Bermakna Rancangan Produk Hukum Nasional di Provinsi Sumatera Barat dan Bengkulu	1	0	0
12.	Rekomendasi Atas Pelaksanaan Partisipasi Bermakna Rancangan Produk Hukum Nasional di Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan	1	0	0

No	Output	Perencanaan	Pelaksanaan	Penyampaian
13.	Rekomendasi Atas Pelaksanaan Partisipasi Bermakna Rancangan Produk Hukum Nasional di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Lampung	1	0	0
14.	Rekomendasi Atas Pelaksanaan Partisipasi Bermakna Rancangan Produk Hukum Nasional di Provinsi Banten dan DKI Jakarta	1	0	0
15.	Rekomendasi Atas Pelaksanaan Partisipasi Bermakna Rancangan Produk Hukum Nasional di Provinsi Jawa Barat	1	0	0
16.	Rekomendasi Atas Pelaksanaan Partisipasi Bermakna Rancangan Produk Hukum Nasional di Provinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta	1	0	0
17.	Rekomendasi Atas Pelaksanaan Partisipasi Bermakna Rancangan Produk Hukum Nasional di Provinsi Jawa Timur	1	0	0
18.	Rekomendasi Atas Pelaksanaan Partisipasi Bermakna Rancangan Produk Hukum Nasional di Provinsi Bali, NTB dan NTT	1	0	0
19.	Rekomendasi Atas Pelaksanaan Partisipasi Bermakna Rancangan Produk Hukum Nasional di Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah	1	0	0
20.	Rekomendasi Atas Pelaksanaan Partisipasi Bermakna Rancangan Produk Hukum Nasional di Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	1	0	0
21.	Rekomendasi Atas Pelaksanaan Partisipasi Bermakna Rancangan Produk Hukum Nasional di Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara,	1	0	0

No	Output	Perencanaan	Pelaksanaan	Penyampaian
	Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara dan Gorontalo			
22.	Rekomendasi Atas Pelaksanaan Partisipasi Bermakna Rancangan Produk Hukum Nasional di Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Tengah dan Papua Selatan	1	0	0

Sehingga capaian kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 sebesar 44 % dengan rincian perhitungan:

$$\frac{\text{Capaian tahapan 2026}}{(22 \text{ rekomendasi} \times 3 \text{ tahapan penyusunan})} \times 100\%$$

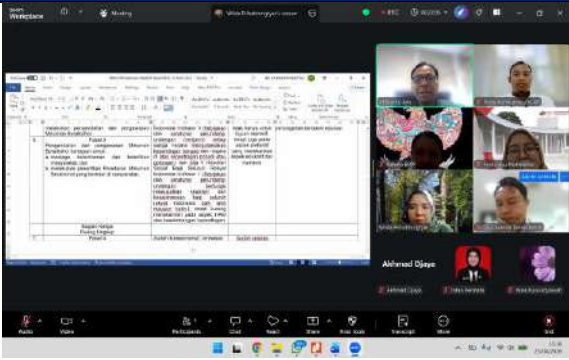
$$= \frac{29 \text{ Tahapan}}{66 \text{ Tahapan}} \times 100\% = 44\%$$

Aktivitas dan kilas peristiwa selama dalam rangka capaian kinerja Terlaksananya analisis dan penyelarasan rancangan produk hukum nasional dengan nilai-nilai Pancasila pada Triwulan II Tahun 2026 yaitu:

Tabel 2. 17 Aktivitas Terlaksananya Analisis dan Penyelarasan Rancangan Produk Hukum Nasional dengan Nilai-Nilai Pancasila

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Pendalaman Tata Cara Pemberian Rekomendasi Penyelarasan di Direktorat Analisis dan Penyelarasan (Jakarta, tanggal 6 April 2026)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
2.	Audiensi Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Timur dalam Rangka Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Lampung Timur (Jakarta, tanggal 8 April 2026)	
3.	Penyusunan Matriks Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (Jakarta, tanggal 13 April 2026)	
4.	Audiensi DPRD Kabupaten Lampung Tengah dalam Rangka Konsultasi Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Jakarta, tanggal 16 April 2026)	
5.	Finasilasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Boalemo Provinsi Gorontalo (Gorontalo, tanggal 19 s.d. 21 April 2026)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
6.	Konsultasi Ahli Penyelarasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dengan Universitas Airlangga (Jakarta, tanggal 23 April 2026)	
7.	Rapat Audiensi DPRD Kabupaten Lampung Utara dalam Rangka Konsultasi Judul Propemperda Tahun 2026 (Jakarta, tanggal 28 April 2026)	
8.	Audiensi DPRD Kabupaten Sumedang terkait Penguatan Peran DPRD dalam Pembinaan Ideologi Pancasila dan Penyusunan Peraturan Daerah di Jakarta (Jakarta, tanggal 7 Mei 2026)	
9.	Konsultasi DPRD Kabupaten Lampung Timur terkait Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (Jakarta, tanggal 21 Mei 2026)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
10.	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelarasan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah di Jawa Barat (Jawa Barat, tanggal 2 s.d. 5 Juni 2026)	
11.	Penyelarasan Rancangan Peraturan Kabupaten Mojokerto tentang Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Mojokerto (Jawa Timur, tanggal 16 s.d. 18 Juni 2026)	

B.2. Persentase Rekomendasi Hasil Advokasi Nilai-nilai Pancasila yang Dimanfaatkan

Indikator Keberhasilan:

Target Persentase Rekomendasi Hasil Advokasi Nilai-nilai Pancasila yang Dimanfaatkan pada Tahun 2026 adalah 100%.

Pada Triwulan II Tahun 2026 capaian target tersebut adalah sebesar 50% $(40\%+60\%)/2$ (rata-rata persentase capaian *output*) dengan uraian capaian sebagai berikut:

$$\frac{\text{Capaian 2026}}{2} \times 100\% = \frac{40\%+60\%}{2} \times 100\% = 50\%$$

Capaian IKU sasaran program tersebut didukung oleh sasaran kegiatan: Terlaksananya Layanan Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila.

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan hingga Pada Triwulan II Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 18 Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya Layanan Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Persentase rekomendasi hasil advokasi pembinaan ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti	Jumlah Rekomendasi Hasil Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila Terhadap LTN/K/L/D yang Diselesaikan	6	40%	40% (Rekomendasi Kebijakan)
	Jumlah Rekomendasi Hasil Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila Terhadap Organisasi Sosial dan Politik Serta Komponen Masyarakat Lainnya yang Diselesaikan	2	60%	60% (Rekomendasi Kebijakan)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan capaian yang telah diperoleh pada Triwulan II Tahun 2026 yaitu:

a. Rekomendasi Hasil Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila Terhadap LTN/K/L/D yang Diselesaikan

Pada Triwulan II Tahun 2026, capaian rekomendasi hasil advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila terhadap LTN/K/L/D telah dicapai 40%. Angka ini diperoleh dari penyelesaian tahapan ketiga dalam proses penyusunan rekomendasi, yakni finalisasi dokumen rekomendasi. Artinya, proses masih berjalan dan menunjukkan progres awal yang positif. Diharapkan capaian ini terus meningkat seiring dengan penyelesaian tahapan-tahapan berikutnya secara bertahap dan berkelanjutan. Adapun tahapan yang telah dilalui yaitu:

$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{Capaian tahapan 2026}}{(6 \text{ rekomendasi} \times 5 \text{ tahapan penyusunan})} \times 100\% \\
 &= \frac{12}{30} \times 100\% = 40\%
 \end{aligned}$$

No.	Rekomendasi	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4	Tahap 5
		inventarisasi masalah dan kendala	perumusan substansi dan arah kebijakan	finalisasi dokumen rekomendasi	penyerahan dan penetapan hasil kajian	monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut
1.	Rekomendasi Hasil Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila Terhadap LTN/K/L/D	✓	✓	✓		
2.	Advokasi PIP terkait tindak lanjut Rekomendasi Buku Saku Merawat Keberagaman di Jawa Barat	✓	✓	✓		
3.	Advokasi PIP terkait tindak lanjut Rekomendasi Buku Saku Merawat Keberagaman di Aceh dan Maluku Utara	✓				
4.	Advokasi Goes To School Tingkat Sekolah Menengah Atas di Banten dan Sumatera Barat	✓	✓	✓		
5.	Advokasi Goes To School Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Jawa Timur dan Tangerang Selatan	✓	✓	✓		
6.	Advokasi Goes To School Tingkat Sekolah Dasar di Depok, Jawa Barat dan Nusa Tenggara Timur.	✓				

b. Rekomendasi Hasil Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila Terhadap Organisasi Sosial dan Politik Serta Komponen Masyarakat Lainnya yang Diselesaikan

Pada Triwulan II Tahun 2026, capaian tahapan penyusunan Rekomendasi Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila terhadap organisasi sosial dan komponen masyarakat lainnya mencapai 60%. Persentase ini dihitung dari total lima tahapan yang direncanakan untuk total tiga rekomendasi.

Berikut adalah deskripsi mendetail mengenai tabel persentase yang menunjukkan progres dokumen rekomendasi Direktorat Advokasi:

Tahapan penyusunan rekomendasi hasil advokasi pembinaan ideologi Pancasila disusun secara berjenjang dalam lima tahap yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan proses yang utuh. Tahap pertama adalah Inventarisasi Masalah dan Kendala, yang dilakukan melalui pemetaan persoalan substantif dan teknis yang dihadapi oleh kelompok sasaran atau instansi yang menjadi objek advokasi. Tahap kedua adalah Perumusan Substansi dan Arah Kebijakan, mencakup penggalian informasi empiris maupun normatif yang relevan guna memperkuat dasar penyusunan rekomendasi. Tahap ketiga adalah Perumusan Rekomendasi Advokasi, yang memuat arah kebijakan, alternatif solusi, serta bentuk intervensi pembinaan ideologi Pancasila secara konstruktif dan aplikatif. Tahap keempat adalah penyerahan dan penetapan kajian yaitu tahapan strategis untuk mengomunikasikan hasil rekomendasi kepada para pemangku kepentingan agar dapat diintegrasikan ke dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan kebijakan. Terakhir, tahap kelima adalah Monitoring dan Evaluasi atas Tindak Lanjut, yakni proses pengawasan terhadap implementasi rekomendasi dan pengukuran efektivitasnya dalam menjawab permasalahan ideologis yang telah diidentifikasi sejak awal.

Setiap rekomendasi disusun dengan pola kerja yang serupa, yaitu menargetkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya sebagai pihak yang diharapkan dapat memanfaatkan serta

mengimplementasikan rekomendasi tersebut secara nyata dalam kebijakan atau program kerja. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci dalam memperkuat relevansi dan keberterimaan rekomendasi di tingkat pelaksana. Persentase capaian yang tercantum dalam laporan menunjukkan sejauh mana tahapan penyusunan rekomendasi telah dilakukan dan direspons oleh pihak-pihak terkait, baik dalam bentuk pengakuan, integrasi ke dalam kebijakan, maupun tindak lanjut konkret di lapangan, yang seluruhnya menjadi tolak ukur keberhasilan proses advokasi PIP. Diharapkan capaian ini terus meningkat seiring dengan penyelesaian tahapan-tahapan berikutnya secara bertahap dan berkelanjutan dengan rincian layanan yaitu:

$$\frac{2 \text{ komendasi} \times \text{Capaian tahapan 2026}}{(2 \text{ rekomendasi} \times 5 \text{ tahapan penyusunan})} \times 100\%$$

$$= \frac{6}{10} \times 100\% = 60\%$$

No.	Rekomendasi	Tahap 1 inventarisasi masalah dan kendala	Tahap 2 Pengumpulan dan Analisis Data Pendukung	Tahap 3 Perumusan Rekomendasi Advokasi	Tahap 4 Koordinasi Lintas Sektor, Penyerahan dan Diseminasi	Tahap 5 monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut
1	Advokasi PIP dalam rangka Penguatan Purnapaskibraka Duta Pancasila sebagai Agen Keteladanan di Sumatera Barat dan Nusa Tenggara Barat	✓	✓	✓		
2	Advokasi PIP terkait Dukungan Pengaturan Advokasi PIP di Masyarakat.	✓	✓	✓		

Aktivitas dan kilas peristiwa selama dalam rangka capaian kinerja Terlaksananya Layanan Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila pada Triwulan II Tahun 2026 yaitu:

Tabel 2. 19 Aktivitas Terlaksananya Layanan Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Inventarisasi Masukan Buku Saku Advokasi PIP “Merawat Kehidupan Keagamaan Dalam Masyarakat Majemuk Di Jawa Barat” (Jakarta, tanggal 14 April 2026)	
2.	Bimbingan Teknis Penguatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Bandar Lampung (Lampung, tanggal 23 s.d. 25 April 2026)	
3.	Finalisasi Buku Saku “Merawat Kehidupan Keagamaan dalam Masyarakat Majemuk di Jawa Barat bersama Dewan Pengarah, Staf Khusus dan Dewan Pakar” yang akan dilaksanakan di Bekasi (Bekasi, tanggal 29 April s.d. 1 Mei 2026)	
4.	Koordinasi Pengumpulan Bahan dan Pendalaman Substansi Penyusunan Bab Baru Buku Saku Advokasi “Merawat Kehidupan Keagamaan dalam Masyarakat Majemuk” Bitung (Sulawesi Utara, tanggal 9 s.d. 12 Juni 2026)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
5.	Finalisasi Peraturan BPIP tentang Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan BPIP dan Rancangan Peraturan BPIP tentang Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila (Yogyakarta, tanggal 2 s.d. 4 Juni 2026)	
6.	Audiensi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (Jakarta, tanggal 29 Juni 2026)	
7.	Koordinasi Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila Goes To School di Sekolah Rakyat (Malang, tanggal 22 s.d. 25 Juni 2026)	
8.	Persiapan Pelaksanaan Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila Goes to School di Sekolah Rakyat Terintegrasi 47 Malang (Tangerang Selatan, tanggal 7 s.d. 9 Juli 2026)	

B.3. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Regulasi yang Ditindaklanjuti

Indikator Keberhasilan:

Target Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Regulasi yang ditindaklanjuti pada Triwulan II Tahun 2026 adalah 100%

Pada Triwulan II Tahun 2026 capaian target tersebut adalah sebesar 40% (rata-rata persentase capaian *output*) dengan uraian capaian sebagai berikut:

$$\frac{\text{Capaian tahapan 2026}}{5 \text{ tahapan penyusunan}} \times 100\% = \frac{2 \text{ Tahapan}}{5 \text{ Tahapan}} \times 100\% = 40\%$$

Capaian IKU sasaran program tersebut didukung oleh sasaran kegiatan: Terlaksananya Pengawasan Kebijakan dan Regulasi yang Bertentangan dengan Nilai Pancasila.

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan hingga Pada Triwulan II Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 20 Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya Pengawasan Kebijakan dan Regulasi yang Bertentangan dengan Nilai Pancasila

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Persentase rekomendasi hasil pengawasan kebijakan dan regulasi yang bertentangan dengan nilai Pancasila yang ditindaklanjuti	Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Kebijakan dan Regulasi yang Bertentangan dengan Nilai Pancasila yang ditindaklanjuti	3	40%	40% (Rekomendasi Kebijakan)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan capaian yang telah diperoleh pada Triwulan II Tahun 2026 yaitu:

Pada Tahun Anggaran 2026 Dukungan Deputy Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi terhadap capaian IKU tersebut adalah menghasilkan 3 Rekomendasi Hasil Pengawasan Kebijakan dan Regulasi yang Bertentangan dengan Nilai Pancasila yang ditindaklanjuti yakni terdiri dari 3 (tiga) hasil kajian kebijakan dan regulasi yang

dianalisis dan evaluasi. Sampai Triwulan II Tahun 2026 Direktorat Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan Regulasi dalam tahapan Penetapan regulasi yang akan dikaji (aduan masyarakat, inventarisasi internal, permohonan K/L lain). Dalam hal ini capaian tahapan pembentukan rekomendasi diukur dengan 5 Tahapan yaitu:

1. Identifikasi dan Verifikasi;
2. Pendalaman Materi;
3. Penyusunan Laporan;
4. Penyusunan Usulan Rekomendasi; dan
5. Penyampaian hasil rekomendasi.

Pada Triwulan II Tahun 2026, dalam penyusunan 3 Rekomendasi Hasil Pengawasan Kebijakan dan Regulasi yang Bertentangan dengan Nilai Pancasila yang ditindaklanjuti, capaian rekomendasi telah mencapai 40%. Dalam hal ini capaian tahapan pembentukan rekomendasi diukur dengan :

$$\frac{\text{Capaian tahapan hingga TW II}}{\frac{5 \text{ tahapan penyusunan}}{2}} \times 100\%$$

$$= \frac{2}{5 \text{ tahapan penyusunan rekomendasi}} \times 100\% = 40\%$$

No.	Rekomendasi Hasil Kajian	Tahap 1 Identifikasi dan Verifikasi	Tahap 2 Pendalaman Materi	Tahap 3 Penyusunan Laporan	Tahap 4 Penyusunan Usulan Rekomendasi	Tahap 5 Penyampaian Hasil Rekomendasi
1.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian	✓	✓			
2.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	✓	✓			
3.	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.	✓	✓			

Tabel 2. 21 Aktivitas Terlaksananya Pengawasan Kebijakan dan Regulasi yang Bertentangan dengan Nilai Pancasila

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Bimbingan Teknis Penguatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah (Jakarta, tanggal 21 s.d. 4 April 2026)	
2.	Rapat Internalisasi Indikator Nilai Pancasila (INP) Pada Hasil Kajian Regulasi Dan Penyelarasan Regulasi (Jakarta, tanggal 22 April 2026)	
3.	Internalisasi dan Institusionalisasi Nilai Pancasila pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian Berdasarkan indikator Nilai Pancasila (Jakarta, tanggal 26 Mei 2026)	
4.	Pengumpulan Data Lapangan Terkait Efektivitas Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dalam Perspektif Nilai-Nilai Pancasila (Makassar, tanggal 3 s.d. 6 Juni 2026)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
5.	Pengumpulan Data Lapangan Terkait Efektivitas Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Perspektif Nilai-Nilai Pancasila (Manado, tanggal 2 s.d. 6 Juni 2026)	
6.	Pemantapan Penyusunan Rencana Strategis Direktorat Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan Regulasi (Jakarta, tanggal 18 Juni 2026)	
7.	Pendalaman Materi Terkait Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Dalam Perspektif Nilai-Nilai Pancasila (Bandung, tanggal 22 s.d. 25 Juni 2026)	
8.	Pengumpulan Data Empiris Lanjutan Terkait Efektivitas Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Dalam Perspektif Nilai - Nilai Pancasila (Kupang, tanggal 29 Juni s.d. 2 Juli 2026)	

C. Terwujudnya Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyusunan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Efektif

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP sebagai lembaga PIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang BPIP, Deputi Bidang Pengkajian dan Materi memiliki tugas untuk menyelenggarakan perumusan arah kebijakan PIP, pengkajian dan perumusan standardisasi materi PIP. Terdapat beberapa alasan yang melatarbelakangi pentingnya penyelenggaraan perumusan arah kebijakan PIP, pengkajian dan perumusan standardisasi materi PIP, diantaranya adalah:

1. Intensitas pembelajaran Pancasila selama era reformasi mengalami penurunan yang mengakibatkan kurangnya wawasan Pancasila di kalangan pelajar dan kaum muda;
2. Kurangnya efektivitas dan daya tarik pembelajaran Pancasila secara isi dan metodologi;
3. Masih adanya distorsi sejarah akibat kurangnya akses terhadap sumber autentik;
4. Rendahnya tingkat ke dalam literasi masyarakat Indonesia secara umum yang berakibat menurunnya daya pikir dan nalar kritis;
5. Pemahaman terhadap Pancasila belum sepenuhnya dikembangkan secara ilmiah baik melalui pendekatan intradisiplin, multidisiplin, dan transdisiplin.

Berdasarkan urgensi atas tugas yang diemban oleh Deputi Bidang Pengkajian dan Materi, maka Sasaran Program Deputi Bidang Pengkajian dan Materi yang ditetapkan dalam Rencana Strategis BPIP Tahun 2025-2029 adalah berupa Terwujudnya internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam penyusunan kebijakan pembangunan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ukuran keberhasilan Sasaran Program Terwujudnya internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam penyusunan kebijakan pembangunan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah:

Tabel 2. 22 Indikator Kinerja Program Terwujudnya Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyusunan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Efektif

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2026	REALISASI 2026	Ket
Persentase rekomendasi hasil pengkajian kebijakan yang dimanfaatkan	100%	45%	 45%
Persentase rekomendasi hasil pengkajian materi yang dimanfaatkan	100%	50%	 50 %
Persentase rekomendasi hasil pengkajian implementasi yang dimanfaatkan	100%	47,61%	 47,61%

Realisasi capaian kinerja program tersebut diperoleh dan dicapai sebagai berikut:

C.1. Persentase Rekomendasi Hasil Pengkajian Kebijakan yang Dimanfaatkan

Indikator Keberhasilan:

Target Persentase rekomendasi hasil pengkajian kebijakan yang dimanfaatkan pada Tahun 2026 adalah 100%.

Pada Triwulan II Tahun 2026 capaian target tersebut adalah 45% (proses penyusunan kajian) dengan uraian capaian sebagai berikut:

$$\frac{\text{capaian tahapan rekomendasi}}{2 \text{ rekomendasi kebijakan}} = \frac{(50\% + 40\%)}{2 \text{ rekomendasi kebijakan}}$$
$$= \frac{90\%}{2 \text{ rekomendasi kebijakan}} = 45\%$$

Capaian IKU sasaran program tersebut didukung oleh sasaran kegiatan: Terlaksananya Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan hingga Pada Triwulan II Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 23 Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Persentase Rekomendasi Kajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila yang Ditindaklanjuti	Jumlah Rekomendasi Kajian Kebijakan Strategis PIP yang diselesaikan	2	45%	45% (Rekomendasi)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan capaian yang telah diperoleh pada Triwulan II Tahun 2026 yaitu:

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut diukur dengan indikator kinerja kegiatan (IKK) berupa Persentase Rekomendasi Kajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila yang Ditindaklanjuti sebesar 100%, dengan rincian *output*, yaitu dua (2) rekomendasi kebijakan strategis Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila yaitu: (1) rekomendasi sistem pengorganisasian, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian (korsindal) Peta Jalan PIP pemerintah daerah provinsi; dan (2) Rekomendasi Hasil Kajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila Bidang Ekologi. Capaian kinerja hingga Triwulan II sebesar 45%, dengan rincian perhitungan:

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{capaian tahapan rekomendasi}}{2 \text{ rekomendasi kebijakan}} \\
 &= \frac{(50\% + 40\%)}{2 \text{ rekomendasi kebijakan}} \\
 &= \frac{90\%}{2 \text{ rekomendasi kebijakan}} = 45\%
 \end{aligned}$$

Berikut merupakan detail capaian kinerja Pengkajian Kebijakan PIP pada Triwulan II Tahun 2026, dengan mempertimbangkan kalender rencana kerja yang telah disusun:

1) Penyerapan Pandangan dan Pengelolaan Aspirasi Masyarakat

Kajian penyerapan pandangan dan pengelolaan aspirasi masyarakat pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung penyusunan rekomendasi Kebijakan. Kegiatan penyerapan pandangan dan pengelolaan aspirasi masyarakat dilakukan dengan 2 metode, yaitu a) penyerapan pandangan melalui pengelolaan dan penerbitan jurnal ilmiah dan b) penyerapan pandangan dan pengelolaan aspirasi masyarakat melalui pelaksanaan diseminasi hasil kajian.

a) Pengelolaan dan Penerbitan Jurnal Ilmiah

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Direktorat Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam penyerapan pandangan, Direktorat Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila melakukan beberapa pengelolaan jurnal ilmiah yaitu:

- Pengelolaan Jurnal Pancasila: Jurnal Keindonesiaan

Jurnal ilmiah PJK BPIP meraih peringkat dua (SINTA 2), berdasarkan Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan KEMENDIKTISAINTEK RI Nomor 0110/C3/DT.05.00/2026 Tentang Pemberitahuan Hasil Reakreditasi Jurnal Ilmiah Periode 2 Tahun 2026 tertanggal 3 Februari 2026, dengan nomor urut data 321. Berdasarkan evaluasi dan persiapan untuk menuju indeks internasional, maka diperlukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan jurnal dilakukan dengan penambahan visitasi dan sitasi dan penambahan tim editorial dan mitra bestari khususnya dengan afiliasi luar negeri dan dari berbagai mancanegara.

Pengelolaan jurnal ilmiah “Pancasila: Jurnal Keindonesiaan (PJK)” pada tahun 2026, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya yaitu dua kali penerbitan, periode April 2026

(Volume 6 Nomor 1) dan Oktober 2026 (Volume 6 Nomor 2). Hingga triwulan II tahun 2026 telah terpublikasi sebanyak 10 (sepuluh) artikel untuk edisi April 2026. Terdapat 119 kandidat artikel dengan status sebagai berikut : sekitar 94 kandidat artikel pada tahapan submission dan 25 artikel telah masuk tahapan review. Kandidat artikel ini kemudian akan dilakukan penelaahan lebih lanjut oleh Dewan Editorial PJK dipersiapkan untuk diterbitkan pada edisi Oktober 2026.

- Jurnal Ilmiah Bhinneka Tunggal Ika: Pancasila Jurnal Internasional Berbahasa Indonesia;

Pengelolaan Jurnal Ilmiah Bhinneka Tunggal Ika: Pancasila Jurnal Internasional Berbahasa Indonesia, pada tahun 2026 melaksanakan dua kali penerbitan, yaitu pada periode Mei 2026 (Volume 3 Nomor 1) dan November 2026 (Volume 3 Nomor 2). Hingga triwulan II tahun 2026 telah dipublikasikan 6 (enam) artikel untuk edisi Mei 2026. Sedangkan untuk edisi November masih berlangsung penghimpunan artikel melalui mekanisme *Call For Paper*, terdata sebanyak 22 kandidat artikel pada tahap submission yang memerlukan proses penelaahan lebih lanjut.

- b) Penyerapan pandangan dan pengelolaan aspirasi masyarakat melalui pelaksanaan pengumpulan data dan diseminasi hasil kajian

Pada Triwulan II telah dilaksanakan proses penyerapan pandangan dan pengelolaan aspirasi masyarakat dalam rangka mendukung dua program utama yaitu:

- Penyerapan pandangan dalam rangka pengumpulan data kajian kebijakan Strategis Pembinaan Ideologi Pancasila Bidang Ekologi yang dilaksanakan di 2 (dua) tempat yaitu Universitas Budi Luhur dan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Proses pengumpulan data tersebut bertujuan untuk memetakan berbagai akar masalah dan tantangan pengelolaan lingkungan yang cenderung eksploitatif. Dalam hal ini, hasil

pengumpulan data sekunder akan digunakan sebagai kerangka awal yang menjadi landasan pengambilan data primer.

- Diseminasi hasil kajian mengenai Naskah Sumber Arsip Dasar Negara yang dilakukan di 2 (dua) lokus yaitu: Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Proses penyerapan pandangan tersebut bertujuan untuk memetakan bagaimana pemahaman guru-guru terutama Guru Pancasila dan Sejarah terkait dengan temuan-temuan sejarah baru yang berkaitan dengan Sidang BPUPK dan PPKI. Kajian ini melibatkan sejumlah guru pada jenjang pendidikan menengah. Adapun hasil dari penyerapan pandangan tersebut adalah: *pre-test* dan *post-test* terkait dengan temuan-temuan sejarah baru. *pre-test* dan *post-test* yang dihasilkan dalam desiminasi ini digunakan sebagai fondasi kajian-kajian berikutnya terkait dengan implementasi Naskah Sumber Arsip Dasar Negara.

2) Penyusunan Kajian Kebijakan Strategis Pembinaan Ideologi Pancasila

Untuk menyelesaikan Rekomendasi Kajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila yang Ditindaklanjuti dilaksanakan kajian kebijakan strategis Pembinaan Ideologi Pancasila berupa dokumen Arah Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila, Garis Besar Haluan Ideologi Pancasila (GBHIP), dan Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila. Pada tahun 2026, pelaksanaan kegiatan masih berfokus pada penyempurnaan Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila baik bagi Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah Provinsi. Penyempurnaan ini meliputi proses pengesahan Rancangan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila, penyusunan Matriks Subkegiatan Peta Jalan PIP pada Pemerintah Daerah Provinsi dan penyusunan rekomendasi sistem pengorganisasian, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian (korsindal) Peta Jalan PIP Pemerintah Daerah Provinsi. Oleh karena itu, akan dilaksanakan

beberapa tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Menghimpun Data Matriks Peta Jalan PIP Pemerintah Daerah Provinsi Tahun 2026-2029;
2. Menyampaikan Usulan Final Rancangan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk dilakukan proses harmonisasi bersama K/L terkait;
3. Menyusun rekomendasi sistem pengorganisasian, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian (korsindal) Peta Jalan PIP pemerintah daerah provinsi;
4. Menyampaikan Rekomendasi Kebijakan kepada pimpinan

Berdasarkan tahapan tersebut, penghitungan capaian kinerja penyusunan rekomendasi kebijakan strategis Pembinaan Ideologi Pancasila hingga Triwulan II 2026 adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{tahapan tahun 2026}}{(1 \text{ dokumen} \times 4 \text{ tahapan penyusunan})} \times 100\% = \frac{2}{4 \text{ tahapan penyusunan}} \times 100\% = 50\%$$

Pada triwulan II, penyusunan rekomendasi kebijakan strategis Pembinaan Ideologi Pancasila masuk pada tahap ke-2, Menyampaikan Usulan Final Rancangan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila kepada Biro Hukum dan Organisasi BPIP untuk dilakukan proses persetujuan lebih lanjut kepada unsur pimpinan BPIP agar selanjutnya dapat dikirim kepada Kementerian Hukum untuk proses pembahasan bersama K/L terkait. Usulan Final Rancangan Peraturan Presiden Tentang Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila tersebut telah melalui pembahasan bersama:

1. Kementerian Hukum Republik Indonesia;
2. Direktorat Ideologi, Kebangsaan, Politik, dan Demokrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas);
3. Biro Hukum dan Organisasi BPIP

Pada tahap ini, Kementerian Hukum sebagai pemrakarsa diminta untuk dapat segera melakukan proses penetapan

Rancangan Peraturan Presiden Tentang Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam kurun waktu satu tahun sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2025 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2026.

Selanjutnya Direktorat Pengkajian Kebijakan PIP akan melakukan penyusunan dan pembahasan rekomendasi sistem pengorganisasian, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian (korsindal) Peta Jalan PIP pemerintah daerah provinsi. Dalam Rancangan Sistem Pengorganisasian Peta Jalan PIP didalamnya tidak hanya menggambarkan struktur, kedudukan, serta peran masing-masing unit lintas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi, tetapi juga alur proses bisnis yang akan dilakukan didalamnya. Rancangan tersebut akan dimintakan masukan dan penyempurnaan kepada Kementerian PPN/Bappenas, Direktorat Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Politik Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Pemerintah Provinsi yang memiliki peran strategis pada pelaksanaan Peta Jalan PIP. Kegiatan ini secara simultan akan dilaksanakan pada triwulan III dengan melibatkan 14 Provinsi di Indonesia sebagai sampling pelaksanaan kajian.

- 3) Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila
 1. Penyusunan Naskah Sumber Arsip Dasar Negara Volume III: Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia

Guna Penguatan argumentasi dan penyamaan persepsi dalam pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila khususnya yang berkaitan dengan narasi mengenai sejarah kelahiran, perumusan, hingga pengesahan Pancasila menjadi fondasi dalam pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila, maka perlu merujuk pada naskah-naskah autentik.

Berkenaan dengan urgensi tersebut, sebagai tindak lanjut dari penyusunan rangkaian Naskah Sumber Arsip Dasar Negara

yang dua volume sebelumnya telah diselesaikan pada tahun 2024 dan 2025 (Naskah Sumber Arsip Dasar Negara I: Masa Sidang Pertama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan (BPUPK) 29 Mei s.d. 1 Juni 1945; Naskah Sumber Arsip Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK)-Masa Reses dan Sidang Kedua BPUPK 10 s.d. 17 Juli 1945), pada tahun 2026, akan melanjutkan penyusunan volume ketiga yaitu Naskah Sumber Arsip Dasar Negara III: Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)-Masa Sidang 18 s.d. 22 Agustus 1945. Adapun pada Penyusunan Naskah Sumber Arsip Dasar Negara III: Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)-Masa Sidang 18 s.d. 22 Agustus 1945, dilakukan dalam beberapa tahap penyusunan, yakni:

1. Identifikasi dan Validasi Arsip
2. Gelar Naskah dan Ekspose
3. Penyusunan Rekomendasi
4. Akseptasi

Pada periode triwulan II tahun 2026, penyusunan Penyusunan Naskah Sumber Arsip Dasar Negara III: Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)-Masa Sidang 18 s.d. 22 Agustus 1945 telah melalui salah satu dari tahap kedua, yaitu Gelar Naskah melalui kegiatan Pembacaan Bersama Naskah Sumber Arsip Dasar Negara III: Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia Bersama Sejarawan pada 15 s.d 17 April 2026. Kegiatan tersebut melibatkan para sejarawan untuk menjaring masukan dan penguatan terhadap rancangan narasi arsip yang menjadi bagian dari penyusunan Naskah Sumber Arsip Dasar Negara III berdasarkan arsip-arsip autentik yang telah diidentifikasi maupun berdasarkan sumber sekunder.

Pada periode Triwulan selanjutnya, Penyusunan Naskah Sumber Arsip Dasar Negara III: Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)-Masa Sidang 18 s.d. 22 Agustus 1945 akan melaksanakan agenda lanjutan dari Gelar Naskah dan

Ekspose. Tahapan ini akan kembali melibatkan para ahli dan sejarawan untuk penyempurnaan tahap akhir dari Naskah Sumber Arsip Dasar Negara III.

2. Penyusunan Rekomendasi atas Hasil Kajian Kebijakan Strategis Pembinaan Ideologi Pancasila Bidang Ekologi

Krisis lingkungan hidup di Indonesia menunjukkan bahwa persoalan ekologi tidak semata bersifat teknis, melainkan berkaitan erat dengan cara pandang dalam memaknai relasi antara manusia, alam, dan negara. Dalam praktik pembangunan, pengelolaan sumber daya alam masih cenderung berorientasi pada eksploitasi ekonomi, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai ideologis yang hidup dalam Pancasila.

Sebagai ideologi negara, Pancasila memuat pandangan dasar mengenai hubungan harmonis antara manusia, masyarakat, dan lingkungan sebagai satu kesatuan ruang hidup. Oleh karena itu, penguatan ideologi Pancasila menjadi penting untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan, khususnya di bidang ekologi, berjalan selaras dengan prinsip keberlanjutan, keadilan sosial, dan tanggung jawab antargenerasi.

Sejalan dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional serta arah kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila, Direktorat Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila akan menyusun kajian kebijakan strategis yang menempatkan Pancasila sebagai landasan operasional dalam berbagai sektor pembangunan, termasuk pengelolaan lingkungan hidup. Penyusunan kajian ini juga merupakan bagian dari pemenuhan indikator kinerja kegiatan berupa rekomendasi hasil kajian kebijakan strategis dalam rangka penyusunan dan penguatan peta jalan PIP. Adapun kajian tersebut akan dilaksanakan melalui 5 (lima) tahapan, yaitu:

1. Penyusunan Rencana Kerja
2. Pengumpulan Data Kajian

3. Analisis dan Simpulan Data
4. Penyusunan Rekomendasi
5. Diseminasi Rekomendasi

Pada periode Triwulan II Tahun 2026, Penyusunan Rekomendasi atas Hasil Kajian Kebijakan Strategis Pembinaan Ideologi Pancasila Bidang Ekologi telah sampai pada tahap kedua yaitu pengumpulan data kajian. Data kajian yang dimaksud terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu data primer dan data sekunder. Pada periode Triwulan II Tahun 2026, Direktorat Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila telah melaksanakan 2 (dua) kali pengambilan data sekunder dengan melibatkan berbagai pakar lingkungan, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat untuk menjangkau masukan dan sekaligus memotret dasar permasalahan eksploitasi lingkungan. Pengambilan data sekunder tersebut dikemas melalui kegiatan diskusi dengan tema:

1. Pembahasan Isu Bencana Ekologi: Mengkritisi Realita dan Wacana: Bencana Alam dan/atau Bencana Antroposen yang dilaksanakan pada 29 April 2026 di Universitas Budi Luhur, Jakarta;
2. Pembahasan Budaya Eksploitasi Ekologi-Lingkungan: “Dari Budaya Adaptasi dan Konservasi menuju Budaya Eksploitasi dan Komersialisasi” yang dilaksanakan pada 11 Juni 2026 di Universitas UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Berdasarkan tahapan yang telah dilakukan, maka perhitungan capaian kinerja Penyusunan Rekomendasi atas Hasil Kajian Kebijakan Strategis Pembinaan Ideologi Pancasila Bidang Ekologi pada Triwulan II 2026 adalah sebesar:

$$\frac{\text{tahapan tahun 2026}}{(1 \text{ dokumen} \times 5 \text{ tahapan penyusunan})} \times 100\% = \frac{2}{5 \text{ tahapan penyusunan}} \times 100\% = 40\%$$

Pada Triwulan II, Penyusunan Rekomendasi atas Hasil Kajian Kebijakan Strategis Pembinaan Ideologi Pancasila Bidang Ekologi masih dalam tahap 2 (dua), yaitu berupa Pengumpulan Data Kajian.

Maka dengan demikian telah dilaksanakan 2 dari 5 tahapan keseluruhan, sehingga dapat dihitung capaian kinerja yang dicapai terkait Penyusunan Rekomendasi atas Hasil Kajian Kebijakan Strategis Pembinaan Ideologi Pancasila Bidang Ekologi adalah sebesar 40%.

Adapun rencana tindak lanjut pada Triwulan III adalah pengambilan data primer dengan melibatkan berbagai praktik baik pengelolaan lingkungan dengan menyasar dan melibatkan masyarakat adat secara langsung. Selanjutnya, pada periode Triwulan III akan dilaksanakan tahap analisis dan simpulan data serta mulai menyusun rekomendasi kebijakan.

Aktivitas dan foto dokumentasi dalam rangka capaian kinerja Terlaksananya Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila pada Triwulan II Tahun 2026 adalah:

Tabel 2. 24 Aktivitas Terlaksananya Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Publikasi Artikel Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Volume 6 Nomor 1, April 2026 dan Strategi Peningkatan Mutu Pasca Akreditasi (Bali, tanggal 30 Maret s.d. 2 April 2026)	
2.	Rapat Pembahasan Agenda Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila (Jakarta, tanggal 6 April 2026)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
3.	Pembacaan Bersama Naskah Sumber Arsip Dasar Negara III: Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia Bersama Sejarawan (Depok, 15 s.d. 17 April 2026)	
4.	Desiminasi Kajian Naskah Sumber Arsip Dasar Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Maukere, tanggal 19 s.d. 22 April 2026)	
5.	Pembahasan Bersama Naskah Rancangan Peraturan Presiden Tentang Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila. (Depok, tanggal 23 s.d. 25 April 2026)	
6.	Publikasi Artikel Ilmiah Bhinneka Tunggal Ika: Pancasila Jurnal Internasional Berbahasa Indonesia Volume 3 Nomor 1 Periode Mei 2026 (Jakarta, tanggal 27 April 2026)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
7.	Koordinasi Pelaksanaan Desk PIP dalam Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Tahun 2026 (Jakarta, tanggal 20 Februari 2026)	
8.	Finaslisasi <i>Outline</i> Metodologi dan Pembahasan Isu Bencana Ekologi (Tangerang, tanggal 28 s.d. 30 April 2026)	
9.	Pembahasan Narasi dalam Pembuatan Animasi Naskah Sumber Arsip Dasar Negara I Masa Reses dan Sidang Kedua Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) 10 s.d. 17 Juli 1945 (Jakarta, tanggal 7 Mei 2026)	
10.	Pembahasan Pelaporan Implementasi Peta Jalan PIP Pemerintah Daerah Provinsi dan Penyusunan Sistem Pengorganisasian Peta Jalan PIP Tingkat Nasional dan Daerah (Jakarta, tanggal 18 Mei 2026)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
11.	Penyusunan Proposal Kajian Sistem Pengorganisasian Korsindal Peta Jalan PIP Pemerintah Daerah Provinsi (Jakarta, tanggal 20 s.d. 22 Mei 2026)	
12.	Rapat Pembacaan Bersama Naskah Sumber Arsip Dasar Negara Vol. III (Jakarta, tanggal 4 Juni 2026)	
13.	Diseminasi Naskah Sumber Arsip Dasar Negara dan Pembahasan Budaya Eksploitasi Ekologi Lngkungam di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Yogyakarta, tanggal 9 s.d. 12 Juni 2026)	
14.	Penyerapan Pandangan dan Pembimbingan Tindak Lanjut Peringkat SINTA 2 Pancasila: Jurnal Keindonesiaan (Jambi, tanggal 23 s.d. 26 Juni 2026)	

C.2. Persentase Rekomendasi Hasil Pengkajian Materi yang Dimanfaatkan

Indikator Keberhasilan:

Target Persentase rekomendasi hasil pengkajian materi yang dimanfaatkan pada Tahun 2026 adalah 100%.

Pada Triwulan II Tahun 2026 capaian target tersebut adalah sebesar 50% (rata-rata persentase capaian *output*) dengan uraian capaian sebagai berikut:

$$\frac{\text{capaian tahapan rekomendasi}}{2 \text{ rekomendasi kebijakan}} = \frac{(50\% + 50\%)}{2 \text{ rekomendasi kebijakan}}$$
$$= \frac{100\%}{2 \text{ rekomendasi kebijakan}} = 50\%$$

Capaian IKU sasaran program tersebut didukung oleh sasaran kegiatan: Terlaksananya Pengkajian Standardisasi Materi Pembinaan Ideologi Pancasila.

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan hingga Pada Triwulan II Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 25 Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya Pengkajian Standardisasi Materi Pembinaan Ideologi Pancasila

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Persentase rekomendasi kajian standardisasi materi pembinaan ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti	Jumlah Rekomendasi Standardisasi Materi Pembinaan Ideologi Pancasila yang diselesaikan	2	50%	50% (Rekomendasi)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan capaian yang telah diperoleh pada Triwulan II Tahun 2026 yaitu:

Dalam pelaksanaan kegiatan Terlaksananya Pengkajian

Standardisasi Materi Pembinaan Ideologi Pancasila diukur dengan indikator kinerja kegiatan (IKK) Persentase rekomendasi kajian standardisasi materi pembinaan ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti dengan target 100%, dengan rincian *output* yaitu dua (2) Rekomendasi yaitu 1. Rekomendasi Hasil Kajian Materi PIP bagi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang diselesaikan dan 2. Rekomendasi Hasil Kajian Materi PIP Pedoman Pancasila jenjang Perguruan Tinggi yang dimanfaatkan. Capaian kinerja pada Triwulan II Tahun 2026 adalah sebesar 50%, dengan rincian perhitungan:

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{capaian tahapan rekomendasi}}{2 \text{ rekomendasi kebijakan}} \\ &= \frac{(50\%+50\%)}{2 \text{ rekomendasi kebijakan}} \\ &= \frac{100\%}{2 \text{ rekomendasi kebijakan}} = 50\% \end{aligned}$$

Rincian dari 2 Rekomendasi diatas adalah sebagai berikut:

1. Rekomendasi Kajian Materi PIP bagi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang diselesaikan

Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa merupakan landasan utama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, seluruh organisasi kemasyarakatan (ormas) wajib berasaskan Pancasila. Dalam hal ini, BPIP memiliki mandat untuk melaksanakan pengkajian, penyusunan kebijakan, koordinasi, dan sinkronisasi pembinaan ideologi Pancasila secara nasional.

Organisasi kemasyarakatan memiliki peran strategis sebagai mitra negara dalam memperkuat kohesi sosial, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta menginternalisasikan nilai-nilai kebangsaan. Sejak masa perjuangan kemerdekaan hingga saat ini, ormas berkontribusi

dalam pembangunan sosial, pendidikan, demokrasi, dan kehidupan berbangsa. Namun, perkembangan ormas yang semakin beragam dari sisi ideologi, karakteristik, dan basis sosial menuntut pendekatan pembinaan yang lebih kontekstual, dialogis, dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing organisasi.

Di sisi lain, tantangan kontemporer seperti menguatnya politik identitas, disinformasi digital, penetrasi ideologi transnasional, dan polarisasi sosial mengharuskan pembinaan ideologi Pancasila dilakukan secara berbasis data (*evidence-based*). Meskipun secara normatif seluruh ormas telah berasaskan Pancasila, masih diperlukan kajian untuk mengetahui kesesuaian materi pembinaan yang ada dengan karakteristik, kebutuhan, serta dinamika ormas di lapangan sehingga dapat disusun materi pembinaan yang lebih operasional, adaptif, dan aplikatif.

Pelaksanaan Kajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Ormas menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa kebijakan pembinaan tidak bersifat administratif semata, tetapi memiliki landasan konseptual, regulatif, dan empiris yang kuat. Kajian ini memiliki urgensi dan relevansi sebagai berikut:

- 1) Urgensi Normatif, yaitu memastikan pelaksanaan amanat regulasi terkait Ormas dan pembinaan ideologi berjalan secara sistematis dan terukur.
- 2) Urgensi Akademik, yaitu membangun materi pembinaan berbasis kajian ilmiah, teori ideologi, dan studi tentang masyarakat sipil.
- 3) Urgensi Kebijakan, yaitu menghasilkan rekomendasi yang implementatif dan tidak tumpang tindih dengan kewenangan kementerian/lembaga lain.
- 4) Urgensi Sosial, yaitu memperkuat kohesi sosial dan

ketahanan ideologi melalui kemitraan konstruktif antara negara dan Ormas

Untuk mencapai tujuan tersebut, kajian ini disusun melalui tahapan yang sistematis, berjenjang, dan terintegrasi sejak awal hingga akhir proses. Berikut adalah tahapan pelaksanaan kajian yang disusun secara sistematis dari awal hingga akhir:

A. Kajian dan Penyusunan Naskah Urgensi Materi Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Ormas, meliputi tahapan:

- 1) Perencanaan dan Penajaman Metode Kajian: Penyusunan kerangka kerja, pendekatan metodologis, serta penajaman metode kajian materi PIP bagi Ormas;
- 2) Studi Literatur dan Analisis Kebijakan: Telaah regulasi, kebijakan, hasil penelitian, dan referensi akademik terkait PIP dan Ormas;
- 3) Penentuan lokus dan Argumentasi Kajian: Penetapan wilayah/lokus kajian beserta argumentasi strategis, sosiologis, dan ideologis;
- 4) Penyusunan Instrumen Kajian: Penyusunan daftar pertanyaan, kuesioner, serta penentuan narasumber dan responden;
- 5) Pengumpulan Data dan Informasi: Pelaksanaan rapat, *Focus Group Discussion* (FGD) dengan pakar dan K/L terkait, serta pengumpulan data pendukung;
- 6) Pelaksanaan Observasi Lapangan: Observasi pada locus yang telah ditentukan untuk memperoleh data empiris dan dinamika Ormas;
- 7) Penyusunan Draft Naskah Urgensi: Penyusunan draft awal naskah urgensi berdasarkan hasil kajian, observasi, dan analisis data;
- 8) Penyelesaian Laporan Observasi Lapangan:

Penyusunan dan konsolidasi laporan hasil observasi lapangan;

- 9) Validasi Internal dan Triangulasi Data: Verifikasi data, sinkronisasi hasil temuan, serta penguatan validitas substansi;
- 10) Penyempurnaan Substansi Naskah Kajian: Penyempurnaan materi dan integrasi hasil observasi sebagai substansi materi PIP bagi Ormas;
- 11) Penyiapan Bahasan Observasi sebagai Substansi Materi PIP: Penyelarasan hasil observasi lapangan menjadi bagian rekomendasi dan substansi materi PIP;
- 12) Finalisasi Naskah Kajian Urgensi: Penyempurnaan akhir, harmonisasi redaksional, dan finalisasi naskah Urgensi

B. Penyusunan Materi Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) bagi Ormas, dengan tahapan:

- 1) Perumusan dan Penyusunan Sistematika Materi PIP Ormas: Penyusunan kerangka, struktur, dan sistematika materi PIP bagi Ormas berdasarkan hasil kajian urgensi dan kebutuhan lokus;
- 2) Penulisan Materi melalui Rapat/FGD: Penyusunan substansi materi melalui rapat dan Focus Group Discussion (FGD) dengan pakar, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan terkait;
- 3) Validasi Internal: Verifikasi substansi, harmonisasi materi, serta penguatan kesesuaian materi dengan kebijakan dan kebutuhan Ormas;
- 4) Pelaksanaan Uji Publik Terbatas: Uji keterbacaan, uji relevansi, serta penghimpunan masukan dari peserta terbatas dan pemangku kepentingan;
- 5) Penyempurnaan Substansi Naskah Materi PIP: Penyempurnaan substansi berdasarkan hasil validasi internal dan uji publik terbatas; dan

- 6) Finalisasi Materi PIP bagi Ormas: Penyelarasan akhir, penyuntingan redaksional, dan finalisasi materi PIP bagi Ormas.

Secara keseluruhan terdapat 18 tahapan dari 2 bagian proses Penyusunan Materi Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Ormas. Direktorat Pengkajian Materi telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam bagian pertama tahapan (Kajian dan Penyusunan Naskah Urgensi Materi Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Ormas), antara lain: Koordinasi dan Pengumpulan data terkait Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan di Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selain itu pada tahap ini juga telah dilaksanakan Kegiatan Koordinasi dan Pengumpulan Data terkait Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan Di Pemerintah Provinsi Bali dalam Rangka Kajian Standardisasi Materi PIP bagi Ormas di Kabupaten Gianyar, Tabanan dan Badung Provinsi Bali.

Tahapan yang telah dilakukan hingga akhir Triwulan II ini telah sampai pada Validasi Internal dan Triangulasi Data: Verifikasi data, sinkronisasi hasil temuan, serta penguatan validitas substansi dan direncanakan di Triwulan III nanti akan dilaksanakan tahapan selanjutnya.

Rekomendasi Kajian Materi PIP bagi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang diselesaikan adalah sebesar:

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{capaian tahapan rekomendasi}}{18 \text{ Tahapan Penyusunan}} \\ &= \frac{9 \text{ Tahapan}}{18 \text{ Tahapan Penyusunan}} = 50\% \end{aligned}$$

2. Rekomendasi Hasil Kajian Materi PIP Pedoman Pancasila Jenjang Perguruan Tinggi

Pendidikan Pancasila merupakan instrumen strategis negara dalam membentuk arah berpikir, bersikap, dan bertindak mahasiswa sebagai warga negara. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi secara eksplisit menempatkan Pendidikan Pancasila sebagai Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK) di semua program studi. Ketentuan ini diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 yang menegaskan pentingnya penyusunan Pedoman Pembelajaran Pendidikan Pancasila sebagai acuan operasional di samping Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa tidak hanya diharapkan memahami Pancasila secara konseptual, tetapi juga mampu mengaktualisasikan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berkeadaban, adil, dan berkelanjutan

Namun pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain pendekatan pembelajaran yang cenderung normatif, materi yang kurang kontekstual dengan perkembangan zaman, kesenjangan kualitas antarperguruan tinggi, serta belum optimalnya integrasi dengan isu-isu strategis kontemporer. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penyusunan Pedoman Pembelajaran Pendidikan Pancasila pada Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagai acuan nasional yang mampu mendukung penyelenggaraan pembelajaran yang lebih berkualitas, kontekstual, dan transformatif. Penyusunan pedoman ini dilakukan secara bertahap, mulai dari penyusunan naskah urgensi, pengembangan kerangka dan sistematika, penyusunan draf pedoman, uji publik, hingga finalisasi dan implementasi secara nasional.

Adapun tahapan lengkap yang akan ditempuh hingga terwujudnya Pedoman Pembelajaran Pendidikan Pancasila adalah sebagai berikut:

- 1) Penyusunan dan Pembahasan Naskah Urgensi Penyusunan Pedoman Pembelajaran Pendidikan Pancasila pada Kurikulum Pendidikan Tinggi:
 - Penyusunan Draft Naskah Urgensi oleh Tim Internal;
 - Pembahasan Draft Naskah Urgensi bersama pakar dan akademisi;
 - Finalisasi Naskah Urgensi berdasarkan masukan dan hasil pembahasan
- 2) Penyusunan Kembali dan Penyesuaian Kerangka dan Sistematika Pedoman:
 - Pembentukan dan Penetapan Kembali Tim Penyusun Pedoman Pembelajaran Tahun 2026;
 - Penyusunan Draft Pedoman yang mencakup standar karakter lulusan, standar penilaian, serta standar monitoring dan evaluasi;
 - *Focus Group Discussion* (FGD) Tahap I bersama pakar dan dosen Pendidikan Pancasila.
- 3) Perancangan Penyusunan Draft Pedoman Pembelajaran Tahun 2026:
 - Pembentukan dan Penetapan Kembali Tim Penyusun Pedoman Pembelajaran Tahun 2026;
 - Penyusunan Draft Pedoman yang mencakup standar karakter lulusan, standar penilaian, serta standar monitoring dan evaluasi;
 - *Focus Group Discussion* (FGD) Tahap I bersama pakar dan dosen Pendidikan Pancasila.
- 4) Uji Publik dan Akseptasi Pedoman:
 - Uji kelayakan substansi oleh para pakar dan perwakilan perguruan tinggi;

- *Focus Group Discussion (FGD)* Tahap II bersama pemangku kepentingan pendidikan tinggi;
- Konsultasi publik dan Curah Pendapat dari berbagai pemangku kepentingan.
- Akseptasi Pedoman Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi.

5) Kajian Finalisasi dan Pengesahan Pedoman.

- Uji kelayakan substansi oleh para pakar dan perwakilan perguruan tinggi;
- *Focus Group Discussion (FGD)* Tahap II bersama pemangku kepentingan pendidikan tinggi;
- Konsultasi publik dan Curah Pendapat dari berbagai pemangku kepentingan.
- Akseptasi Pedoman Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi.

6) Diseminasi dan Implementasi Pedoman.

- Peluncuran dan diseminasi Pedoman Pembelajaran Pendidikan Pancasila secara nasional;
- Sosialisasi kepada perguruan tinggi dan dosen MKWK di seluruh Indonesia;
- Pemantauan dan evaluasi implementasi Pedoman secara berkala.

Tahapan yang telah dilakukan hingga akhir Triwulan II ini yaitu; Pembahasan Draf Naskah Urgensi Penyusunan Pedoman Pembelajaran Pendidikan Pancasila Pada Kurikulum Pendidikan Tinggi di Jakarta, Koordinasi Teknis terkait Sistematika dan Muatan Draf Pedoman Pembelajaran Pendidikan Pancasila pada Kurikulum Pendidikan Tinggi di Yogyakarta dan Rapat Rapat Perbaikan dan Pembahasan Draf Pedoman Pancasila Jenjang Perguruan Tinggi di Jakarta.

Tahapan yang telah dilakukan hingga akhir Triwulan II ini telah sampai pada tahap ketiga yaitu Penyusunan Draft

Pedoman Pembelajaran dan direncanakan di Triwulan III nanti akan dilaksanakan tahapan selanjutnya. Sehingga Capaian tersebut dapat dihitung yaitu:

$$= \frac{\text{capaian tahapan rekomendasi}}{6 \text{ Tahapan Penyusunan}}$$

$$= \frac{3 \text{ Tahapan}}{6 \text{ Tahapan Penyusunan}} = 50\%$$

Aktivitas dan foto dokumentasi dalam rangka capaian kinerja Terlaksananya Pengkajian Standardisasi Materi Pembinaan Ideologi Pancasila pada Triwulan II Tahun 2026 adalah:

Tabel 2. 26 Aktivitas Terlaksananya Pengkajian Standardisasi Materi Pembinaan Ideologi Pancasila

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Koordinasi dan Pengumpulan data terkait Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan di Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. (Lombok, tanggal 8 April 2026)	
2.	Rapat Audiensi Temu Wicara Terkait Penguatan Pancasila Dengan Guru dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, (Jakarta, tanggal 22 April 2026)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
3.	Rapat Penguatan Materi Draf Naskah Kajian Buku Referensi Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi (Jakarta, tanggal 27 April 2026)	
4.	Rapat Penyempurnaan Instrumen Pengkajian dan Uji Materi Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Pancasila Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah (Jakarta, tanggal 29 April 2026)	
5.	Uji Coba Instrumen Pemahaman Materi dan Pembelajaran dalam Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Pancasila Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah (Yogyakarta, tanggal 6 s.d. 9 Mei 2026)	
6.	Pembahasan Draf Naskah Urgensi Penyusunan Pedoman Pembelajaran Pendidikan Pancasila pada Kurikulum Pendidikan Tinggi (Jakarta, tanggal 12 s.d. 13 Mei 2026)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
7.	Rapat Rekapitulasi Hasil Wawancara Instrumen Keterbacaan dan Pemahaman Materi BTU Pendidikan Pancasila jenjang SD dan SMP di Kabupaten Sleman (Jakarta, tanggal 21 Mei 2026)	
8.	Rapat Pembahasan Tindak lanjut Kajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Ormas (Organisasi Kemasyarakatan) (Jakarta, tanggal 26 Mei 2026)	
9.	Kegiatan Koordinasi dan Pengumpulan Data terkait Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan di Pemerintah Provinsi Bali dalam Rangka Kajian Standardisasi Materi PIP bagi Ormas (Organisasi Kemasyarakatan) (Bali, tanggal 3 s.d. 6 Juni 2026)	
10.	Koordinasi Teknis terkait Sistematika dan Muatan Draf Pedoman Pembelajaran Pendidikan Pancasila pada Kurikulum Pendidikan Tinggi. (Yogyakarta, tanggal 7 s.d. 9 Juni 2026)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
11.	Kegiatan Pembahasan Sistematika dan Muatan Draf Pedoman Pembelajaran Pendidikan Pancasila pada Kurikulum Pendidikan Tinggi (Jakarta, tanggal 12 Juni 2026)	
12.	Rapat Perbaikan Draf Pedoman Pancasila Jenjang Perguruan Tinggi (Jakarta, tanggal 15 Juni 2026)	
13.	Pembahasan Draf Pedoman Pancasila Jenjang Perguruan Tinggi (Jakarta, tanggal 17 Juni 2026)	
14.	Kegiatan Pengumpulan Data Uji Pemahaman Materi dan Pembelajaran dalam Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Pancasila Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah (Maluku Utara, tanggal 23 s.d. 27 Juni 2026)	

C.3. Persentase Rekomendasi Kajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila yang Ditindaklanjuti

Indikator Keberhasilan:

Target Persentase rekomendasi hasil pengkajian implementasi yang dimanfaatkan pada Tahun 2026 adalah 100%.

Pada Triwulan II Tahun 2026 capaian target tersebut adalah sebesar 47,61% (rata-rata persentase capaian *output*) dengan uraian capaian sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan}}{\text{Jumlah seluruh tahapan kegiatan yang direncanakan}} \times 100\% = \frac{30}{63} \times 100\% = 47,61\%$$

Capaian IKU sasaran program tersebut didukung oleh sasaran kegiatan: Terlaksananya pengkajian implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila.

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan hingga Pada Triwulan II Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 27 Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya pengkajian implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Persentase rekomendasi kajian implementasi PIP yang ditindaklanjuti	Jumlah Rekomendasi Hasil Kajian Implementasi PIP yang diselesaikan	3	47,61%	47,61% (Rekomendasi)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan capaian yang telah diperoleh pada Triwulan II Tahun 2026 yaitu:

Dalam pelaksanaan kegiatan Terlaksananya pengkajian implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila diukur dengan indikator kinerja kegiatan (IKK) persentase Persentase Rekomendasi Kajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila yang Ditindaklanjuti target tahun 2026 adalah 100%, dengan rincian *output* yaitu tiga (3) Rekomendasi Hasil Kajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila

yang diselesaikan Hingga Triwulan II, pelaksanaan kajian telah mencapai beberapa tahapan, yang menunjukkan progres awal dalam mendukung penyusunan rekomendasi kebijakan pada triwulan berikutnya. Capaian kinerja pada Triwulan II Tahun 2026 adalah sebesar 47,61%, diukur berdasarkan tingkat ketercapaian tahapan kegiatan kajian yang telah direncanakan dalam satu siklus penyusunan dokumen kajian. Tahapan tersebut terdiri dari 7 (tujuh) langkah utama, yaitu:

1. Perencanaan Kajian, meliputi studi literatur, identifikasi permasalahan, penentuan metodologi, penetapan lokus kajian, pemetaan pemangku kepentingan, serta penyusunan instrumen kajian.
2. Pelaksanaan Kajian, melalui pengumpulan data primer dan sekunder dengan metode observasi lapangan, Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT), wawancara mendalam, dialog, dan penyebaran kuesioner.
3. Analisis dan Pengolahan Data, dilakukan melalui proses interpretasi data, identifikasi temuan utama, pola dan tren, serta penguatan validitas melalui triangulasi.
4. Penyusunan Dokumen Kajian, berupa penyusunan laporan kajian secara sistematis yang dilengkapi dengan proses review internal dan/atau eksternal.
5. Akseptasi, yaitu proses validasi dan penerimaan hasil kajian oleh pemangku kepentingan guna memastikan keberterimaan dan utilisasi hasil kajian.
6. Penyusunan Naskah Rekomendasi, sebagai proses perumusan rekomendasi kebijakan berbasis hasil kajian yang disampaikan kepada pimpinan.
7. Diseminasi dan Tindak Lanjut, melalui penyampaian rekomendasi kepada pemangku kepentingan serta pengembangan model implementasi, kerja sama, dan lokus binaan.

Berdasarkan tahapan yang telah dilakukan, maka perhitungan capaian penyelesaian Rekomendasi Hasil Kajian Implementasi PIP pada Triwulan II Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

No.	Rekomendasi	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4	Tahap 5	Tahap 6	Tahap 7
A. Penyelesaian Kajian Sebelumnya								
1.	Kajian Implementasi PIP Bidang Demokrasi	✓	✓	✓	✓			
2.	Kajian Efektivitas Capaian Pembelajaran dalam Membentuk Karakter Siswa	✓	✓	✓	✓			
3.	Kajian Implementasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Perempuan	✓	✓	✓	✓			
4.	Kajian Implementasi Nilai-Nilai Kebangsaan, Nasionalisme, Kepemimpinan, dan Demokrasi Indonesia pada Sekolah Rakyat	✓	✓	✓	✓	✓		
B. Penguatan Sistem Pengkajian								
5.	Penyusunan Pedoman Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
C. Kajian Utama								
6.	Kajian Implementasi Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila	✓						
D. Kajian Antara								
7.	Kajian Implementasi PIP pada Duta Pancasila Paskibraka Indonesia	✓	✓					

8.	Kajian Implementasi PIP Bidang Pendidikan	✓	✓					
9.	Kajian Implementasi PIP pada Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	✓	✓					

$$= \frac{\text{capaian tahapan rekomendasi}}{63 \text{ Tahapan Penyusunan}}$$

$$= \frac{30 \text{ Tahapan}}{63 \text{ Tahapan Penyusunan}} = 47,61\%$$

Aktivitas dan foto dokumentasi dalam rangka capaian kinerja Terlaksananya pengkajian implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila pada Triwulan II Tahun 2026 adalah:

Tabel 2. 28 Aktivitas Terlaksananya Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	<i>Focus Group Discussion (FGD) Brainstorming</i> Pentingnya Capaian Pembelajaran dalam membentuk Pembiasaan, Sikap dan Karakter Peserta Didik di Provinsi DKI Jakarta (Jakarta, tanggal 1 April 2026)	
2.	Kegiatan Pendampingan Pemeriksaan Audit BPK atas Laporan Keuangan BPIP Tahun 2025 (Bandung, tanggal 1 s.d. 3 April 2026)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
3.	Konsinyering penyusunan modul Implementatif Nilai Kebangsaan pada Sekolah Rakyat, di Provinsi Jakarta (Jakarta, tanggal 6 s.d. 7 April 2026)	
4.	Penyamaan Presepsi Terhadap Identifikasi Nilai Ideologi Pancasila dan Pemahaman Terhadap Instrumen Kajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila (Depok, tanggal 29 April s.d. 1 Mei 2026)	
5.	Penyusunan Kerangka Konsep Kajian Identifikasi Nilai Ideologi Pancasila dan Kajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila. Dalam kegiatan ini akan dilaksanakan penyusunan bersama Instrumen Kajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Instrumen Identifikasi Nilai Ideologi Pancasila (Jakarta, tanggal 18 Mei 2026)	
6.	Penyusunan Sistematika Pedoman Pengkajian Identifikasi Nilai Ideologi Pancasila dan Kajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila di Jakarta (Jakarta, tanggal 21 Mei 2026)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
7.	Pembahasan Awal Draft Naskah Pedoman Kajian Identifikasi NIP dan Pengkajian Implementasi PIP (Jakarta, tanggal 25 Mei 2026)	
8.	Review Draf Awal Pedoman Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Instrumen Kajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila di Yogyakarta (Yogyakarta, tanggal 8 s.d. 11 Juni 2026)	
9.	Finalisasi Draf Pedoman Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Instrumen Kajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila (Jakarta, tanggal 23 Juni 2026)	
10.	Tindak lanjut Draf Pedoman Pengkajian Implementasi PIP dan Draft Kajian Implementasi PIP pada Purnapaskibraka Duta Pancasila (Jakarta, tanggal 24 Juni 2026)	

D. Terwujudnya pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila yang Komprehensif

Pengembangan kebijakan/regulasi merupakan salah satu prasyarat terwujudnya Sistem Nasional Pendidikan dan PIP yang terstruktur, sistemik, dan masif sehingga perlu dirumuskan pengaturan yang komprehensif. Program Teknis Perencanaan dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan PIP merupakan implementasi dari Kebijakan Strategis yang telah ditetapkan. Perumusan program teknis dilakukan untuk memastikan advokasi kebijakan strategis yang dilakukan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan yakni terwujudnya pembumih Pancasila sebagai dasar negara sehingga nilai-nilai Pancasila teraktualisasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan nasional, serta kehidupan bermasyarakat. Program teknis tersebut perlu dielaborasi dalam program jangka panjang Sistem Nasional Diklat PIP dalam rangka mendukung terwujudnya pembumih Pancasila bagi aparatur negara dan seluruh komponen bangsa menuju sumber daya manusia unggul pada saat Indonesia Emas Tahun 2045. Sedangkan program teknis jangka menengah, jangka pendek, serta tahunan dielaborasi secara komprehensif dan *cascading* dimana secara agregat mendukung pencapaian tujuan jangka panjang tersebut.

Sumber daya manusia Indonesia Emas tahun 2045 diharapkan mempunyai kecerdasan yang lebih unggul dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain untuk mendukung Indonesia sebagai pusat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peradaban dunia. Pembangunan SDM unggul tersebut perlu dilakukan secara paripurna, tidak hanya membangun kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi tetapi juga membangun iman dan taqwa serta budaya sehingga menjadi insan-insan pembangunan yang religius, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berbudaya luhur.

PIP bertujuan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam seluruh sektor kehidupan berbangsa dan bernegara, agar pelaksanaan PIP sesuai dengan standar kebijakan dan nilai-nilai Pancasila maka diperlukan pengendalian dan evaluasi dalam penyusunan kebijakan PIP, implementasi kebijakan PIP, aktualisasi nilai-nilai Pancasila di masyarakat. dan pencegahan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Ukuran keberhasilan Sasaran Program Terwujudnya pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila adalah:

Tabel 2. 29 Indikator Kinerja Program Terwujudnya pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila yang Komperhensif

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2026	REALISASI	KET
Persentase tenaga pengajar Pancasila yang tersertifikasi	100%	50%	 50%
Persentase lembaga penyelenggara diklat pembinaan ideologi Pancasila yang terakreditasi	100%	52,5%	 52,5%
Persentase peserta Diklat berkepribadian Pancasila dengan tingkat baik	100%	52,01%	 52,01%

Realisasi capaian kinerja program tersebut diperoleh dan dicapai sebagai berikut:

D.1. Persentase Tenaga Pengajar Pancasila yang Tersertifikasi

Indikator Keberhasilan:

Target Persentase tenaga pengajar Pancasila yang tersertifikasi pada Tahun 2026 adalah 100%.

Pada Triwulan II Tahun 2026 capaian target tersebut adalah sebesar 50% proses pelaksanaan berita acara hasil asesmen peserta Sertifikasi Pengajar Diklat PIP dari Tim Asesor dan sedang dalam tahap penelusuran rekam jejak oleh BIN. dengan uraian capaian sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan}}{\text{Jumlah seluruh tahapan kegiatan yang direncanakan}} \times 100\% = \frac{2,5}{5} \times 100\% = 50\%$$

Capaian IKU sasaran program tersebut didukung oleh sasaran kegiatan: Terlaksananya Sertifikasi Pengajar Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila.

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan hingga Pada Triwulan II Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 30 Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya Sertifikasi Pengajar Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Persentase Pengajar Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila yang Bersertifikat	Sertifikasi Pengajar Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila	164	50%	50% (orang)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan capaian yang telah diperoleh yaitu:

- Persentase Pengajar Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila yang Bersertifikat

Persentase Pengajar Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila yang Bersertifikat dengan rincian *output* Sertifikasi Pengajar Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila dari target 164 orang. Berdasarkan capaian kinerja pada Triwulan II Tahun 2026 dapat dilaporkan sudah tercapai 50% dimana saat ini sudah terlaksana dalam tahapan sudah dilaksanakannya berita acara hasil asesmen peserta Sertifikasi Pengajar Diklat PIP dari Tim Asesor dan sedang dalam proses penelusuran rekam jejak oleh BIN. Pelaksanaan Sertifikasi Pengajar Diklat PIP Tahun 2026 telah berjalan dengan melalui beberapa tahapan seleksi ketat sebagai berikut, yaitu:

- Proses pendaftaran sertifikasi terdapat 1.071 berkas masuk, 888

lolos verifikasi awal dan 81 berkas gugur. Setelah dilakukan verifikasi dan validasi kelengkapan, terpilih 807 berkas memenuhi syarat (572 Calon Maheswara dan 235 Calon Penceramah) untuk maju ke tahap asesmen.

2. Tim Asesor Sertifikasi telah melakukan asesmen terhadap 807 kandidat dan menetapkan 559 peserta lolos, dengan rincian 392 Maheswara dan 167 Penceramah untuk selanjutnya dilakukan penelusuran rekam jejak oleh BIN.
3. Pelaksanaan penelusuran rekam jejak oleh BIN serta perencanaan pelaksanaan pelatihan bagi Pengajar Diklat PIP akan dilakukan pada triwulan III.

Pedoman penilaian (*scoring*) capaian rincian *output* persentase pengajar Diklat PIP yang bersertifikat, yaitu:

$$\frac{\text{Jumlah tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan}}{(\text{Jumlah seluruh tahapan kegiatan yang direncanakan})} \times 100\% = \frac{2,5}{5} \times 100\% = 50\%$$

Score	Kriteria Score	Keterangan
0%	Belum dilaksanakan	Belum terlaksana
20%	Tahap 1: Terlaksananya verifikasi dan validasi data calon peserta Sertifikasi Pengajar Diklat PIP.	Terlaksana
40%	Tahap 2: Tersedianya berita acara hasil asesmen peserta Sertifikasi Pengajar Diklat PIP dari Tim Asesor.	Terlaksana
60%	Tahap 3: Tersedianya rekomendasi hasil penelusuran rekam Jejak calon peserta Sertifikasi Pengajar Diklat PIP dari BIN.	Dalam Proses
80%	Tahap 4: Terlaksananya Diklat Bagi Pengajar Diklat PIP dan/atau Penguatan Bagi Pengajar Diklat PIP kepada calon peserta Sertifikasi Pengajar Diklat PIP.	Belum terlaksana
100%	Tahap 5: Tersedianya 315 orang Pengajar Diklat PIP bersertifikat sertifikasi Pengajar Diklat PIP.	Belum terlaksana

Tabel 2. 31 Aktivitas Terlaksananya Sertifikasi Pengajar Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Verifikasi dan Validasi Dokumen Sertifikasi Calon Pengajar Diklat PIP Tahun 2026 (Tangerang Selatan, tanggal 22 s.d. 25 April 2026)	
2.	Pengembangan Sistem Aplikasi Sistem Sertifikasi Pengajar Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila (Jakarta, tanggal 4 mei 2026)	
3.	Pra Asesmen Calon Pengajar Diklat PIP Tahun 2026 (Bekasi, tanggal 3 s.d. 6 Juni 2026)	
4.	Asesmen Calon Pengajar Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2026 oleh Tim Asesor Sertifikasi Pengajar Diklat PIP (Jakarta, tanggal 29 Juni s.d. 2 Juli 2026)	

D.2. Persentase Lembaga Penyelenggaraan Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila yang Terakreditasi.

Indikator Keberhasilan:

Target Persentase Lembaga Penyelenggaraan Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila yang Terakreditasi Tahun 2026 adalah 100%.

Hingga Pada Triwulan II Tahun 2026 capaian target tersebut adalah sebesar 52,5% dengan uraian capaian (perhitungan) adalah sebagai berikut:

$$IKK = \frac{\left(a = \frac{\text{capaian kinerja}}{\text{target kinerja}} \times 100\%\right) + \left(b = \frac{\text{capaian kinerja}}{\text{target kinerja}} \times 100\%\right)}{2}$$
$$IKK = \frac{a + b}{2}$$
$$IKK = \frac{40\% + 65\%}{2} = 52,5\%$$

Keterangan :

IKK = persentase capaian indikator kinerja kegiatan

a = Persentase Penyelenggara Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila yang Terakreditasi

b = Persentase Standardisasi dan Kurikulum Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila yang dimanfaatkan

Capaian IKU sasaran program tersebut didukung oleh sasaran kegiatan:

- Terlaksananya Akreditasi Penyelenggara Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila
- Tersedianya Standardisasi dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pada Pada Triwulan II Tahun 2026 adalah:

Tabel 2. 32 Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Lembaga Penyelenggaraan Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila yang Terakreditasi

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Persentase Penyelenggara Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila yang Terakreditasi	Jumlah Lembaga Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila yang terakreditasi	10	40%	40% (Lembaga)
Persentase Standardisasi dan Kurikulum Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila yang dimanfaatkan	Jumlah NSPK Standardisasi dan Kurikulum Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila yang diselesaikan	7	5	65% (5 NSPK)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan capaian yang telah diperoleh pada Triwulan II Tahun 2026 yaitu:

1. Persentase Penyelenggara Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila yang Terakreditasi, pada tahun 2026 memiliki target sebanyak 10 Jumlah Lembaga Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila yang terakreditasi. Target kinerja sebanyak 10 lembaga penyelenggara Diklat PIP merupakan hasil analisis terhadap kementerian/lembaga/pemda tempat pengajar Diklat PIP yang bersertifikat bekerja. Capaian akreditasi penyelenggaraan Diklat PIP Triwulan II Tahun 2026 pada saat ini telah telah dilaksanakan bimbingan teknis dan penilaian mandiri oleh penyelenggara Diklat PIP kepada 9 lembaga. Selanjutnya akreditasi penyelenggara Diklat PIP akan dilaksanakan pada Triwulan III tahun 2026 dengan agenda rapat verifikasi dan penilaian data akreditasi penyelenggara pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila tahun 2026, dan visitasi akreditasi lembaga penyelenggara diklat periode I tahun 2026 oleh tim asesor. Pedoman penilaian (*scoring*) capaian rincian Penyelenggara Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila yang Terakreditasi, yaitu:

Nilai	Kriteria Penilaian	Keterangan
0%	Fisik: Belum dilaksanakan	Belum terlaksana
20%	Tahap 1 : Bimbingan Teknis Akreditasi Penyelenggara Diklat PIP bagi Calon Lembaga Penyelenggara Diklat PIP	Terlaksana
40%	Tahap 2 : DKT Penyampaian Data Calon Lembaga Penyelenggara Diklat PIP kepada Tim Asesor	Terlaksana
60%	Tahap 3 : Visitasi Calon Lembaga Penyelenggara Diklat PIP (pemeriksaan data dukung)	Belum terlaksana
70%	Tahap 4 : Berita Acara Hasil Penilaian Tim Asesor Akreditasi Penyelenggara Diklat PIP kepada Calon Penyelenggara Diklat PIP	Belum terlaksana
90%	Tahap 5 : Berita Acara Tim Penilai Akhir menyampaikan rekomendasi pemohon yang layak diberikan akreditasi dengan melampirkan hasil penilaian akhir akreditasi kepada Kepala BPIP melalui Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan BPIP	Belum terlaksana
100%	Tahap 6 : Kepala BPIP menetapkan status akreditasi bagi lembaga penyelenggara diklat untuk menyelenggarakan program Diklat PIP dan menerbitkan sertifikat akreditasi penyelenggara Diklat PIP	Belum terlaksana

2. Persentase Standardisasi dan Kurikulum Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila yang dimanfaatkan, yaitu:

Berdasarkan target kinerja sebanyak 7 NSPK, telah disusun sebanyak 5 (lima) dokumen NSPK, yaitu:

- Kurikulum Diklat PIP bagi Organisasi Perempuan;
- Kurikulum Diklat PIP bagi Anggota Organisasi Sosial dan Politik;
- Materi Umum dan Pengayaan Diklat PIP;
- Kurikulum Diklat PIP bagi Dosen; dan
- Kurikulum Diklat PIP bagi Anggota Koperasi dan UMKM.

Pada triwulan III tahun 2026 akan dilakukan penyusunan sebanyak 2

NSPK Diklat PIP dengan melibatkan akademisi, kementerian, lembaga, pemerintahan daerah, serta sasaran Diklat PIP. Pelibatan tersebut dilakukan untuk mendapatkan masukan yang membangun dalam menyusun NSPK Diklat PIP. Juknis yang disusun tersebut selanjutnya akan dimanfaatkan oleh Direktorat Pelaksanaan Diklat dalam pelaksanaan Diklat PIP. Petunjuk teknis tersebut memuat cara pelaksanaan Diklat PIP sesuai sasarannya yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penilaian, serta pemantauan dan evaluasi Diklat PIP. Untuk mengetahui bagaimana kebermanfaatan dokumen petunjuk teknis yang telah disusun, dalam beberapa kegiatan pelaksanaan Diklat, akan dimonitoring dan evaluasi menggunakan instrumen monitoring dan evaluasi yang merupakan lampiran dari Dokumen Petunjuk Teknis Diklat PIP. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut akan menjadi masukan dalam pelaksanaan Diklat PIP berikutnya.

Aktivitas dan kilas peristiwa dalam rangka capaian kinerja pada Triwulan II Tahun 2026 adalah:

Tabel 2. 33 Aktivitas Persentase Lembaga Penyelenggaraan Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila yang Terakreditasi

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri Akreditasi Penyelenggara Diklat PIP Tahun 2026 (Jakarta, tanggal 7 s.d. 10 April 2026)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
2.	Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi BUMN dan BUMD (Bekasi, tanggal 14 s.d. 17 April 2026)	
3.	Penyusunan Kurikulum Diklat PIP bagi Organisasi Kepemudaan dan Kemahasiswaan (Semarang, tanggal 17 s.d. 20 Juni 2026)	

D.3. Persentase Peserta Diklat Berkepribadian Pancasila Dengan Tingkat Baik

Indikator Keberhasilan:

Target Persentase peserta Diklat berkepribadian Pancasila dengan tingkat baik pada Tahun 2026 adalah 100%.

Hingga Pada Triwulan II Tahun 2026 capaian target tersebut adalah sebesar 52,01% dengan uraian capaian (perhitungan) adalah sebagai berikut:

$$IKK = \frac{\left(a = \frac{\text{capaian kinerja}}{\text{target kinerja}} \times 100\%\right) + \left(b = \frac{\text{capaian kinerja}}{\text{target kinerja}} \times 100\%\right)}{2}$$

$$IKK = \frac{a + b}{2}$$

$$IKK = \frac{75\% + 29,02\%}{2} = 52,01\%$$

Keterangan :

IKK: persentase capaian indikator kinerja kegiatan

a: Persentase Purnapaskibraka yang menjadi Duta Pancasila

b: Persentase peserta Diklat berkepribadian Pancasila

Capaian IKU sasaran program tersebut didukung oleh sasaran kegiatan:

- Terlaksananya pembinaan purnapaskibraka duta Pancasila
- Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pada Pada Triwulan II Tahun 2026 adalah:

Tabel 2. 34 Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya Pembinaan Purnapaskibraka Duta Pancasila

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Persentase Purnapaskibraka yang menjadi Duta Pancasila	Fasilitasi Pembinaan Purnapaskibraka Duta Pancasila	6.930	75%	75% (Orang)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan capaian yang telah diperoleh Triwulan II Tahun 2026 untuk tercapainya Purnapaskibraka yang menjadi Duta Pancasila, yaitu:

Purnapaskibraka Duta Pancasila merupakan bagian dari kaderisasi yang pembentukannya dilaksanakan secara berkelanjutan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Dalam rangka mendukung proses tersebut, Direktorat Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Purnapaskibraka Tahun 2025 pada tingkat provinsi serta kabupaten/kota. Pendidikan dan pelatihan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman, sikap, dan komitmen Purnapaskibraka terhadap nilai-nilai Pancasila. Purnapaskibraka yang dinyatakan lulus selanjutnya dijadwalkan untuk

mengikuti pelantikan oleh Kepala BPIP sebagai Purnapaskibraka Duta Pancasila.

Setelah dilantik, Purnapaskibraka Duta Pancasila kemudian bergabung dalam wadah Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI) sebagai bagian dari binaan BPIP. Melalui DPPI, Purnapaskibraka Duta Pancasila ikut mendukung pelaksanaan program Paskibraka, pembinaan Purnapaskibraka, serta berbagai kegiatan kepaskibrakaan di tingkat pusat dan daerah. Keberadaan DPPI juga membantu memperkuat koordinasi antara BPIP dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembinaan generasi muda. Oleh karena itu, pembentukan DPPI di daerah menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan program Paskibraka dan pembinaan nilai-nilai Pancasila. Sampai saat ini sudah ada 72 kabupaten/kota yang melakukan pembentukan DPPI.

Paskibraka menjalankan penugasan sebanyak dua kali, yaitu pada HUT RI 17 Agustus pada tahun berjalan dan Hari Lahir Pancasila 1 Juni pada tahun berikutnya. Setelah menjalankan penugasan pada Hari Lahir Pancasila, baru bisa disebut sebagai Purnapaskibraka. Purnapaskibraka ini selanjutnya akan mendapatkan pendidikan dan pelatihan pembinaan Ideologi Pancasila (Diklat PIP) dan lulus diklat. Purnapaskibraka yang lulus diklat baru bisa diangkat menjadi Purnapaskibraka Duta Pancasila (PDP). Diklat PIP untuk Purnapaskibraka dilaksanakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila melalui system *Learning Management System* (LMS). Tahapan yang harus dilalui seorang Paskibraka sebelum bisa menjadi seorang Purnapaskibraka adalah sebagai berikut:

- a. Tahap Pembentukan Paskibraka (Rekrutmen dan Seleksi)
- b. Tahap Pemusatan Calon Paskibraka
- c. Tahap Pelaksanaan Tugas Hari Kemerdekaan 17 Agustus
- d. Tahap Pemusatan Diklat Paskibraka untuk Hari Lahir Pancasila
- e. Tahap Pelaksanaan Tugas Hari Lahir Pancasila

- f. Purnapaskibraka
- g. Diklat PIP bagi Purnapaskibraka
- h. Purnapaskibraka Duta Pancasila

Saat ini, tahapan yang dijalani oleh Paskibraka tahun sebelumnya sudah sampai pada tahap g, yaitu telah selesai melaksanakan tugas hari Lahir Pancasila sehingga sudah disebut Purnapaskibraka. Purnapaskibraka tersebut sedang mengikuti Diklat PIP bagi Purnapaskibraka dan sudah lulus diklat sebanyak 254 orang. Saat ini proses diklat PIP bagi Purnapaskibraka masih sedang berlangsung untuk angkatan berikutnya. Jadi total Purnapaskibraka daerah yang sudah menjadi PDP adalah sebanyak 254 orang. Khusus untuk Purnapaskibraka Tingkat Pusat Tahun 2025, mereka sudah terlebih dahulu mendapatkan diklat PIP saat pemusatan pembinaan dalam rangka pelaksanaan tugas pada Hari Lahir Pancasila. Mereka juga sudah dinyatakan lulus diklat dan langsung dilantik pada tanggal 1 Juni 2026 setelah selesai bertugas di Gedung Pancasila. Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila yang sudah dihasilkan oleh BPIP tahun 2026 berjumlah 76 orang.

$$\frac{\text{Jumlah tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan}}{(\text{Jumlah seluruh tahapan kegiatan yang direncanakan})} \times 100\% = \frac{6}{8} \times 100\% = 75\%$$

Aktivitas dan kilas peristiwa dalam rangka capaian kinerja pada Triwulan II Tahun 2026 adalah:

Tabel 2. 35 Aktivitas Kegiatan Terlaksananya Pembinaan Purnapaskibraka Duta Pancasila

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Sosialisasi Seleksi Kesehatan Paskibraka Tahun 2026 Tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi (Tangerang, tanggal 6 s.d. 9 April 2026)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
2.	Rapat Koordinasi Panitia Pelaksana Pembentukan Paskibraka Tingkat Pusat tahun 2026 (Jakarta, tanggal 22 s.d. 24 April 2026)	
3.	Koordinasi Pembentukan Paskibraka Tahun 2026 di Kabupaten Lampung Barat (Jakarta, tanggal 27 April 2026)	
4.	Rapat Pembentukan Paskibraka Tahun 2026 Kabupaten Muara Enim (Jakarta, tanggal 26 Januari 2026)	
5.	Monitoring Pelaksanaan Seleksi Paskibraka Tingkat Provinsi di 38 Provinsi di Indonesia (38 Provinsi, tanggal 27 April s.d. 10 Juni 2026)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
6.	Pelaksanaan Uji Coba Pembinaan Terhadap Aktivitas Kepaskibrakaan (Jakarta, tanggal 15 s.d. 16 Mei 2026)	
7.	Rapat Koordinasi Persiapan Monitoring Seleksi Paskibraka Tingkat Provinsi Di Papua, Maluku Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, dan Papua Barat (Jakarta, tanggal 18 Mei 2026)	
8.	Pembinaan dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) dalam Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 (Jakarta, tanggal 22 Mei s.d. 3 Juni 2026)	
9.	Rapat Penyusunan Pedoman Pembelajaran Berbasis Pengalaman untuk Pemusatan Diklat Paskibraka (Jakarta, tanggal 9 s.d. 11 Februari 2026)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
10.	Penyusunan dan Pembahasan Petunjuk Teknis (Juknis) Verifikasi (Jakarta, tanggal 8 Juni 2026)	
11.	Harmonisasi Petunjuk Teknis Verifikasi Tingkat Pusat Paskibraka dan Audiensi Pembentukan Paskibraka Tahun 2026 Provinsi Kalimantan Selatan (Jakarta, tanggal 11 Juni 2026)	
12.	Seleksi Personil Pendukung Pelaksanaan Tugas Paskibraka Tahun 2026 (Jakarta, tanggal 8 s.d. 12 Juni 2026)	
13.	Verifikasi Calon Paskibraka Tingkat Pusat Tahun 2026 (Jakarta, tanggal 14 s.d. 21 Juni 2026)	

Tabel 2. 36 Indikator Kinerja Kegiatan Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Persentase peserta Diklat berkepribadian Pancasila	Jumlah Peserta yang telah mengikuti Diklat PIP	3.166	919	29,02% (919 Orang)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan capaian yang telah diperoleh Triwulan II Tahun 2026 yaitu:

1. Persentase peserta Diklat berkepribadian Pancasila, yaitu:

Berdasarkan pengukuran hasil capaian IKK pada Triwulan II Tahun 2026 untuk Persentase peserta Diklat berkepribadian Pancasila sebesar 919 orang dari target RO 3.166 orang peserta sebesar 29,02%.

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Jumlah Peserta yang telah mengikuti Diklat PIP}}{\text{Target Peserta yang telah mengikuti Diklat PIP}} \times 100$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{919 \text{ orang}}{3.166 \text{ orang}} \times 100\% = 29,02\%$$

Berikut adalah rincian Peserta yang telah mengikut diklat PIP:

Tabel 2. 37 Peserta Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila

Kegiatan	Jumlah peserta
Diklat PIP bagi Dosen Pancasila Angkatan IV	177
Diklat PIP bagi Dosen Pancasila Angkatan V	189
Diklat PIP bagi ASN BPSDM Jawa Timur	60
Diklat PIP bagi ASN di Lingkungan Kemendikdasmen	44
Diklat PIP bagi Purnapaskibraka Angkatan I	126
Diklat PIP bagi Purnapaskibraka Angkatan II	128
Diklat PIP bagi Purnapaskibraka Pusat angkatan 2025	76
Diklat PIP bagi ASN Kualifikasi Pratama Pemerintah Prov. Jawa Barat	39
Diklat PIP bagi ASN Kualifikasi Pratama Pemerintah Prov. Sumbar	81
Total	919

Capaian IKK tersebut didukung oleh tersedianya petunjuk teknis pelaksanaan Diklat PIP, kurikulum dan modul, pengajar diklat (Maheswara), dan 19 lembaga penyelenggara Diklat PIP terakreditasi.

Aktivitas dan kilas peristiwa dalam rangka capaian kinerja pada Triwulan II Tahun 2026 adalah:

Tabel 2. 38 Aktivitas Kegiatan Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Diklat PIP bagi ASN Kualifikasi Pratama di Lingkungan BPSPDM Provinsi Jawa Timur (Surabaya, tanggal 6 s.d. 9 April 2026)	
2.	Pendidikan dan Pelatihan PIP bagi Purnapaskibraka Angkatan I (Jakarta, tanggal 14 s.d. 17 April 2026)	
3.	Pendidikan dan Pelatihan PIP bagi Purnapaskibraka Angkatan II (Jakarta, tanggal 20 s.d. 23 April 2026)	
4.	Pendidikan dan Pelatihan PIP bagi Purnapaskibraka Pusat Angkatan 2025 (Jakarta, tanggal 18 s.d. 21 Mei 2026)	

E. Terwujudnya Pengukuran dan Evaluasi Pembinaan Ideologi Pancasila yang Efektif

PIP bertujuan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam seluruh sektor kehidupan berbangsa dan bernegara, agar pelaksanaan PIP sesuai dengan standar kebijakan dan nilai-nilai Pancasila maka diperlukan pengendalian dan evaluasi dalam penyusunan kebijakan PIP, implementasi kebijakan PIP, aktualisasi nilai-nilai Pancasila di masyarakat. dan pencegahan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Ukuran keberhasilan Sasaran Program Terwujudnya pengukuran dan evaluasi pembinaan ideologi Pancasila yang efektif adalah:

Tabel 2. 39 Indikator Kinerja Program Terwujudnya Pengukuran dan Evaluasi Pembinaan Ideologi Pancasila yang Efektif

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	REALISASI	KINERJA
Persentase rekomendasi hasil pengendalian pembinaan ideologi Pancasila yang dimanfaatkan	100%	57,3%	 57,3%
Persentase rekomendasi hasil evaluasi pembinaan ideologi Pancasila yang dimanfaatkan	100%	45,83%	 45,83%
Persentase rekomendasi hasil pengukuran Pelembagaan Pancasila yang dimanfaatkan	100%	50%	 50%
Persentase rekomendasi hasil pengukuran aktualisasi Pancasila yang ditindaklanjuti	50%	83%	 83%

Realisasi capaian kinerja program tersebut diperoleh dan dicapai sebagai berikut:

E.1. Persentase Rekomendasi Hasil Pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila yang Dimanfaatkan

Indikator Keberhasilan:

Target Persentase rekomendasi hasil pengendalian pembinaan ideologi Pancasila yang dimanfaatkan pada Tahun 2026 adalah 100%.

Pada Triwulan II Tahun 2026 capaian target tersebut adalah sebesar 57,3% (rata-rata hasil capaian *output*).

Capaian IKU Sasaran Program tersebut didukung oleh kegiatan Terlaksananya Pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila :

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pada Triwulan II Tahun 2026 adalah:

Tabel 2. 40 Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya Pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN <i>OUTPUT</i> (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Persentase Rekomendasi hasil Pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti	Jumlah Rekomendasi Hasil Pengendalian Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila yang diselesaikan	2	57,3%	57,3% (Rekomendasi Kebijakan)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan capaian yang telah diperoleh pada Triwulan II Tahun 2026 yaitu:

a. Persentase Rekomendasi hasil Pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti

Untuk mencapai dan menyelesaikan 2 Rekomendasi Hasil Pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila (100%) dibutuhkan 1 dokumen pedoman pengendalian pelaksanaan PIP (20%), 30 dokumen laporan pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila internal (40%), dan 2 dokumen laporan pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila eksternal (40%).

Dalam pelaksanaan kegiatan pada Triwulan II Tahun 2026, telah tercapai:

1. Terlaksana pengendalian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila untuk memastikan program pembinaan ideologi Pancasila dilaksanakan selaras dengan arah kebijakan, garis besar haluan ideologi Pancasila, dan peta jalan pembinaan ideologi Pancasila pada internal di Lingkungan Badan

Pembinaan Ideologi Pancasila 13 (tiga belas) dokumen, dan pengendalian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila untuk memastikan program pembinaan ideologi Pancasila dilaksanakan selaras dengan arah kebijakan, garis besar haluan ideologi Pancasila, dan peta jalan pembinaan ideologi Pancasila pada eksternal sebanyak 1 (satu) dokumen.

2. Terlaksananya Penyusunan Pedoman Pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila.

laporan Rekomendasi dari kegiatan yang terkumpul adalah sebagai berikut: Pendidik dan Komponen Masyarakat Lainnya

1. Laporan Pengendalian dalam Kegiatan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Mahasiswa, *Civitas* Pendidik dan Komponen Masyarakat Lainnya;
2. Laporan Pengendalian Dan Monitoring Pelaksanaan Pembelajaran Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila Di Jawa Tengah;
3. Laporan Pengendalian Dan Monitoring Pelaksanaan Pembelajaran Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila Di Provinsi Jawa Timur;
4. Laporan Pengendalian Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila Pada Kegiatan Diklat Dosen;
5. Laporan Pengendalian Paskibraka Provinsi Jawa Tengah;
6. Laporan Pengendalian Menghadiri Kegiatan *Desk* Pembinaan Ideologi Pancasila;
7. Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah;
8. Pengendalian dalam kegiatan Konsinyering Persiapan Pelaksanaan Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila *Goes to School*;
9. Pengendalian Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila Pada Direktorat Jaringan dan Pembudayaan, Deputi Bidang

- Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan;
10. Pengendalian dalam Kegiatan Konsinyering Finalisasi Buku Saku Advokasi “Merawat Kehidupan Keagamaan dalam Masyarakat Majemuk;
 11. Pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila Dalam Upaya Meningkatkan Toleransi Di Kalangan Pelajar;
 12. Laporan kegiatan Implementasi Peta Jalan PIP melalui Penyusunan Matriks pada Lembaga Negara dan Kementerian/Lembaga Tahun 2026 untuk eksternal;
 13. Laporan kegiatan Implementasi Peta Jalan PIP melalui Penyusunan Matriks pada Lembaga Negara dan Kementerian/Lembaga Tahun 2026 untuk Deputy Bidang Pengkajian dan Materi; dan
 14. Draf Pedoman Pengendalian Pelaksanaan PIP

Adapun perhitungan capaian adalah sebagai berikut:

$$\text{Metode pengendalian} = \frac{\text{Laporan Metode Pengendalian Tahun 2026}}{(1 \text{ dokumen} \times 2 \text{ Laporan Metode Pengendalian})} \times 20\%$$

$$\text{Metode pengendalian} = \frac{1}{1} \times 20\% = 20\%$$

$$\text{Pengendalian internal} = \frac{\text{Laporan Pengendalian Internal Tahun 2026}}{(1 \text{ dokumen} \times 30 \text{ Laporan Rekomendasi Kegiatan})} \times 40\%$$

$$\text{Pengendalian internal} = \frac{11}{30} \times 40\% = 17,3\%$$

$$\text{Pengendalian Eksternal} = \frac{\text{Laporan kegiatan dan rekomendasi 2026}}{(1 \text{ dokumen} \times 2 \text{ Laporan Rekomendasi})} \times 40\%$$

$$\text{Pengendalian Eksternal} = \frac{1}{2} \times 40\% = 20\%$$

$$\text{Total akhir keseluruhan} = 20\% + 17,3\% + 20\% = 57,3\%$$

Aktivitas dan kilas peristiwa dalam rangka kegiatan pengendalian pada Triwulan II Tahun 2026 adalah:

Tabel 2. 41 Aktivitas Kegiatan Terlaksananya Pengendalian PIP

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Penyempurnaan Draft Pedoman Pengendalian (Jakarta, tanggal 10 s.d. 11 Juni 2026)	
2.	Kegiatan Implementasi Peta Jalan PIP melalui Penyusunan Matriks pada Lembaga Negara dan Kementerian/Lembaga Tahun 2026 (Bekasi, tanggal 22 s.d. 24 Juni 2026)	

E.2. Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Pembinaan Ideologi Pancasila yang Dimanfaatkan.

Indikator Keberhasilan:

Target Persentase rekomendasi hasil evaluasi pembinaan ideologi Pancasila yang dimanfaatkan pada Tahun 2026 adalah 100%.

Pada Triwulan II Tahun 2026 capaian target tersebut adalah sebesar 45,83% telah dilakukannya Koordinasi internal BPIP dalam Rangka Perumusan Indikator Instrumen dengan rincian sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = 37,5\% + 8,33\% = 45,83\%$$

Capaian IKU Sasaran Program tersebut didukung oleh kegiatan Terlaksananya Evaluasi Pembinaan Ideologi Pancasila.

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pada Pada Triwulan II Tahun 2026 adalah:

Tabel 2. 42 Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya Evaluasi Pembinaan Ideologi Pancasila

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET CAPAIAN	KET
Persentase Rekomendasi evaluasi Pelaksanaan PIP yang ditindaklanjuti	Jumlah Rekomendasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan PIP yang diselesaikan	2 45,83%	45,83% (Rekomendasi)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan capaian yang telah diperoleh pada Triwulan II Tahun 2026 yaitu:

- a. Persentase rekomendasi evaluasi Pelaksanaan PIP yang ditindaklanjuti

Pada tahun 2026 persentase rekomendasi evaluasi Pelaksanaan PIP yang ditindaklanjuti memiliki target 2 (dua) Rekomendasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan PIP yang diselesaikan. Dalam tahapannya rekomendasi evaluasi pelaksanaan PIP yang ditindaklanjuti butuh melewati 2 tahapan dengan bobot masing-masing tahapan sebesar 50% dan hingga Triwulan II Tahun 2026 capaian sudah mencapai 45,83% dimana dalam pelaksanaan telah dilaksanakan:

1. Tahap 1: Perencanaan, Pengoordinasian, dan Pemuktahiran Instrumen Evaluasi (50%)
 - a. Koordinasi internal BPIP dalam Rangka Perumusan Indikator Instrumen
 - b. Penyusunan Instrumen Evaluasi
 - c. Uji coba Instrumen Evaluasi
 - d. Evaluasi Uji coba dan Penetapan Instrumen Evaluasi

Dalam rangka penyusunan metode evaluasi Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP), Direktorat Evaluasi telah melaksanakan koordinasi internal antar direktorat di BPIP untuk menyamakan sudut pandang mengenai tugas dan fungsi unit kerja sesuai dengan Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2018 untuk menentukan dimensi

pada instrumen evaluasi yang menjadi alat ukur evaluasi hasil implementasi kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila. Evaluasi yang dilakukan oleh Direktorat Evaluasi pada Tahun Anggaran 2026 adalah Evaluasi Hasil Diklat PIP terhadap ASN dan Evaluasi Hasil Penyelenggaraan Program Paskibraka. Direktorat Evaluasi bersama dengan para akademisi menyusun dimensi dan indikator yang sesuai dengan konteks tugas dan fungsi unit kerja terkait. Setelah disusunnya dimensi dan indikator yang mengacu pada teori perkembangan moral *Lawrence Kohlberg*, Direktorat Evaluasi menyusun butir - butir soal instrumen evaluasi dengan metode skala sikap dan *Situational Judgement Test*. Dengan disusunnya butir - butir soal instrumen, Direktorat Evaluasi sudah menyusun sebagian instrumen evaluasi yang dilanjutkan dengan uji keterbacaan dan analisis *IRT (Item Response Theory)* pada instrumen Evaluasi Hasil Pembudayaan Nilai - Nilai Pancasila dan Evaluasi Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang telah dilakukan pada Triwulan II Tahun 2026. Setelah itu, untuk menguji validitas dan reliabilitas alat ukur dilakukannya Uji Coba pada instrumen Evaluasi Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka. Pengembangan instrumen Evaluasi Hasil Diklat PIP terhadap ASN juga telah dilakukan untuk melihat distribusi normal secara nasional dan indikator instrumennya. Dari uji nasional instrumen Evaluasi Hasil Diklat PIP tersebut diperlihatkan instrumen memiliki hasil *IRT (Item Response Theory)*, *CFA (Confirmatory Factor Analysis)*, dan analisis ketimpangan yang baik. Saat ini, telah dilakukannya penyebaran tahap pertama instrumen Evaluasi Hasil Diklat PIP yang ditujukan pada 755 alumni Diklat 2025 secara *online*. Selanjutnya, akan dilakukan penyebaran tahap kedua sebanyak 632 alumni diklat 2025.

$$= \text{Capaian Kinerja} = \frac{3}{4} \times 50\% = 37,5\%$$

2. Tahap 2: Evaluasi Implementasi PIP dan Penyusunan Rekomendasi

(50%)

- Evaluasi Hasil Implementasi PIP dengan menggunakan Metode Kuantitatif.
- Evaluasi Hasil Implementasi PIP dengan menggunakan Metode *In-depth Interview*
- Penyusunan Laporan dan Rekomendasi

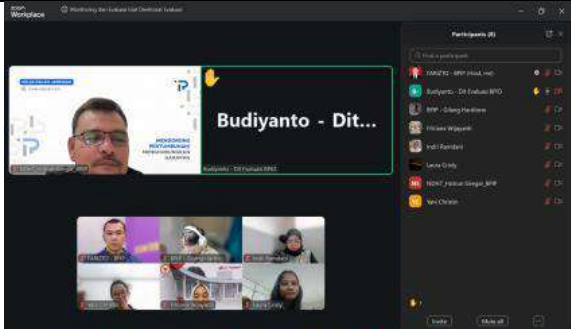
$$= \text{Capaian Kinerja} = \frac{0,5}{3} \times 50\% = 8,33\%$$

Aktivitas dan kilas peristiwa dalam rangka capaian kinerja pada Pada Triwulan II Tahun 2026 adalah:

Tabel 2. 43 Aktivitas Kegiatan Terlaksananya Evaluasi Pembinaan Ideologi Pancasila

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Penyusunan Butir-butir Pernyataan Instrumen Evaluasi Pembudayaan Nilai Pancasila pada ASN Pasca Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila (Jakarta, tanggal 6 s.d.8 April 2026)	
2.	Pengambilan Data Nasional dalam Rangka Pengembangan Alat Ukur Evaluasi Hasil Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) pada Aparatur Sipil Negara (ASN) (Jakarta, tanggal 14 s.d. 16 April 2026)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
3.	Validasi Konten pada Instrumen Evaluasi Hasil Pembudayaan Nilai Pancasila pada ASN Pasca Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) (Jakarta, tanggal 21 April 2026)	
4.	Finalisasi Rencana Strategis Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi (Jakarta, tanggal 8 Mei 2026)	
5.	Kegiatan Validasi Konten pada Instrumen Evaluasi Implementasi Program Paskibraka (Jakarta, tanggal 11 s.d. 13 Mei 2026)	
6.	Validasi Konten pada Instrumen Evaluasi Hasil Pembudayaan Nilai Pancasila pada ASN Pasca Diklat PIP (Jakarta, tanggal 18 s.d. 21 Mei 2026)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
7.	Monitoring dan Evaluasi Giat Direktorat Evaluasi (Jakarta, tanggal 5 Juni 2026)	
8.	Pembahasan Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Data Nasional Evaluasi Implementasi PIP pada ASN (Jakarta, tanggal 9 Juni 2026)	
9.	Pengambilan Data Evaluasi Hasil Diklat PIP terhadap ASN Tahun 2026 (Jakarta, tanggal 15 s.d. 18 Juni 2026)	

E.3. Persentase Rekomendasi Hasil Pengukuran Pelembagaan Pancasila yang Dimanfaatkan

Indikator Keberhasilan:

Target Persentase rekomendasi hasil pengukuran Pelembagaan Pancasila yang dimanfaatkan pada Tahun 2026 adalah 100%.

Pada Triwulan II Tahun 2026 capaian target tersebut adalah sebesar 50%, Dimana telah dilakukannya tahapan pengembangan metodologi pengukuran Pelembagaan Pancasila. dengan uraian capaian (perhitungan) adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan}}{(\text{Jumlah seluruh tahapan kegiatan yang direncanakan})} \times 100\% = \frac{3}{6} \times 100\% = 50\%$$

Capaian IKU Sasaran Program tersebut didukung oleh kegiatan Terlaksananya Pengukuran Pelembagaan dan Aktualisasi Pancasila.

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pada Pada Triwulan II Tahun 2026 adalah:

Tabel 2. 44 Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya Evaluasi Pembinaan Ideologi Pancasila

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET CAPAIAN	KET
Persentase Pengukuran Pelembagaan dan Aktualisasi Pancasila yang ditindaklanjuti	Jumlah Rekomendasi Hasil Pengukuran Pelembagaan Pancasila yang Diselesaikan	1 50%	50% (Rekomendasi)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan capaian yang telah diperoleh pada Triwulan II Tahun 2026 yaitu:

a. Jumlah Rekomendasi Hasil Pengukuran Pelembagaan Pancasila yang Diselesaikan

Dalam tahapannya Pengukuran Pelembagaan Pancasila dibutuhkan 6 tahapan yaitu:

1. Perencanaan dan Pengkoordinasian Pengukuran Pelembagaan Pancasila;
2. Pengembangan Metodologi Pengukuran Pelembagaan Pancasila ;
3. Pelaksanaan Pengukuran Pelembagaan Pancasila;
4. Perhitungan dan Analisis Data Hasil Pengukuran Pelembagaan Pancasila ;
5. Penyusunan Hasil Rekomendasi dan Diseminasi Pengukuran Pelembagaan Pancasila; dan
6. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengukuran Pelembagaan Pancasila

Hingga Triwulan II Tahun 2026 yang diselesaikan sudah mencapai 50% dimana saat ini telah tercapai 3 dari 6 tahapan dengan rincian sebagai berikut:

$$= \frac{\text{capaian tahapan rekomendasi}}{\text{6 tahapan rekomendasi kebijakan}} = \frac{3}{6 \text{ tahapan}} = 50\%$$

1. Perencanaan dan Pengkoordinasian Pengukuran Pelembagaan Pancasila dengan Menyelenggarakan:

- Koordinasi Awal Pengukuran Pelembagaan Pancasila di Wilayah Kalimantan Tahun 2026 (Tarakan, 19 s.d. 21 Januari 2026);
- Rapat Koordinasi Awal Pengukuran Pelembagaan Pancasila Tahun 2026 (Jakarta, 22 Januari 2026); dan
- Koordinasi Awal Pengukuran Pelembagaan Pancasila Tahun 2026 pada Pemerintah Daerah (Surabaya, 5 s.d. 7 Februari 2026).

2. Pengembangan Metodologi Pengukuran Pelembagaan Pancasila dengan Menyelenggarakan:

- Rapat Pendalaman Kerangka Pikir Pengembangan Pengukuran Pelembagaan Pancasila (Jakarta, 3 Februari 2026);
- Rapat Penyusunan Rancangan Kegiatan dan Linimasa Pengembangan Metodologi Pengukuran Pelembagaan Pancasila 2026 (Jakarta, 4 Februari 2026);
- Diskusi Kelompok Terpumpun Perhitungan Bobot Dimensi Pengukuran Pelembagaan Pancasila (Depok, 9 s.d. 11 Februari 2026);
- Rapat Pembahasan Matriks Dimensi Pengukuran Pelembagaan Pancasila (Jakarta, 25 Februari 2026);
- Rapat Pembahasan Bab I Pendahuluan Draf Surat Keputusan Indeks Pengukuran Pelembagaan Pancasila (Jakarta, 26 Februari 2026);
- Rapat Pembahasan Aspek Pengawasan dan Penegakan Pilar

Regulatif Pengukuran Pelembagaan Pancasila (Jakarta, 27 Februari 2026);

- Rapat Pembahasan Surat Keputusan tentang Pedoman Indeks Pelembagaan Pancasila (Jakarta, 4 Maret 2026);
- Rapat Pembahasan Aspek Perencanaan Program/Kegiatan Indikator IPLP 2026 (Jakarta, 5 Maret 2026);
- Diskusi Kelompok Terpumpun Validasi dan Penyempurnaan Indikator Pengukuran Pelembagaan Pancasila Berbasis *Analytical Hierarchy Process* (AHP) (Bekasi, 11 s.d. 13 Maret 2026);
- FGD Perumusan Konsep dan Definisi Operasional Instrumen Pengukuran Pelembagaan Pancasila (Jakarta, 20 April 2026)
- Koordinasi Pengujian Instrumen Pengukuran Pelembagaan Pancasila di Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Mataram, 21 s.d. 23 April 2026);
- Koordinasi Penguatan Instrumen Pengukuran Pelembagaan Pancasila di Pemerintah Provinsi Banten (Serang, 4 s.d. 6 Mei 2026);
- Koordinasi Penguatan Instrumen Pengukuran Pelembagaan Pancasila di Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Yogyakarta, 7 s.d. 9 Mei 2026);
- Diskusi Kelompok Terpumpun Penguatan dan Pembobotan Instrumen Pengukuran Pelembagaan Pancasila (Jakarta, 18 Mei 2026);
- Koordinasi Penguatan Instrumen Pengukuran Pelembagaan Pancasila di Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Bandung, 20 s.d. 22 Mei 2026);
- Koordinasi Penguatan Instrumen Pengukuran Pelembagaan Pancasila di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Semarang, 24 s.d. 26 Mei 2026);
- Perumusan Konsep dan Kebutuhan Pengembangan Metodologi dan Sistem Informasi Pengukuran Pelembagaan

Pancasila (Jakarta, 2 Juni 2026);

- *Benchmarking* Metodologi Penyusunan Indeks sebagai Penguatan Metodologi Pengukuran Pelembagaan Pancasila ke Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (Jakarta, 3 Juni 2026); dan
- *Benchmarking* Metodologi Penyusunan Indeks sebagai Penguatan Metodologi Pengukuran Pelembagaan Pancasila ke Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (Jakarta, 4 Juni 2026).

3. Pengukuran Pelembagaan Pancasila dengan menyelenggarakan:

- Pengembangan Aplikasi Pengukuran Pelembagaan Pancasila (Jakarta, 27 April 2026);
- Koordinasi Pengembangan Sistem Informasi Pengukuran Pelembagaan Pancasila (Jakarta, 4 Mei 2026);
- Kegiatan Rapat Uji Coba dan Perbaikan *Prototype Dashboard* Pengukuran Pelembagaan Pancasila (Jakarta, 18 Juni 2026); dan
- Pembahasan Draf Surat Keputusan tentang Pedoman Pelaksanaan Pengukuran Pelembagaan Pancasila (Jakarta, 22 Juni 2026).

Tabel 2. 45 Aktivitas Kegiatan Terlaksananya Pengukuran Pelembagaan Pancasila

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Perumusan Konsep dan Definisi Operasional Instrumen Pengukuran Pelembagaan Pancasila (Jakarta, tanggal 20 April 2026)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
2.	Rapat Koordinasi Awal Pengukuran Pelembagaan Pancasila Tahun 2026 (Jakarta, tanggal 22 Januari 2026)	
3.	Pengujian Instrumen Pengukuran Pelembagaan Pancasila di Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Mataram, tanggal 21 s.d. 23 April 2026)	
4.	Pengembangan Aplikasi Pengukuran Pelembagaan Pancasila (Jakarta, tanggal 27 April 2026)	
5.	Pengembangan Sistem Informasi Pengukuran Pelembagaan Pancasila (Jakarta, tanggal 4 Mei 2026)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
6.	Penguatan Instrumen Pengukuran Pelembagaan Pancasila di Pemerintah Provinsi Banten (Banten, tanggal 4 s.d. 6 Mei 2026)	
7.	Penguatan Instrumen Pengukuran Pelembagaan Pancasila di Pemerintah Provinsi Jawa barat (Bandung, tanggal 20 s.d. 22 Mei 2026)	
8.	Penguatan Instrumen Pengukuran Pelembagaan Pancasila di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Semarang, tanggal 24 s.d. 26 Mei 2026)	
9.	Perumusan Konsep dan Kebutuhan Pengembangan Metodologi dan Sistem Informasi Pengukuran Pelembagaan Pancasila (Jakarta, tanggal 2 Juni 2026)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
10.	<i>Benchmarking</i> Metodologi Penyusunan Indeks sebagai Penguatan Metodologi Pengukuran Pelembagaan Pancasila ke Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (Jakarta, tanggal 3 Juni 2026)	
11.	<i>Benchmarking</i> Metodologi Penyusunan Indeks sebagai Penguatan Metodologi Pengukuran Pelembagaan Pancasila ke Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (Jakarta, tanggal 4 Juni 2026)	

E.4. Persentase Rekomendasi Hasil Pengukuran Aktualisasi Pancasila yang Ditindaklanjuti

Indikator Keberhasilan:

Target Persentase rekomendasi hasil pengukuran aktualisasi Pancasila sila 1 s.d. 5 yang ditindaklanjuti pada Tahun 2026 adalah 100%.

Pada Triwulan II Tahun 2026 capaian target tersebut adalah sebesar 83%, Dimana telah dilakukannya tahapan Monitoring proses pengambilan data IAP. dengan uraian capaian (perhitungan) adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan}}{(\text{Jumlah seluruh tahapan kegiatan yang direncanakan})} \times 100\% = \frac{5}{6} \times 100\% = 83\%$$

Capaian IKU Sasaran Program tersebut didukung oleh kegiatan Terlaksananya Pengukuran Pelembagaan dan Aktualisasi Pancasila.

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pada Pada Triwulan II Tahun 2026 adalah:

Tabel 2. 46 Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya Evaluasi Pembinaan Ideologi Pancasila

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET CAPAIAN	KET
1. Persentase Rekomendasi Pengukuran Aktualisasi Pancasila 1 yang ditindaklanjuti			
2. Persentase Rekomendasi Pengukuran Aktualisasi Pancasila 2 yang ditindaklanjuti			
3. Persentase Rekomendasi Pengukuran Aktualisasi Pancasila 3 yang ditindaklanjuti	Jumlah Rekomendasi Hasil Pengukuran Indeks Aktualisasi Pancasila Yang Diselesaikan	2 83%	83% (Rekomendasi)
4. Persentase Rekomendasi Pengukuran Aktualisasi Pancasila 4 yang ditindaklanjuti			
5. Persentase Rekomendasi Pengukuran Aktualisasi Pancasila 5 yang ditindaklanjuti			

Dari tabel di atas dapat disimpulkan capaian yang telah diperoleh pada Triwulan II Tahun 2026 yaitu:

- Jumlah Rekomendasi Hasil Pengukuran Indeks Aktualisasi Pancasila yang Diselesaikan

Dalam pelaksanaan kegiatan Rekomendasi Hasil pengukuran Indeks Aktualisasi Pancasila dibutuhkan 6 tahapan yaitu:

1. Pengembangan Metodologi dan Penyusunan Pedoman IAP;
2. Penghitungan IAP dan Penyusunan Laporan IAP;
3. Penyusunan Rekomendasi Hasil IAP;
4. Diseminasi Hasil Capaian IAP;
5. Monitoring dan Evaluasi Hasil Capaian IAP dan Tindak Lanjut Rekomendasi IAP
6. Monitoring Proses Pengambilan Data IAP

Hingga Triwulan II Tahun 2026 yang diselesaikan sudah mencapai 83% dimana saat telah tercapai 5 dari 6 tahapan dengan rincian sebagai berikut:

$$= \frac{\text{capaian tahapan rekomendasi}}{\text{6 tahapan rekomendasi kebijakan}} = \frac{5}{6 \text{ tahapan rekomendasi kebijakan}} = 83\%$$

1. Pengembangan Metodologi dan Penyusunan Pedoman IAP dengan melaksanakan dan menyelenggarakan:
 - Rapat Pembahasan Draf Dokumen Surat Keputusan Kepala BPIP tentang Pedoman Pelaksanaan Pengukuran Aktualisasi Pancasila dan Pedoman Pengukuran Pelembagaan Pancasila (Jakarta, 14 Januari 2026);
 - Rapat Pembahasan Pedoman Indeks Aktualisasi Pancasila (IAP) (Jakarta, 2 Maret 2026);
2. Penghitungan IAP dan Penyusunan Laporan IAP dengan melaksanakan dan menyelenggarakan:
 - Rapat Persiapan Penghitungan Indeks Aktualisasi Pancasila 2025 (Jakarta, 27 Januari 2026);
 - Penghitungan dan Normalisasi Indikator Susenas Kor dan Pendataan Potensi Desa pada IAP (Jakarta, 24 Februari 2026);
 - Penghitungan dan Normalisasi Indikator Susenas Modul pada Indeks Aktualisasi Pancasila (IAP) Dimensi Sila 1 dan 2

(Jakarta, 6 Maret 2026);

- Penghitungan dan Normalisasi Indikator Susenas Modul pada Indeks Aktualisasi Pancasila (IAP) Dimensi Sila 3 dan 4 (Jakarta, 2 April 2026);
 - Penghitungan dan Normalisasi Indikator Susenas Modul pada Indeks Aktualisasi Pancasila (IAP) (Jakarta, 7 April 2026);
 - Pembahasan Penetapan Nilai Minimal dan Maksimal Indikator dalam Rangka Normalisasi Data Indeks Aktualisasi Pancasila (IAP) (Jakarta, 14 s.d. 16 April 2026);
 - Penetapan Konsep dan Definisi Indikator X1.3 dan X3.2 pada Indeks Aktualisasi Pancasila (IAP) (Jakarta, 29 April 2026);
 - Penghitungan Nilai Indeks per Sila dan Indeks Aktualisasi Pancasila (IAP) (Jakarta, 11 s.d. 13 Mei 2026);
 - Penyusunan Bab Profil IAP Provinsi (Jakarta, 19 s.d. 21 Mei 2026);
 - Pembahasan Surat Keputusan Pedoman Pengukuran Aktualisasi Pancasila (Jakarta, 25 Mei 2026);
 - Rapat Penyusunan Profil Indeks Aktualisasi Pancasila (IAP) Nasional pada Laporan IAP Tahun 2026 (Jakarta, 26 Mei 2026);
 - Penyusunan Bab Profil IAP Provinsi (2) (Jakarta, 15 Juni 2026); dan
 - Penyusunan Bab Profil IAP Provinsi (3) (Jakarta, 30 Juni 2026);
3. Diseminasi Hasil Capaian IAP dengan melaksanakan dan menyelenggarakan:
- Koordinasi Pemanfaatan Indeks Aktualisasi Pancasila (IAP) di Provinsi Kalimantan Utara (Kalimantan Utara, 19 s.d. 21 Januari 2026).
4. Monitoring dan Evaluasi Hasil Capaian IAP dan Tindak Lanjut Rekomendasi IAP dengan melaksanakan dan menyelenggarakan:
- Koordinasi dan Integrasi Indikator Mandiri IAP di Provinsi Jawa

- Timur (Jawa Timur, 5 s.d. 7 Februari 2026);
- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Indeks Aktualisasi Pancasila Tahun 2024 di Provinsi Papua Selatan (Papua Selatan, 25 Februari 2026);
 - Monitoring Indikator X1.3 Indeks Aktualisasi Pancasila (IAP) Provinsi Bali Tahun 2025 (Bali, 8 s.d. 10 April 2026); dan
 - Koordinasi Pemanfaatan Indeks Aktualisasi Pancasila (IAP) Tahun 2024 dan Monitoring Indikator X3.2 IAP Tahun 2025 Provinsi Nusa Tenggara Barat (Mataram, 21 s.d. 24 April 2026);
5. Monitoring Proses Pengambilan Data IAP dengan melaksanakan dan menyelenggarakan
- Koordinasi dan Integrasi Indikator Mandiri IAP di Provinsi Jawa Timur (Jawa Timur, 5 s.d. 7 Februari 2026);
 - Monitoring Indikator IAP pada Proses Pendataan Susenas Kor 2026 di Provinsi Maluku (Maluku, 18 – 21 Februari 2026);
 - Monitoring Indikator IAP pada Proses Pendataan Susenas Kor 2026 di Provinsi Sumatera Utara (Sumatera Utara, 18 – 21 Februari 2026); dan
 - Monitoring Indikator IAP pada Proses Pendataan Susenas Kor 2026 di Provinsi Kalimantan Barat (Kalimantan Barat, 18 – 21 Februari 2026);

Tabel 2. 47 Aktivitas Kegiatan Terlaksananya Pengukuran Aktualisasi Pancasila

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Penghitungan dan Normalisasi Indikator Susenas Modul pada Indeks Aktualisasi Pancasila (IAP) (Jakarta, tanggal 7 April 2026)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
2.	Monitoring Indikator X1.3 Indeks Aktualisasi Pancasila (IAP) Provinsi Bali Tahun 2025 (Jakarta, tanggal 8 s.d. 10 April 2026)	
3.	Pembahasan Penetapan Nilai Minimal dan Maksimal Indikator dalam Rangka Normalisasi Data Indeks Aktualisasi Pancasila (IAP) (Jakarta, tanggal 14 s.d. 16 April 2026)	
4.	Koordinasi Pemanfaatan Indeks Aktualisasi Pancasila (IAP) Tahun 2024 dan Monitoring Indikator X3.2 IAP Tahun 2025 Provinsi Nusa Tenggara Barat (Mataram, tanggal 21 s.d. 24 April 2026)	
5.	Penetapan Konsep dan Definisi Indikator X1.3 dan X3.2 pada Indeks Aktualisasi Pancasila (IAP) (Sumatera Utara, tanggal 29 April 2026)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
6.	Penghitungan Nilai Indeks per Sila dan Indeks Aktualisasi Pancasila (IAP) (Jakarta, tanggal 11 s.d. 13 Mei 2026)	
7.	Penyusunan Bab Profil IAP Provinsi (Jakarta, tanggal 19 s.d. 21 Mei 2026)	
8.	Penyusunan Profil Indeks Aktualisasi Pancasila (IAP) Nasional pada Laporan IAP Tahun 2026 (Jakarta, tanggal 26 Mei 2026)	
9.	Penyusunan Bab Profil IAP Provinsi (2) (IAP) (Jakarta, tanggal 15 Juni 2026)	
10.	Penyusunan Bab Profil IAP Provinsi (3) (Jakarta, tanggal 30 Juni 2026)	

F. Terwujudnya tata kelola pemerintahan BerAKHLAK dan Pelayanan Prima berbasis Elektronik

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya meliputi kegiatan Kesekretariatan yang diarahkan pada Terwujudnya tata kelola pemerintahan BerAKHLAK dan pelayanan prima berbasis elektronik.

Ukuran keberhasilan Terwujudnya tata kelola pemerintahan BerAKHLAK dan pelayanan prima berbasis elektronik adalah:

Tabel 2. 48 Indikator Kinerja Program Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan BerAKHLAK dan Pelayanan Prima Berbasis Elektronik

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	REALISASI	KET
Nilai Reformasi Birokrasi	79	-	Penilaian Reformasi Birokrasi 2026 belum dilakukan
Kategori SAKIP	B	-	Penilaian Kategori SAKIP 2026 belum dilakukan
Nilai Sistem Merit	335	-	Capaian Indeks Sistem merit Tahun 2026 belum dilakukan
Opini Laporan Keuangan BPK	WTP	-	Opini atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 oleh BPK masih proses
Indeks SPBE	4	-	Penilaian atas indeks SPBE 2026 belum dilakukan
Indeks Kepuasan Masyarakat	88	-	Survei terhadap <i>stakeholder</i> 2026 belum dilakukan

Fokus layanan yang dilakukan dalam rangka dukungan manajemen BPPI diberikan kepada pihak internal BPPI dan K/L Pembina sebagai mitra BPPI dalam upaya penguatan kelembagaan BPPI adalah:

1. Layanan koordinasi perencanaan, penyusunan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dan analisis, serta pelaporan akuntabilitas kinerja;

2. Layanan koordinasi produk hukum, organisasi dan tata laksana, serta reformasi birokrasi;
3. Layanan kerumahtanggaan, pengelolaan BMN, dan manajemen SDM kepada unit kerja;
4. Layanan dukungan teknis dan administrasi, hubungan masyarakat dan keprotokolan bagi Pimpinan;
5. Layanan pengawasan Internal; dan
6. Layanan pengelolaan data dan teknologi informasi mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Indikator keberhasilan tata kelola pemerintahan BerAKHLAK dan pelayanan prima berbasis elektronik menjadi perhatian: (i) Kementerian PAN dan RB, BKN dengan Nilai Reformasi Birokrasi, Kategori implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), Indeks SPBE, Nilai Sistem Merit, dan Indeks Kepuasan Masyarakat; (ii) Badan Pemeriksa Keuangan dengan opini pada laporan keuangan, dan (iii) Kementerian Keuangan dan Bappenas terkait perencanaan, keuangan, dan monitoring dan evaluasi program dan anggaran.

Beberapa perkembangan capaian strategis tata kelola pemerintahan BerAKHLAK dan pelayanan prima berbasis elektronik Pada Triwulan II Tahun 2026, dicapai melalui kegiatan yaitu:

F.1. Terlaksananya Koordinasi Perencanaan, Penyusunan Anggaran, Pengelolaan Keuangan, Pemantauan, Evaluasi, dan Analisis, serta Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Capaian Indikator Kinerja Terlaksananya koordinasi perencanaan, penyusunan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dan analisis, serta pelaporan akuntabilitas kinerja hingga Pada Triwulan II Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 49 Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya Koordinasi Perencanaan, Penyusunan Anggaran, Pengelolaan Keuangan, Pemantauan, Evaluasi, dan Analisis, serta Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pelaksanaan Manajemen Program, Keuangan dan Kinerja

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Persentase pemenuhan dokumen perencanaan sesuai standar	Layanan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	1	50%	50% (Dokumen)
	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1	50%	50% (Dokumen)
Persentase laporan keuangan yang tepat waktu	Layanan Manajemen Keuangan	1	50%	50% (Dokumen)
Persentase pemenuhan dokumen laporan kinerja sesuai standar	Layanan Penyusunan Laporan Monev	1	50%	50% (Dokumen)
	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	6	50%	50% (Dokumen)

Perhitungan kinerja pelaksanaan manajemen program, keuangan dan kinerja adalah periodisasi waktu pelayanan yang dilakukan selama 12 bulan (satu tahun) dan pelaporan-pelaporan yang diberikan setiap bulannya kepada instansi pembina. Pada periode Triwulan II Tahun 2026 telah terlaksana layanan selama 6 bulan dari 12 bulan yang dimana jika dipersentasikan adalah sebesar 50%. Layanan yang telah dilakukan Biro Perencanaan dan Keuangan adalah sebagai berikut:

a. Layanan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

Biro Perencanaan dan Keuangan bertanggung jawab atas proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BPIP secara menyeluruh. Proses ini mencakup identifikasi kebutuhan program dan kegiatan, perumusan sasaran, serta penyelarasan dengan prioritas nasional dan kebijakan pembangunan jangka menengah. Melalui layanan ini, biro memastikan bahwa seluruh rencana kerja terstruktur secara sistematis, terukur, dan sesuai dengan kerangka regulasi perencanaan pembangunan nasional. Berikut adalah dokumen dan Layanan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran yang telah diselesaikan Pada Tahun Anggaran 2026 sampai Triwulan II Tahun 2026:

1. *Bilateral Meeting* Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja BPIP Tahun Anggaran 2027 pada tanggal 27 Januari 2026;
2. Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebanyak 3 kali;
3. Rapat Pra Raker BPIP Tahun 2026;
4. Penyampaian data awal persiapan review anggaran penyusunan Pagu Indikatif BPIP Tahun Anggaran 2027;
5. Sinkronisasi Rencana Kerja Tahun Anggaran 2026 pada aplikasi SAKTI;
6. Rapat Kerja BPIP Tahun 2026 dengan tema “Bergerak Kompak, PIP Berdampak”;
7. Penyelesaian Berita Acara *Trilateral Meeting* Penyusunan Rencana Awal Rencana Kerja BPIP Tahun 2027.
8. Pembahasan ABT DIPA Tahun Anggaran 2026 dan Tambahan Anggaran Tahun 2027;

b. Layanan Perencanaan dan Penganggaran

Biro Perencanaan melakukan kegiatan koordinasi dan integrasi antara perencanaan strategis dengan penganggaran berbasis kinerja. Biro merumuskan strategi alokasi sumber daya secara optimal guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unit kerja di lingkungan BPIP. Layanan ini juga memastikan bahwa proses perencanaan dan penganggaran mengikuti prinsip efisiensi, efektivitas, dan sinergi antarprogram. Dokumen Perencanaan yang berisi rencana program dan kegiatan, dan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta sebagai tolak ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu tertentu. Biro Perencanaan dan Keuangan sudah melakukan layanan Perencanaan sebaik mungkin misalnya dari Revisi DIPA dan revisi POK dalam rangka optimalisasi anggaran. Berikut adalah dokumen dan layanan perencanaan dan penganggaran yang telah diselesaikan Pada Tahun Anggaran 2026 sampai Triwulan II Tahun 2026 adalah:

1. Revisi DIPA 3 kali;
2. Revisi POK 5 kali;
3. Penelaahan Efisiensi Anggaran T.A. 2026 bersama dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dan Bappenas;
4. Koordinasi terkait dukungan program prioritas presiden dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
5. Penelaahan Revisi DIPA BPIP;
6. Pembahasan Program Direktif Presiden;
7. Penandaan Rencana Aksi Unit Kerja BPIP pada Peta Jalan PIP;

8. Rekapitulasi Data Belanja Per Lokasi Kegiatan (Lokus) Tahun Anggaran 2025.

c. Layanan Manajemen Keuangan

Sebagai penanggung jawab dalam pengelolaan keuangan negara di lingkungan BPIP, Biro Perencanaan dan Keuangan menjalankan fungsi perbendaharaan dan akuntansi, termasuk perencanaan kas, pengelolaan belanja, hingga penyusunan laporan keuangan. Layanan ini bertujuan untuk menjamin tertib administrasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran. Dalam menjalankan Layanan Manajen Keuangan Biro Perencanaan dan keuangan pada Triwulan II Tahun 2026, telah melaksanakan dokumen dan layanan sebagai berikut:

1. Penyusunan Laporan Keuangan *Audited* Tahun Anggaran 2025 di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
2. Pelaksanaan Layanan Keuangan;
3. Pelaksanaan audit keuangan yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Rekonsiliasi Laporan Keuangan *Audited* di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
5. Layanan pengelolaan dan manajemen kas;
6. Layanan pengajuan penerbitan SP2D;
7. Layanan perbendaharaan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

d. Layanan Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi
Dalam mendukung fungsi pengendalian dan akuntabilitas kinerja, Biro Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan layanan penyusunan laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan. Melalui layanan ini, biro menyediakan data dan informasi berbasis hasil yang menjadi

dasar perbaikan kebijakan, penyusunan laporan kinerja, serta pengambilan keputusan manajerial secara berkelanjutan. Dalam menjalankan Layanan Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Biro Perencanaan dan keuangan pada Triwulan II Tahun 2026 telah melaksanakan dokumen dan layanan sebagai berikut:

1. Penyusunan laporan capaian program dan kegiatan Tahun 2025;
2. Penyusunan laporan capaian program dan kegiatan Triwulan I dan II 2025
3. Pemenuhan Monev Pelaksanaan Anggaran melalui e-monev Bappenas dan smart-dja;
4. Pemenuhan Dokumen SAKIP di ESR MENPAN;
5. Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan;
6. Penyusunan Perjanjian Kinerja BPIP;
7. Pemenuhan dokumen Rencana Aksi BPIP;
8. Penyusunan bahan penyusunan lampiran pidato Presiden Republik Indonesia.

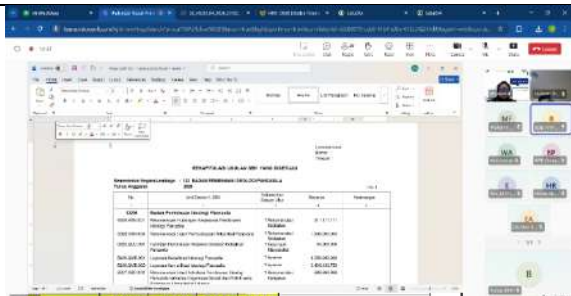
e. Layanan Pemantauan dan Evaluasi

Biro Perencanaan dan Keuangan melakukan layanan ini untuk menilai sejauh mana program, kegiatan, dan penggunaan anggaran telah berjalan sesuai dengan rencana serta mencapai *output* dan *outcome* yang ditetapkan. Biro melakukan pemantauan secara berkala serta evaluasi kinerja atas pelaksanaan kegiatan, termasuk memberikan rekomendasi perbaikan guna peningkatan kualitas program BPIP secara keseluruhan. Dalam menjalankan Layanan Pemantauan dan Evaluasi Biro Perencanaan dan keuangan pada Triwulan II Tahun 2026 telah melaksanakan dokumen dan layanan sebagai berikut:

1. Monitoring dan Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan Triwulan II Tahun 2026;
2. Koordinasi dan penyusunan laporan pada Sistem Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Prioritas Kantor Staf Presiden Triwulan II;
3. Pengendalian Pelaksanaan Program/Kegiatan Bidang Politik dan Komunikasi bersama dengan BAPPENAS.
4. Pemutakhiran Indikator Kinerja Utama Unit Organisasi di Lingkungan BPIP; dan
5. Evaluasi Disiplin Belanja setiap Triwulan.

Aktivitas dalam rangka capaian kinerja pelaksanaan manajemen program, keuangan, dan kinerja pada Triwulan II Tahun 2026 adalah:

Tabel 2. 50 Aktivitas Pelaksanaan Manajemen Program, Keuangan, dan Kinerja

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Jakarta, tanggal 13 April 2026)	
2.	Penelaahan Revisi DIPA BPIP ke-3 T.A. 2026 bersama dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas (Jakarta, tanggal 21 April 2026)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
3.	Persiapan Tripartit antara BPIP, BPK, dan Kementerian Keuangan dalam Rangka Penyelarasan Data Keuangan pada Laporan Keuangan <i>Audited</i> T.A 2025 (Jakarta, tanggal 22 April 2026)	
4.	Tripartit antara BPIP, BPK dan Kementerian Keuangan atas Laporan Keuangan BPIP TA 2025 (<i>Audited</i>) (Jakarta, tanggal 23 April 2026)	
5.	Pembahasan Program Direktif Presiden bersama dengan Direktorat Pengkajian Implementasi (Jakarta, tanggal 6 Mei 2026)	
6.	Pembahasan ABT DIPA Tahun Anggaran 2026 dan Tambahan Anggaran Tahun 2027 (Jakarta, tanggal 12 Mei 2026)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
7.	Peningkatan Tata Kelola Pelaksanaan Anggaran di BPIP tahun 2026 melalui Aplikasi SIMPATI (Jakarta, tanggal 18 Mei 2026)	
8.	Verifikasi Pengisian Audit Sistem Kearsipan Internal (ASKI) dan Bukti Dukung Pengawasan Kearsipan Internal Biro Perencanaan dan Keuangan (Jakarta, tanggal 19 Mei 2026)	
9.	Pembagian Tugas Tim Efektif dalam Peningkatan Aplikasi Simpati Sebagai <i>Early Warning System</i> dalam Mendukung Pengambilan Keputusan Strategis Di BPIP (Jakarta, tanggal 21 Mei 2026)	
10.	Koordinasi Pelaksanaan Uji Coba SIMPATI PRIMA (Jakarta, tanggal 3 Juni 2026)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
11.	Evaluasi Hasil Uji Coba dan Tindak Lanjut Implementasi SIMPATI PRIMA(Jakarta, tanggal 15 Juni 2026)	
12.	Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XIII DPR RI (Jakarta, tanggal 15 Juni 2026)	
13.	Pembahasan Tindak Lanjut Rencana Aksi Rekomendasi Hasil Pemeriksaan oleh BPK mengenai Penyusunan prosedur baku penagihan atas beban APBN di lingkungan BPIP (Jakarta, tanggal 18 Juni 2026)	
14.	Peluncuran Aplikasi SIMPATI PRIMA (Jakarta, tanggal 25 Juni 2026)	

F.2. Terlaksananya Koordinasi Produk Hukum, Organisasi dan Tata Laksana, serta Reformasi Birokrasi

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya koordinasi produk hukum, organisasi dan tata laksana, serta reformasi birokrasi Pada Triwulan II Tahun 2026 adalah:

Tabel 2. 51 Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya Koordinasi Produk Hukum, Organisasi dan Tata Laksana, serta Reformasi Birokrasi

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Persentase Rancangan Produk Hukum yang ditindaklanjuti	Layanan Hukum	1	50%	50% (Layanan)
Persentase rekomendasi penataan organisasi dan reformasi birokrasi yang ditindaklanjuti	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	50%	50% (Layanan)

Perhitungan kinerja pelaksanaan koordinasi produk hukum, organisasi dan tata laksana, serta reformasi birokrasi adalah periodisasi waktu pelayanan yang dilakukan selama 12 bulan (satu tahun) dan pelaporan-pelaporan yang diberikan setiap bulannya kepada instansi pembina. Pada periode Triwulan II Tahun 2026 telah terlaksana layanan selama 6 bulan dari 12 bulan yang dimana jika dipersentasikan adalah sebesar 50%. Uraian capaian kinerja Biro Hukum dan Organisasi sebagai berikut:

1. Persentase rancangan produk hukum dilaksanakan dengan rincian *output* layanan hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPIP sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPIP Nomor 4 Tahun 2023, tugas dan fungsi dalam kaitannya dengan pemberian layanan hukum meliputi 2

(dua) klasifikasi utama sebagai berikut:

- a. Pemberian layanan hukum dalam kaitannya dengan penyusunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum BPIP; dan
- b. Pemberian layanan hukum dalam kaitannya dengan penelaahan hukum dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.

Adapun masing-masing layanan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Penyusunan Rancangan Peraturan perundang-undangan dan Produk Hukum

Rancangan peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah peraturan BPIP, sedangkan produk hukum BPIP meliputi Keputusan Dewan Pengarah/Kepala/Sekretaris Utama/Deputi BPIP, selain juga instruksi dan surat edaran.

Penyusunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum BPIP dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Tahapan kegiatan penyusunan Peraturan BPIP meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan/penetapan, pengundangan, pendokumentasian dan penyebarluasan. Dalam perencanaan akan ditetapkan Program Penyusunan Peraturan BPIP Tahun 2024 dengan Keputusan Kepala BPIP. Tahap penyusunan dilakukan oleh pemrakarsa untuk selanjutnya dilakukan penyelarasan internal oleh Biro

Hukum dan Organisasi. Tahap pembahasan merupakan pengharmonisasian oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Setelahnya Rancangan Peraturan BPPI akan ditetapkan oleh Kepala BPPI untuk selanjutnya diundangkan melalui pencatatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Tahap penyusunan keputusan dan produk hukum lainnya meliputi penyusunan dan pembahasan internal. Dalam tahap penyusunan dan pembahasan dapat melibatkan Kementerian/Lembaga, ahli, dan atau pihak lain yang terkait dengan materi produk hukum. Dalam beberapa penyusunan produk hukum memerlukan kegiatan studi banding dengan Kementerian/Lembaga dan/atau pemerintahan daerah sehingga produk hukum yang disusun tepat tujuan dan tepat sasaran serta dapat diimplementasikan.

b. Penelaahan Hukum dan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum

1) Penelaahan hukum merupakan kegiatan untuk melakukan kajian terhadap produk hukum dan berbagai permasalahan hukum, yang terdiri atas analisis hukum, evaluasi produk hukum, mediasi, dan pendampingan hukum serta asistensi penyusunan naskah Kerja Sama berupa nota kesepahaman, perjanjian Kerja Sama, kemitraan, dan naskah Kerja Sama lainnya.

Objek kajian penelaahan adalah lembaga (BPPI) maupun individual (Pegawai BPPI), termasuk juga kajian terhadap produk hukum BPPI dalam kerangka pembentukan atau evaluasi produk hukum BPPI. Sedangkan mediasi dan pendampingan hukum dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum yang

memerlukan penanganan hukum baik litigasi maupun nonlitigasi.

Asistensi penyusunan naskah Kerja Sama dilaksanakan dalam rangka menguatkan materi Kerja Sama yang akan dituangkan dalam nota kesepahaman, perjanjian Kerja Sama, kemitraan, dan naskah Kerja Sama lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan BPIP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pembinaan Ideologi Pancasila. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi potensi terjadinya permasalahan hukum di kemudian hari.

- 2) Dalam kaitan pengelolaan informasi hukum di lingkungan BPIP meliputi pendokumentasian, penyebarluasan, dan pemeliharaan dokumen hukum. Dalam kaitan pengelolaan informasi hukum tersebut telah diundangkan Peraturan BPIP Nomor 6 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPIP, dimana BPIP diproyeksikan JDIH BPIP menjadi sentra informasi dan dokumentasi hukum terkait dengan Pembinaan Ideologi Pancasila. Pelaksanaan urusan dokumentasi dan informasi hukum merupakan kegiatan pengelolaan produk hukum BPIP meliputi pendokumentasian, inventarisasi, dan penyediaan informasi produk hukum. Pendokumentasian produk hukum BPIP dilakukan secara manual dan elektronik dalam JDIH BPIP yang telah terintegrasi dengan JDIHN. Sedangkan penyediaan informasi hukum dilakukan melalui berbagai sarana, yaitu dapat melalui pencetakan/penjilidan produk-produk hukum BPIP, pamflet, *standing banner*, dan berbagai media lain serta media elektronik, selain juga melakukan sosialisasi

dan/atau internalisasi produk hukum yang telah diterbitkan BPIP. Pengembangan pendokumentasian dan penyebarluasan informasi hukum juga memerlukan pembangunan perpustakaan *offline* dan *online*.

Sebagai salah satu sarana penyediaan informasi hukum berbasis elektronik, Biro Hukum dan Organisasi melaksanakan pengelolaan dan pengembangan terhadap JDIH secara berkala sehingga seluruh produk hukum BPIP dan segala dokumen berkaitan dengan pembinaan ideologi Pancasila dapat terinformasikan dan diakses oleh masyarakat luas dengan serta-merta.

Seluruh pelaksanaan kegiatan pemberian Layanan Hukum dilakukan melalui berbagai tahapan yang harus dibangun secara bertahap, berkelanjutan dan perlu melibatkan koordinasi serta Kerja Sama dengan instansi lain (K/L/Pemda) serta didukung dengan tersedianya infrastruktur (sarana prasarana) yang memadai.

Pada Triwulan II Tahun 2026 BPIP telah menerbitkan 62 Produk Hukum terdiri dari:

- a. Keputusan Kepala BPIP = 26 Dokumen
- b. Keputusan Sekretaris Utama BPIP = 24 Dokumen
- c. Keputusan Deputi 1 = 1 Dokumen
- d. Keputusan Deputi 3 = 2 Dokumen
- e. Keputusan Deputi 4 = 1 Dokumen
- f. MoU = 2 Dokumen
- g. Perjanjian Kerja Sama = 3 Dokumen
- h. SE Kepala = 2 Dokumen
- i. SE Sekretaris Utama BPIP = 1 Dokumen

Penyusunan rancangan Peraturan BPIP dengan rincian penyelesaian sebagai berikut:

Tabel 2. 52 Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya Koordinasi Produk Hukum, Organisasi dan Tata Laksana, serta Reformasi Birokrasi

PRODUK HUKUM BPIP		TANGGAL TERBIT
Keputusan Kepala BPIP		
1.	SK Kepala BPIP Nomor 1 Tahun 2026 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2026	2 Januari 2026
2.	SK Kepala BPIP Nomor 2 Tahun 2026 tentang Tim Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	2 Januari 2026
3.	SK Kepala BPIP Nomor 2.1 Tahun 2026 tentang Unit Akuntansi dan Pelaporan Pengguna Barang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2026	2 Januari 2026
4.	SK Kepala BPIP Nomor 2.2 Tahun 2026 tentang Tim Penghapusan dan Inventarisasi Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2026	2 Januari 2026
5.	SK Kepala BPIP Nomor 2.3 Tahun 2026 tentang Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara Tingkat Pengguna Barang di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2026	2 Januari 2026
6.	SK Kepala BPIP Nomor 3 Tahun 2026 tentang Tim Pengelola Jurnal BPIP Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Dan Bhinneka Tunggal Ika: Jurnal Internasional Berbahasa Indonesia	5 Januari 2026

PRODUK HUKUM BPIP		TANGGAL TERBIT
	Tahun 2026	
7.	SK Kepala BPIP Nomor 3.1 Tahun 2026 tentang Tim Percepatan Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2026	12 Januari 2026
8.	SK Kepala BPIP Nomor 3.2 Tahun 2026 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2026	12 Januari 2026
9.	SK Kepala BPIP Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	27 Januari 2026
10.	SK Kepala BPIP Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Kerja Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2026	27 Januari 2026
11.	SK Kepala BPIP Nomor 6 Tahun 2026 tentang Tim Pengkaji Pembentukan Pusat Penilaian Kompetensi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	27 Januari 2026
12.	SK Kepala BPIP Nomor 7 Tahun 2026 tentang Jam Kerja Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Pada Bulan Ramadan 1447 Hijriah	18 Februari 2026
13.	SK Kepala BPIP Nomor 8 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengukuran Aktualisasi Pancasila	18 Februari 2026
14.	SK Kepala BPIP Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengukuran Pelembagaan Pancasila	18 Februari 2026
15.	SK Kepala BPIP Nomor 10 Tahun 2026 tentang Panitia Pelaksana	18 Februari 2026

PRODUK HUKUM BPIP		TANGGAL TERBIT
	Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Pusat Tahun 2026	
16.	SK Kepala BPIP Nomor 11 Tahun 2026 tentang Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengguna Anggaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2026	2 Maret 2026
17.	SK Kepala BPIP Nomor 12 Tahun 2026 tentang Panitia Penilai Arsip Di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	2 Maret 2026
18.	SK Kepala BPIP Nomor 13 Tahun 2026 tentang Tim Pengawas Kearsipan Internal Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	9 Maret 2026
19.	SK Kepala BPIP Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penunjukan Pelaksana Harian Dan Pelaksana Tugas Di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	17 Maret 2026
20.	SK Kepala BPIP Nomor 15 Tahun 2026 tentang Struktur Simpul Jaringan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	25 Maret 2026
21.	SK Kepala BPIP Nomor 16 Tahun 2026 tentang Tim Pengawas Kearsipan Internal Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	7 April 2026
22.	SK Kepala BPIP Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi	7 April 2026
23.	SK Kepala BPIP Nomor 18 Tahun 2026 tentang Panitia Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026	16 April 2026
24.	SK Kepala BPIP Nomor 19 Tahun 2026 tentang Tim Persiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden	16 April 2026

PRODUK HUKUM BPIP		TANGGAL TERBIT
	tentang Jabatan Fungsional Pembina Ideologi Pancasila	
25.	SK Kepala BPIP Nomor 20 Tahun 2026 tentang Purnapaskibraka Duta Pancasila Tingkat Pusat Tahun 2025	1 Juni 2026
26.	SK Kepala BPIP Nomor 21 Tahun 2026 tentang Penetapan Purnapaskibraka Duta Pancasila Tingkat Provinsi Dan Kabupaten/Kota Tahun 2025	1 Juni 2026
Keputusan Sekretaris Utama BPIP		
27.	SK Sekretaris Utama BPIP Nomor 1 Tahun 2026 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2027	2 Januari 2026
28.	SK Sekretaris Utama BPIP Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2026	2 Januari 2026
29.	SK Sekretaris Utama BPIP Nomor 3 Tahun 2026 tentang Sekretariat Dewan Pengarah, Staf Khusus Dewan Pengarah, Dan Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	5 Januari 2026
30.	SK Sekretaris Utama BPIP Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengelola Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2026	9 Januari 2026
31.	SK Sekretaris Utama BPIP Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pengelola Barang Persediaan Di Lingkungan BPIP Tahun 2026	9 Januari 2026
32.	SK Sekretaris Utama BPIP Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rencana Strategis Sekretariat Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2025-2029	9 Januari 2026

PRODUK HUKUM BPIP		TANGGAL TERBIT
33.	SK Sekretaris Utama BPIP Nomor 7 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pemantauan Di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	9 Januari 2026
34.	SK Sekretaris Utama BPIP Nomor 8 Tahun 2026 tentang Sekretariat Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	22 Januari 2026
35.	SK Sekretaris Utama BPIP Nomor 8.1 Tahun 2026 tentang Sekretariat Forum Satu Data BPIP	22 Januari 2026
36.	SK Sekretaris Utama BPIP Nomor 9 Tahun 2026 tentang Tim Pengelola Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat Secara Dalam Jaringan Di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	12 Februari 2026
37.	SK Sekretaris Utama BPIP Nomor 10 Tahun 2026 tentang Petugas Admin Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2026	18 Februari 2026
38.	SK Sekretaris Utama BPIP Nomor 11 Tahun 2026 tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Dan Tim Pertimbangan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2026	2 Maret 2026
39.	SK Sekretaris Utama BPIP Nomor 12 Tahun 2026 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Biro Pengawasan Internal Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2026	9 Maret 2026
40.	SK Sekretaris Utama BPIP Nomor 12.1 Tahun 2026 tentang Tim Penilaian Mandiri dan Tim Penjaminan Kualitas Atas Penyelenggaraan Sistem	1 April 2026

PRODUK HUKUM BPIP		TANGGAL TERBIT
	Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2026	
41.	SK Sekretaris Utama BPIP Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2026 (Selaku Kuasa Pengguna Anggaran)	8 April 2026
42.	SK Sekretaris Utama BPIP Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pengelola Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2026 (Selaku Kuasa Pengguna Anggaran)	9 April 2026
43.	SK Sekretaris Utama BPIP Nomor 15 Tahun 2026 tentang Penyelenggara Kearsipan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	20 April 2026
44.	SK Sekretaris Utama BPIP Nomor 16 Tahun 2026 tentang Pemberhentian Gaji a.n. Dona	28 April 2026
45.	SK Sekretaris Utama BPIP Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pemberhentian Gaji a.n. Yulisa	28 April 2026
46.	SK Sekretaris Utama BPIP Nomor 18 Tahun 2026 tentang Tim Efektif Transformasi Pengembangan Kompetensi Pegawai Melalui Coaching dan Mentoring di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	8 Mei 2026
47.	SK Sekretaris Utama BPIP Nomor 19 Tahun 2026 tentang Tim Pendukung Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026	13 Mei 2026
48.	SK Sekretaris Utama BPIP Nomor 20 Tahun 2026 tentang Tim Efektif Proyek Perubahan Transformasi Pembinaan	13 Mei 2026

PRODUK HUKUM BPIP		TANGGAL TERBIT
	Ideologi Pancasila Berbasis Kecerdasan Buatan Dan Platform Digital Terintegrasi Pada Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	
49.	SK Sekretaris Utama BPIP Nomor 21 Tahun 2026 tentang Pemberhentian Gaji A.N. RPM	7 Juni 2026
50.	SK Sekretaris Utama BPIP Nomor 22 Tahun 2026 tentang Tim Penilaian Mandiri Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2026	7 Juni 2026
Surat Keputusan Deputy Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila		
51.	SK Deputy Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan BPIP Nomor 1 Tahun 2026 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembudayaan Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila	27 April 2026
Surat Keputusan Deputy Bidang Pengkajian dan Materi BPIP		
52.	SK Deputy Bidang Pengkajian dan Materi BPIP Nomor 1 Tahun 2026 tentang Mitra Bestari Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Volume 6 Nomor 1 Tahun 2026	6 Maret 2026
53.	SK Deputy Bidang Pengkajian dan Materi BPIP Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pembuat Artikel Bhinneka Tunggal Ika: Pancasila Jurnal Internasional Berbahasa Indonesia Volume 3 Nomor 1 Tahun 2026	11 Mei 2026
Surat Keputusan Deputy Bidang Pendidikan dan Pelatihan BPIP		

PRODUK HUKUM BPIP		TANGGAL TERBIT
54.	SK Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan BPIP Nomor 1 Tahun 2026 tentang Tim Akreditasi Penyelenggara Pendidikan Dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	20 Februari 2026
Surat Edaran Kepala BPIP		
55.	SE Kepala BPIP Nomor 1 Tahun 2026 tentang Transformasi Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	7 April 2026
56.	SE Kepala BPIP Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026	21 April
Surat Edaran Sekretaris Utama BPIP		
57.	SE Sestama BPIP Nomor 1 Tahun 2026 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara Di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Periode Pelaporan Tahun 2025	2 Januari 2026
MoU		
58.	MoU Nomor MoU.01/Ka.BPIP/01/2026 antara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Dan Kementerian Dalam Negeri tentang Sinergi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Di Bidang Pembinaan Ideologi Pancasila Dan Di Bidang Dalam Negeri	13 Maret 2026
59.	MoU Nomor MoU.02/Ka.BPIP/04/2026 antara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia	30 April 2026
PKS		
60.	Perjanjian Kerja Sama Antara Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi Dan Jaringan	30 Januari 2026

PRODUK HUKUM BPIP		TANGGAL TERBIT
	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Dengan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Masyarakat Kota Medan Nomor PKS.01/BPIP/D.I/01/2026	
61.	Perjanjian Kerja Sama Antara Deputy Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi Dan Jaringan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Dengan Perkumpulan Prodi Pendidikan Sejarah Se-Indonesia tentang Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila Melalui Penguatan Sejarah Pancasila Nomor PKS.02/BPIP/D.I/02/2026	5 Februari 2026
62.	Perjanjian Kerja Sama Antara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Dengan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tentang Pembinaan Ideologi Pancasila Dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Nomor PKS.03/BPIP/D1/03/2026	16 Maret 2026

- Persentase rekomendasi penataan organisasi dan reformasi birokrasi yang di tindaklanjuti dilaksanakan dengan rincian *output* Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal. Hal ini sesuai dengan Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPIP sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPIP Nomor 4 Tahun 2023, tugas dan fungsi dalam kaitannya dengan pemberian layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal meliputi 4 (empat) klasifikasi utama sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Penataan Organisasi

Penataan organisasi menurut Peraturan Menteri PANRB terbaru, seperti PermenPANRB No. 7 Tahun 2023, diarahkan pada penyederhanaan birokrasi agar instansi pemerintah menjadi lebih lincah, efisien, dan adaptif. Salah satu langkah utamanya adalah penyederhanaan struktur organisasi dengan mengurangi jenjang jabatan struktural dan mengalihkan sebagian besar jabatan administrasi ke jabatan fungsional. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pengambilan keputusan, memperkuat profesionalisme ASN, serta meningkatkan kinerja berbasis hasil (*output* dan *outcome*).

Selain itu, penataan organisasi juga mencakup penerapan sistem kerja berbasis tim dan proyek (*team-based working*), pemanfaatan teknologi digital, serta penguatan peran jabatan fungsional. Instansi pemerintah didorong untuk membentuk tim kerja lintas unit yang fleksibel dan berbasis target, sekaligus memanfaatkan sistem digital untuk mendukung fleksibilitas dan transparansi. dengan pendekatan ini, diharapkan struktur organisasi pemerintah lebih dinamis dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan responsif terhadap perubahan. Capaian Kinerja Pada Triwulan II Tahun 2026 adalah Menyusun Draft Perubahan Keputusan Kepala tentang Peta Proses Bisnis. Progres dari penyusunan draf perubahan Keputusan Kepala tentang Peta Proses Bisnis sampai saat ini masih dalam tahap pengumpulan dari unit kerja, mengingat belum seluruh unit menyampaikan dokumen dimaksud. Secara umum,

peta proses bisnis akan memuat alur proses kerja dan keterkaitan antar unit dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Langkah strategi untuk ke depannya akan dilakukan koordinasi dan rapat guna percepatan konsolidasi sebagai langkah menuju finalisasi dan penetapan dokumen, serta akan dilakukan perubahan Proses Bisnis untuk melakukan penyesuaian dengan Rencana Strategis BPIP tahun 2025 – 2029. Menyusun Draft Laporan Rencana Tindak Lanjut Kelembagaan

b. Pelaksanaan Tata Kelola Internal

1. Tata Kelola Administrasi Biro Hukum dan Organisasi

Kinerja yang dilakukan terkait ketatusahaan adalah urusan tata usaha dan rumah tangga serta penyiapan laporan berkala mengenai pertanggungjawaban kinerja dan anggaran Biro Hukum dan Organisasi.

Biro Hukum dan Organisasi di dalam Korespondensi yang terdiri Surat Masuk dan Surat Keluar mengalami perubahan terdiri dari Jumlah Kualitas dan Kuantitas. Didalam surat masuk yang meliputi nota dinas, memorandum, undangan, surat perintah, surat edaran, surat keputusan, intruksi atau surat edaran dari unit kerja lain. Surat Keluar terdiri dari nota dinas, memorandum, sprint, undangan, dan surat keluar biasa.

2. Kepuasan Layanan Biro Hukum

Dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Biro Hukum dan Organisasi sebagai salah satu penyedia dukungan

manajemen di Sekretariat Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, maka perlu diselenggarakan survei kepuasan masyarakat (SKM) terhadap penilaian pengguna layanan terhadap pelayanan yang diberikan. dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil Survei Kepuasan *stakeholder* yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan *stakeholder* dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat *stakeholder*, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

c. Perencanaan Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan upaya strategis untuk meningkatkan kinerja aparatur negara agar lebih profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Untuk memperkuat arah dan pelaksanaan reformasi ini, pemerintah telah menetapkan *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020–2024 melalui Peraturan Menteri PANRB No. 25 Tahun 2020, yang kemudian disempurnakan dengan PermenPANRB No. 3 Tahun 2023. Perubahan ini bertujuan untuk menyesuaikan fokus reformasi dengan kondisi aktual, memperjelas hubungan sebab-akibat antara program reformasi dan dampaknya terhadap pembangunan nasional, serta mendorong birokrasi yang lebih adaptif dan berdaya saing.

Selain itu, untuk memastikan efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi, pemerintah mengeluarkan PermenPANRB No. 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi

Reformasi Birokrasi. Peraturan ini menggantikan PermenPANRB No. 26 Tahun 2020 dan menetapkan kerangka evaluasi yang lebih terukur dan berorientasi pada hasil. Melalui evaluasi ini, instansi pemerintah diharapkan dapat secara berkala menilai kemajuan reformasi yang telah dilakukan, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, dan merumuskan langkah-langkah perbaikan untuk mencapai birokrasi yang efektif dan efisien. Ruang Lingkup Implementasi RB BPIP yaitu:

- a) Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi Tahun 2024. Monitoring dilakukan sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk memastikan perbaikan kinerja birokrasi secara sistematis dan berdampak nyata.
- b) RB General adalah upaya perbaikan tata kelola pemerintahan yang berfokus pada penyelesaian permasalahan hulu terkait masalah umum birokrasi melalui berbagai kebijakan kementerian/lembaga ditingkat Meso. Sasaran dan agenda RB General mencakup transformasi tata kelola birokrasi secara umum, yang saling melengkapi dan mempengaruhi satu sama lain untuk mencapai tujuan RB dan Pembangunan.
- c) RB Tematik adalah upaya percepatan pencapaian dampak berbagai agenda prioritas pembangunan nasional dengan mengurai dan menjawab untuk mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan (*debottlenecking*) yang terkait tema yang sudah ditetapkan oleh tingkat makro. RB Tematik diarahkan untuk menyelesaikan akar permasalahan tata kelola di sektor-sektor prioritas sehingga berdampak langsung bagi kebijaksanaan

masyarakat meliputi:

1. RB Pengentasan Kemiskinan;
2. RB Peningkatan Investasi;
3. RB mendorong Hilirisasi;
4. RB Mendorong peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan;
5. RB Mendukung Ketahanan Pangan Nasional;
6. RB Mendorong Peningkatan Akses, Kualitas dan Mutu Pendidikan

Adapun Capaian RB Triwulan II Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

PENATAAN ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI

1.	Draft Perubahan Keputusan Kepala tentang Peta Proses Bisnis. Progres dari penyusunan draf perubahan Keputusan Kepala tentang Peta Proses Bisnis sampai saat ini masih dalam tahap pengumpulan dari unit kerja, mengingat belum seluruh unit menyampaikan dokumen dimaksud. Secara umum, peta proses bisnis akan memuat alur proses kerja dan keterkaitan antar unit dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Langkah strategi untuk ke depannya akan dilakukan koordinasi dan rapat guna percepatan konsolidasi sebagai langkah menuju finalisasi dan penetapan dokumen, serta akan dilakukan perubahan Proses Bisnis untuk melakukan penyesuaian dengan Rencana Strategis BPIP tahun 2025 s.d. 2029.
2.	Draft Laporan Hasil Pelaksanaan RB Tahun 2025. Progres penyusunan draf Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2025 telah dilaksanakan dan saat ini menunggu surat resmi hasil evaluasi dari Kementerian PANRB.

Tabel 2. 53 Aktivitas Kegiatan Terlaksananya Koordinasi Produk Hukum, Organisasi dan Tata Laksana, serta Reformasi Birokrasi

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Penyusunan Rancangan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila (Jakarta, tanggal 2 April 2026)	
2.	Bimbingan Teknis (Bimtek) Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Analisis dan Evaluasi, Regulatory Impact Assesment (RIA), (Bogor, tanggal 8 s.d. 9 April 2026)	
3.	Penyusunan Rancangan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Pedoman Pengelolaan Keikutsertaan Pegawai ASN BPIP dalam Uji Kompetensi Jabatan Fungsional (Jakarta, tanggal 10 April 2026)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
4.	Koordinasi Penyusunan Rancangan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Pedoman Pengelolaan Keikutsertaan Pegawai ASN BPIP dalam Uji Kompetensi Jabatan Fungsional (Jakarta, tanggal 13 April 2026)	
5.	Lanjutan Rapat Koordinasi Penyusunan Rancangan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Pedoman Pengelolaan Keikutsertaan Pegawai ASN BPIP dalam Uji Kompetensi Jabatan Fungsional (Jakarta, tanggal 14 April 2026)	
6.	Penyusunan Peta Proses Bisnis di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi dengan Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan, dan Biro Perencanaan dan Keungan (Jakarta, tanggal 20 April 2026)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
7.	Evaluasi Penyusunan Peta Proses Bisnis di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi dengan Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi, dan Biro Umum dan Sumber Daya Manusia (Jakarta, tanggal 21 April 2026)	
8.	Peta Proses Bisnis di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi dengan Deputi Bidang Pengkajian dan Materi, dan Biro Fasilitas Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi (Jakarta, tanggal 22 April 2026)	
9.	Rapat Tindak Lanjut Pengumpulan Data Dukung Indeks Reformasi Hukum (IRH) (Jakarta, tanggal 22 April 2026)	
10.	Evaluasi Penyusunan Peta Proses Bisnis di Lingkungan BPIP dengan Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan, dan Biro Pengawasan Internal (Jakarta, tanggal 23 April 2026)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
11.	Evaluasi Penyusunan Peta Proses Bisnis di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi dengan Biro Hukum dan Organisasi (Jakarta, tanggal 24 April 2026)	
12.	Evaluasi Penyusunan Peta Proses Bisnis di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi dengan Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi, dan Biro Pusat data dan Teknologi Informasi (Jakarta, tanggal 27 April 2026)	
13.	Pembahasan Proses Bisnis Organisasi dan Tata Laksana dan Deputi Bidang Pengkajian Materi (Jakarta, tanggal 7 Mei 2026)	
14.	Koordinasi Penyusunan Peta Proses Bisnis di Kedeputan Pendidikan dan Pelatihan (Jakarta, tanggal 8 Mei 2026)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
15.	Rapat Lanjutan Evaluasi Peta Proses Bisnis di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2026 (Garut, tanggal 19 s.d. 21 Mei 2026)	
16.	Finalisasi Rancangan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Bantuan Hukum di Lingkungan BPIP dan Rancangan Peraturan BPIP tentang Advokasi PIP (Yogyakarta, tanggal 2 s.d. 3 Juni 2026)	
17.	Penyusunan Rancangan PerBPIP tentang Pembentukan Produk Hukum Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Penyusunan SOP Persetujuan Produk Hukum oleh Unsur Pimpinan (Jakarta, tanggal 9 s.d. 10 Juni 2026)	
18.	Penelaahan Pernyataan dan Data Dukung Dalam Rangka Penilaian Kapabilitas Kelembagaan pada Instansi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Bandung, tanggal 17 s.d. 19 Juni 2026)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
19.	Pembahasan Rancangan PerBPIP tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Jakarta, tanggal 26 Juni 2026)	

F.3. Pelaksanaan Layanan Kerumahtanggaan, Pengelolaan BMN, dan Manajemen SDM Kepada Unit Kerja

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pelaksanaan layanan kerumahtanggaan, pengelolaan BMN, dan manajemen SDM kepada unit kerja Pada Pada Triwulan II Tahun 2026 adalah:

Tabel 2. 54 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Layanan Kerumahtanggaan, Pengelolaan BMN, dan Manajemen SDM kepada Unit Kerja

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Persentase pemenuhan kepada unit kerja atas layanan kerumahtanggaan, layanan pengelolaan BMN, dan layanan manajemen SDM	Layanan Manajemen Aset	1	50%	50% (Layanan)
	Layanan BMN	1	50%	50% (Layanan)
	Layanan Umum	1	50%	50% (Layanan)
	Layanan Perkantoran	1	50%	50% (Layanan)
	Layanan Sarana Internal	963	507 Unit	52,63% (unit)
	Layanan Manajemen SDM	441	155 Orang	35,15% (Layanan)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	95	139 Orang	146,3% (Layanan)

Perhitungan kinerja pelaksanaan manajemen program, keuangan dan kinerja adalah periodisasi waktu pelayanan yang dilakukan selama 12 bulan (satu tahun) dan pelaporan-pelaporan yang diberikan setiap bulannya kepada instansi pembina. Pada Triwulan II Tahun 2026 telah terlaksana layanan selama 6 bulan dari 12 bulan yang dimana jika dipersentasikan adalah sebesar 50%. Beberapa capaian tersebut didukung sebagai berikut:

1. Bagian Manajemen Barang Milik Negara, Layanan Pengadaan, dan Rumah Tangga

1.1. Layanan BMN

Dengan mengadaptasi sistem manajemen pengelolaan aset secara digital diharapkan mampu mewujudkan pengelolaan BMN yang lebih transparan, akuntabel dan mendukung visi lembaga secara optimal.

a. Penerapan Sistem Monitoring Berbasis Aplikasi

Mengembangkan atau mengoptimalkan modul aset yang memungkinkan pelaporan kondisi barang secara langsung oleh unit kerja.

b. Audit aset secara berkala

Melakukan rekonsiliasi data aset setiap semester untuk memastikan keberadaan fisik sesuai dengan nilai buku.

c. Peningkatan kapasitas SDM

Mengadakan pelatihan bagi pengelola barang di lingkungan BPIP mengenai aspek hukum pertanahan dan manajemen aset modern.

d. Manajemen ruang kantor

Mengadopsi konsep smart office atau penataan ruang yang

lebih efisien berdasarkan rasio jumlah pegawai, berkaca pada efisiensi penggunaan gedung.

Langkah-langkah efisiensi yang telah diterapkan dalam pengelolaan kendaraan dinas BPIP. Fokus utama laporan adalah pada penurunan biaya operasional perawatan tanpa mengurangi standar keselamatan dan kesiapan armada.

Terdapat penurunan total biaya perawatan kendaraan operasional yang cukup signifikan sebesar 28% dikarenakan adanya aturan terbaru terkait efisiensi dibulan sebelumnya penghematan biaya pembelian bahan bakar minyak untuk kendaraan dinas tetap sama dengan bulan Juni 2026 tidak mengalami penurunan dikarenakan adanya adanya penyesuaian atau kenaikan harga BBM nonsubsidi di pasaran yang membuat alokasi anggaran tetap demi memenuhi volume kebutuhan yang sama.

Meskipun langkah efisiensi preventif telah berjalan, nominal ini bersifat dinamis dan berpotensi mengalami penurunan yang lebih tajam (efisiensi naik) atau sebaliknya, bergantung pada intensitas mobilitas, frekuensi perjalanan dinas luar kota, dan volume kegiatan operasional.

Analisis Faktor Keberhasilan

a. Pergeseran Paradigma Pemeliharaan

Pengalihan fokus dari perbaikan “kerusakan besar” menjadi pemeliharaan preventif yang ketat. Dengan melakukan service rutin tepat waktu, kerusakan komponen vital yang berbiaya mahal dapat dihindari sejak dini.

b. Kontrak Harga Satuan (KHS) dengan Bengkel resmi

Implementasi kerjasama dengan jaringan bengkel resmi terpilih memberikan harga diskon suku cadang dan jasa yang lebih kompetitif dibandingkan dengan mekanisme perbaikan per kasus.

c. Pengawasan Digital Berbasis GPS

Pemanfaatan sistem monitoring perjalanan membantu dalam optimalisasi rute kendaraan, sehingga mengurangi konsumsi BBM dan beban kerja komponen mesin kendaraan

2. Layanan Pengadaan

- a. Dalam rangka pengembangan inovasi dan peningkatan kualitas layanan pengadaan, Sub Bagian Layanan Pengadaan atau UKPBJ BPIP melaksanakan kegiatan benchmarking pengembangan konsep Aplikasi E-UKPBJ ke UKPBJ Kabupaten Badung pada 14–16 April 2026. Kegiatan ini bertujuan untuk berbagi praktik terbaik dan memperoleh masukan dalam pengembangan sistem digital pengadaan yang efektif, transparan, dan akuntabel guna mendukung tata kelola pengadaan yang modern dan berintegritas.
- b. Kegiatan Sub Bagian Layanan Pengadaan atau UKPBJ BPIP dengan Menghadiri Peringatan HUT ke-10 IFPI pada tanggal 23 – 24 April 2026 menjadi momentum untuk memperkuat kompetensi dan integritas SDM Pengadaan Barang/Jasa sebagai fondasi dalam mewujudkan pengelolaan pengadaan yang profesional, transparan, dan akuntabel.
- c. Kegiatan Sub Bagian Layanan Pengadaan atau UKPBJ BPIP dengan menyelenggarakan Webinar Sinergi Literasi dan Kapasitas Pengadaan pada 29 April 2026 dengan tema: "Bimbingan Teknis Penyusunan Identifikasi Kebutuhan dan Analisis Pasar di Lingkungan BPIP" Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan yang tepat sasaran, efektif, dan akuntabel.
- d. Kegiatan Bimbingan Teknis Pelatihan Kompetensi Pokja Pemilihan untuk Peningkatan Akuntabilitas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan BPIP yang di adakan pada tanggal 12 s.d. 13 Mei 2026 yang di ikuti oleh Sub Bagian Layanan Pengadaan atau UKPBJ BPIP
- e. Kegiatan Sub Bagian Layanan Pengadaan atau UKPBJ BPIP berpartisipasi dalam kegiatan Percepatan Penerapan 17 Standar

LPSE yang diselenggarakan oleh LKPP pada 9–10 Juni 2026 di Jakarta. Kegiatan ini bertujuan memperkuat implementasi standar layanan LPSE serta meningkatkan kualitas layanan pengadaan elektronik dalam mendukung transformasi digital pengadaan pemerintah yang transparan, akuntabel, dan profesional.

- f. Pelaksanaan anggaran Sub Bagian Layanan Pengadaan atau UKPBJ BPIP pada triwulan ke dua telah mencapai 89,26% dengan nilai realisasi Rp 291.463.581 dari total anggaran Rp 326.533.000, yang terdiri dari tiga sub komponen yaitu Pelaksanaan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (EBA.962.054.0A), Pengembangan Kelembagaan UKPBJ (EBA.962.054.0B) dan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (EBA.962.054.0C)
- g. Rekap pengadaan Triwulan 2 Data pengadaan yang diperoleh dari bulan April sampai Juni jumlah paket pengadaan berdasarkan metode yang digunakan. Dari data yang terlihat, metode "E-Purchasing" mendominasi dengan total 33 paket, lebih tinggi dibandingkan metode Dikecualikan dengan 28 paket.

3. Layanan Umum

a. Belanja Keperluan Perkantoran (Jamuan dan Langganan Internet)

Kegiatan ini meliputi penyediaan konsumsi (makanan dan minuman) untuk rapat-rapat internal maupun eksternal, kegiatan koordinasi, serta pertemuan kedinasan lainnya. Selain itu, dilakukan pembayaran langganan internet guna mendukung kelancaran komunikasi, akses informasi, serta pelaksanaan pekerjaan berbasis digital di lingkungan kantor. Ketersediaan layanan internet yang stabil menjadi faktor penting dalam menunjang efektivitas kerja pegawai.

b. Belanja Sewa

Belanja sewa dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan ruang dan peralatan yang belum tersedia secara permanen, dengan rincian:

- Sewa Gudang BMN dan Persediaan
Digunakan untuk penyimpanan Barang Milik Negara dan persediaan agar tertata dengan baik dan aman.
- Sewa Gudang Arsip
Untuk penyimpanan dokumen dan arsip penting sesuai dengan standar kearsipan.
- Sewa Alat Pengolah Data
Mendukung kebutuhan perangkat teknologi informasi guna menunjang pekerjaan administrasi dan pengolahan data.
- Sewa Mesin Fotokopi
Digunakan untuk mendukung kebutuhan penggandaan dokumen secara efisien

c. Belanja Jasa Event Organizer

Digunakan untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan kelembagaan seperti rapat koordinasi, sosialisasi, dan acara resmi lainnya. Jasa event organizer mencakup perencanaan acara, penyediaan perlengkapan, pengaturan teknis pelaksanaan, hingga dukungan operasional selama kegiatan berlangsung.

d. Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Kegiatan ini meliputi perawatan rutin serta perbaikan gedung kantor dan fasilitas pendukung, seperti perbaikan instalasi listrik, air, pendingin ruangan, serta pengecatan dan perbaikan minor lainnya. Tujuannya adalah untuk menjaga kondisi gedung tetap layak fungsi, aman, dan nyaman bagi seluruh pegawai.

e. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Dilaksanakan untuk memastikan seluruh peralatan kerja dan mesin operasional dalam kondisi baik dan siap digunakan. Kegiatan ini meliputi servis rutin, penggantian suku cadang,

serta perbaikan atas kerusakan peralatan seperti komputer, printer, AC, dan peralatan kantor lainnya.

f. Belanja Jasa Lainnya (Tenaga *Outsource*)

Kegiatan ini mencakup penyediaan tenaga pendukung operasional melalui pihak ketiga, yang terdiri dari:

- Tenaga Keamanan: Bertugas menjaga keamanan lingkungan kantor.
- Pengemudi: Mendukung mobilitas pimpinan dan kegiatan kedinasan.
- Petugas Kebersihan: Menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan kerja.
- Tenaga Administrasi: Membantu pelaksanaan tugas administratif di unit kerja. Keberadaan tenaga *outsource* sangat penting untuk mendukung kelancaran operasional sehari-hari.

g. Belanja Sewa Kendaraan Dinas

Digunakan untuk mendukung mobilitas kegiatan operasional dan kedinasan, terutama dalam hal kegiatan lapangan, koordinasi antar instansi, serta kebutuhan transportasi pimpinan dan pegawai. Sewa kendaraan dilakukan untuk memastikan ketersediaan sarana transportasi yang memadai tanpa harus menambah aset tetap.

Bagian Umum juga telah melaksanakan layanan perkantoran dan sarana internal yang dimana layanan tersebut merupakan pelayanan pemenuhan kebutuhan rutin kantor yang kegiatannya sebagai berikut:

- Belanja Keperluan Perkantoran
- Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (ATK, Cartridge toner, Buku dan Plakat)
- Belanja Sewa (Sewa Gudang BMN dan persediaan, sewa gudang arsip, sewa alat pengolah data dan sewa mesin

fotocopy)

- Belanja Jasa Event Organizer (Jasa Lainnya)
- Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
- Pengecatan Gedung BPIP
- Pemeliharaan gedung dan bangunan
- Pemeliharaan peralatan dan mesin
- Belanja jasa lainnya tenaga outsource
- Belanja sewa kendaraan dinas
- Layanan pengiriman surat
- Dana Operasional Pimpinan
- Honorarium pengelola APBN
- Belanja perjalanan dinas pimpinan

4. Bagian Sumber Daya Manusia

Pada tanggal 30 April 2026 Bagian Sumber Daya Manusia melalui Subbagian Mutasi dan Pengembangan telah melaksanakan kegiatan pembahasan terkait mekanisme perhitungan angka kredit serta kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Arsiparis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai pembinaan karier jabatan fungsional, pengembangan kompetensi, dan pengelolaan sumber daya manusia secara profesional. Selain itu, dilaksanakan pembahasan terhadap lampiran dokumen *Human Capital Development Program* (HCDP) sebagai bagian dari penyusunan perencanaan pengembangan SDM yang terintegrasi dan berkelanjutan guna mendukung implementasi manajemen talenta di lingkungan BPIP.

Bagian Sumber Daya Manusia telah melakukan Benchmark Pengembangan Kompetensi melalui Coaching dan

Mentoring pada 13 Mei 2026 di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kementerian Keuangan. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh referensi dan praktik baik (*best practice*) dalam implementasi *coaching*, *mentoring*, dan *counseling* sebagai metode pengembangan kompetensi ASN yang terintegrasi dengan sistem manajemen kinerja.

Melalui diskusi dan berbagi pengalaman, diperoleh pemahaman mengenai mekanisme penyelenggaraan *coaching* dan *mentoring*, integrasinya dengan dialog kinerja individu dan manajemen talenta, strategi membangun budaya *coaching* di lingkungan kerja, serta sistem monitoring dan evaluasi program. Hasil *benchmark* menjadi bahan masukan bagi Bagian SDM dalam menyusun kebijakan serta mengembangkan program *coaching* dan *mentoring* di lingkungan BPIP agar lebih terstruktur, terukur, berkelanjutan, dan selaras dengan kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai.

Pada tanggal 17 s.d. 22 Mei 2026 telah dilaksanakan pendampingan dan monitoring penyelenggaraan Pelatihan Teknis Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN): Penguatan Budaya Kerja dan Citra Institusi serta Orientasi PPPK di Bogor, Jawa Barat. Kegiatan ini bekerja sama dengan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Kepegawaian Negara (Pusbang SDM BKN). Kegiatan diikuti oleh 30 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan BPIP dengan metode *blended learning* yang terdiri atas pembelajaran nonklasikal dan klasikal.

Pendampingan yang dilakukan meliputi koordinasi dengan penyelenggara, monitoring kehadiran peserta, fasilitasi proses pembelajaran, pengawasan kesiapan sarana dan prasarana, serta penanganan kendala teknis selama pelaksanaan kegiatan.

Hasil pendampingan menunjukkan bahwa seluruh rangkaian pelatihan terlaksana sesuai jadwal, seluruh peserta mengikuti kegiatan hingga selesai, dan materi pembelajaran dapat disampaikan secara optimal sehingga mendukung peningkatan kompetensi teknis dan manajerial, penguatan nilai dasar ASN BerAKHLAK, serta pembentukan karakter PPPK yang profesional, berintegritas, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Bagian Sumber Daya Manusia melalui Subbagian Mutasi dan Pengembangan menyelenggarakan rapat Penyampaian Penerapan Aplikasi Presensi Pegawai BPIP dan Pembahasan Dokumen Human Capital Development Plan (HCDP) pada 3 Juni 2026 di Ruang Rapat Utama Lantai 1 BPIP yang diikuti oleh 46 pejabat dan pegawai dari unit kerja di lingkungan BPIP. Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan mekanisme penerapan aplikasi presensi sebagai upaya penguatan tata kelola administrasi kepegawaian dan pembinaan disiplin pegawai, sekaligus membahas penyusunan dokumen *Human Capital Development Plan* sebagai acuan pengembangan kompetensi dan perencanaan sumber daya manusia yang terintegrasi.

Melalui kegiatan ini diharapkan terwujud kesamaan pemahaman antarunit kerja dalam implementasi sistem presensi serta penyelarasan kebijakan pengembangan SDM guna mendukung penerapan manajemen talenta dan peningkatan kinerja organisasi. Kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi penggunaan aplikasi baru untuk setiap unit kerja pada tanggal 8 s.d. 12 Juni 2026. Subbagian Mutasi dan Pengembangan melaksanakan koordinasi penyusunan Human Capital Development Plan (HCDP) melalui penyampaian permohonan verifikasi dan validasi terhadap dokumen Rumpun,

Fungsi, dan Peran Jabatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan BPIP. Hal ini bertujuan memperoleh masukan dan penyempurnaan klasifikasi jabatan agar sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing unit, sehingga dapat menjadi landasan yang akurat dalam penyusunan rencana pengembangan kompetensi pegawai untuk lima tahun ke depan.

Melalui proses verifikasi dan validasi tersebut diharapkan tersusun klasifikasi rumpun jabatan yang komprehensif sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengembangan kompetensi, sekaligus mendukung implementasi manajemen talenta serta pengembangan sumber daya manusia yang terarah, terukur, dan selaras dengan kebutuhan organisasi.

Pada tanggal 24 Juni 2026 diselenggarakan kegiatan Kupas Tuntas Pengelolaan Sumber Daya Manusia BPIP di Ruang Rapat Utama BPIP secara hybrid. Kegiatan ini menjadi forum pembahasan strategis mengenai penguatan pengelolaan SDM berbasis sistem merit dan manajemen talenta, implementasi pengembangan kompetensi pegawai melalui pendekatan 10-20-70, percepatan penyusunan program coaching dan mentoring, serta penguatan kebijakan pengembangan karier dan pelatihan bagi ASN di lingkungan BPIP.

Melalui kegiatan ini diperoleh berbagai masukan dari pimpinan dan unit kerja sebagai bahan penyempurnaan kebijakan pengelolaan SDM, termasuk penguatan kompetensi CPNS dan Jabatan Fungsional, penerapan aplikasi presensi, serta penyelarasan program pengembangan sumber daya manusia agar lebih terarah, adaptif, dan selaras dengan kebutuhan organisasi

Bagian SDM juga telah melakukan koordinasi dengan beberapa instansi sebagai berikut:

1. BKN terkait Orientasi PPPK
2. LAN terkait Koordinasi Pelatihan Advokasi Kebijakan Publik
3. BPJS terkait Koordinasi Rekonsiliasi Data Kepesertaan PPNPN/PPPK

Selain itu, Bagian SDM telah memberikan layanan Manajemen SDM terkait administrasi kepegawaian sebagai berikut:

- 1) Layanan Kenaikan Pangkat (Total 14 orang)
 - a. April 2026 : 6 orang
 - b. Mei 2026 : 4 orang
 - c. Juni 2026 : 4 orang
- 2) Layanan Kenaikan Gaji Berkala (Total 12 Orang)
 - a. April 2026 : 6 orang
 - b. Mei 2026 : 4 orang
 - c. Juni 2026 : 4 orang
- 3) Layanan Pensiun : 1 orang
- 4) Layanan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pegawai (Total 19 orang)
 - a. Uji Kompetensi Perencana Ahli Pertama : 3 orang
 - b. Uji Kompetensi Perencana Ahli Muda : 2 orang
 - c. Uji Kompetensi Pranata Humas Ahli Pertama : 1 orang
 - d. Uji Kompetensi Pranata Komputer Ahli Muda : 1 orang
 - e. Inpassing Analis Kerja Sama : 4 orang
 - f. Uji Kompetensi Auditor Ahli Muda : 3 orang
 - g. Uji Kompetensi PUU Ahli Madya : 1 orang
 - h. Uji Kompetensi PUU Ahli Muda : 2 orang
 - i. Uji Kompetensi PUU Ahli Pertama : 1 orang
 - j. Uji Kompetensi Analis Hukum Ahli Madya : 1 orang

Bagian SDM juga telah memberikan Layanan Pendidikan dan Pelatihan kepada pegawai di lingkungan BPIP sebagai berikut:

No	Nama Pelatihan	Jumlah Peserta	Tanggal Pelaksanaan	Penyelenggara
1	Pelatihan Khusus Analisis Kebijakan Angkatan 53	1	9 April s.d 5 Mei 2026	LAN
2	Pelatihan Advokasi Kebijakan Angkatan VII	2	13 s.d. 17 April 2026	LAN
3	Pelatihan Teknis MASN dan Orientasi PPPK BPIP Klasikal	30	20 April s.d. 22 Mei 2026	BKN
4	Pelatihan Teknis Manajemen Talenta Angkatan IV	9	25 Mei s.d. 8 Juni 2026	BKN
5	Pelatihan Pembelajaran Berbasis Digital AI	10	8 s.d. 12 Juni 2026	LAN
6	Pelatihan Fungsional Arsiparis	2	4 Mei s.d. 3 Juli 2026	ANRI
7	Pelatihan Keprotokolan	3	19 s.d. 25 Juni 2026	PPASN Kemensetneg
8	Pelatihan Manajemen Talenta	4	22 s.d. 25 Juni 2026	LAN
9	Pelatihan Fungsional Penguatan Pranata Komputer Kategori Keahlian	13	20 April s.d. 12 Juni 2026	BPS
10	Pelatihan Fungsional Auditor Ahli Muda	1	9 Juni s.d. 17 Juli 2026	BPKP
11	Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA)	1	17 Juni s.d. 30 Oktober 2026	BPS

No	Nama Pelatihan	Jumlah Peserta	Tanggal Pelaksanaan	Penyelenggara
12	Pelatihan Komunikasi Persuasif	1	12 s.d. 13 Mei 2026	LKPP
13	Bimbingan Teknis Pelatihan Pokja Pemilihan	9	11 s.d. 21 Mei 2026	LPKN
14	Pelatihan Fungsional Analisis Hukum Ahli Pertama Angkatan XII Tahun 2026	1	2 Juni s.d. 14 Juli 2026	BPSDMKUM KEMENKUM
15	Pelatihan Fungsional ASDMA Angkatan 3	1	22 Juni s.d. 19 Juli 2026	PUSBANG BKN
16	Pelatihan Fungsional Analisis Hukum Ahli Pertama Angkatan XII Tahun 2026	1	2 Juni s.d. 14 Juli 2026	BPSDMKUM KEMENKUM
17	Pelatihan Fungsional ASDMA Angkatan 3	1	22 Juni s.d. 19 Juli 2026	PUSBANG SDM BKN
JUMLAH		121		

Aktivitas dan foto dokumentasi dalam rangka capaian kinerja layanan kerumahtanggaan, pengelolaan BMN, dan manajemen SDM kepada unit kerja pada Triwulan II Tahun 2026 adalah:

**Tabel 2. 55 Aktivitas Pelaksanaan Layanan
Kerumahtanggaan, Pengelolaan BMN, dan Manajemen SDM
Kepada Unit Kerja**

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Kegiatan Layanan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	
2.	Kegiatan Layanan Dukungan Voucher Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	
3.	Sosialisasi Evaluasi Kinerja Triwulan di Jakarta (Jakarta, tanggal 1 April 2026)	
4.	Koordinasi Perumusan Kamus Kompetensi Teknis dan Standar Kompetensi Jabatan Manajerial di Pemerintah Kota Tangerang (Jakarta, tanggal 2 April 2026)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
5.	Strategi Penatausahaan Aset Paada Laporan Keuangan Dalam Rangka Mempertahankan Opini WTP di Bogor (Bogor, tanggal 6 s.d. 9 April 2026)	
6.	Koordinasi Perumusan Kamus Kompetensi Teknis dan Standar Kompetensi Jabatan Manajerial di Pemerintah Kota Tangerang (Tangerang, tanggal 8 April 2026)	
7.	Koordinasi Pembahasan Nota Kesepahaman (MoU) Pelaksanaan Orientasi PPPK di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Bogor, tanggal 9 April 2026)	
8.	Koordinasi Tindaklanjut Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Manajerial di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan KemenPANRB (Jakarta, tanggal 13 April 2026)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
9.	Pembahasan Final Aplikasi Presensi Pegawai di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Jakarta, tanggal 14 April 2026)	
10.	Studi Komparatif Pengelolaan BMN dan Persediaan Pada Pemerintahan Kabupaten Semarang (Semarang, tanggal 14 s.d. 16 April 2026)	
11.	Koordinasi terkait Administrasi Kehadiran Peserta Pelatihan Advokasi Kebijakan Publik Angkatan VII Tahun 2026 di LAN (Jakarta, tanggal 17 April 2026)	
12.	Pembahasan Proses Bisnis Pengembangan Aplikasi Presensi BPIP (Jakarta, tanggal 20 April 2026)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
13.	Layanan Pengadaan atau UKPBJ BPIP dengan Menghadiri Peringatan HUT ke-10 IFPI (Jakarta, tanggal 23 s.d. 24 April 2026)	
14.	Koordinasi Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja melalui E-Kinerja dan Integrasi Data Kepegawaian pada Aplikasi Sistem Informasi Arsip Data Pegawai (SIATAP) BPIP dengan SIASN BKN di Jakarta (Jakarta, tanggal 29 April 2026)	
15.	Layanan Pengadaan atau UKPBJ BPIP menyelenggarakan Webinar Sinergi Literasi dan Kapasitas Pengadaan dengan tema: "Bimbingan Teknis Penyusunan Identifikasi Kebutuhan dan Analisis Pasar di Lingkungan BPIP" (Jakarta, tanggal 29 April 2026)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
16.	Koordinasi Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja melalui E-Kinerja dan Integrasi Data Kepegawaian pada Aplikasi Sistem Informasi Arsip Data Pegawai (SIATAP) BPIP dengan SIASN BKN di Jakarta (Jakarta, tanggal 30 April 2026)	
17.	Koordinasi Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja melalui E-Kinerja dan Integrasi Data Kepegawaian pada Aplikasi Sistem Informasi Arsip Data Pegawai (SIATAP) BPIP dengan SIASN BKN di Jakarta (Jakarta, tanggal 5 s.d.6 Mei 2026)	
18.	<i>Benchmarking</i> Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja secara Elektronik (Jakarta, tanggal 7 Mei 2026)	
19.	Pembentukan Tim Efektif Dalam Rangka Pelaksanaan Transformasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia melalui <i>Coaching and Mentoring</i> (Jakarta, tanggal 11 Mei 2026)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
20.	Bimbingan Teknis Pelatihan Kompetensi Pokja Pemilihan untuk Peningkatan Akuntabilitas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan BPPI yang di adakan (Jakarta, tanggal 12 s.d. 13 Mei 2026)	
21.	<i>Benchmark</i> Pengembangan Kompetensi Melalui Coaching dan Mentoring di Pusdiklat Kementerian Keuangan (Jakarta, tanggal 13 Mei 2026)	
22.	Persiapan <i>Database</i> Pengelolaan Kinerja Guna Mendukung Program <i>Coaching and Mentoring</i> (Jakarta, tanggal 18 Mei 2026)	
23.	Pembekalan Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui <i>Coaching and Mentoring</i> (Jakarta, tanggal 19 Mei 2026)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
24.	Pelatihan Teknis Manajemen ASN: Penguatan Budaya Kerja dan Citra Institusi serta Orientasi PPPK bagi pegawai di lingkungan BPIP (Bogor, tanggal 17 s.d. 22 Mei 2026)	
25.	Penyampaian Penerapan Aplikasi Presensi Pegawai BPIP dan Pembahasan Dokumen <i>Human Capital Development Plan</i> (Jakarta, tanggal 3 Juni 2026)	
26.	Koordinasi terkait Pengembangan Sumber Daya Manusia di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Jakarta, tanggal 4 Juni 2026)	
27.	Koordinasi Pembentukan Peraturan dan Kebijakan di Bidang Kepegawaian (Jakarta, tanggal 10 Juni 2026)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
28.	Layanan Pengadaan atau UKPBJ BPIP berpartisipasi dalam kegiatan Percepatan Penerapan 17 Standar LPSE yang diselenggarakan oleh LKPP (Jakarta, tanggal 9 s.d. 10 Juni 2026)	
29.	Penelaahan Pernyataan dan Data Dukung dalam Rangka Penilaian Kapabilitas Kelembagaan pada Instansi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Bandung, tanggal 17 s.d. 19 Juni 2026)	
30.	Pembahasan Draft Peraturan Kepegawaian di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Jakarta, tanggal 23 Juni 2026)	
31.	Kegiatan Pelatihan <i>Coaching & Mentoring</i> di Jakarta (Jakarta, tanggal 29 s.d. 30 Juni 2026)	

F.4. Pelaksanaan Dukungan Teknis dan Administrasi, Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan bagi Pimpinan

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pelaksanaan dukungan teknis dan administrasi, hubungan masyarakat dan keprotokolan bagi Pimpinan pada Triwulan II Tahun 2026 adalah:

Tabel 2. 56 Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Teknis dan Administrasi, Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan bagi Pimpinan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Persentase kepuasan unsur pimpinan terhadap dukungan layanan keprotokolan dan administrasi yang diberikan	Layanan Protokoler	1	50%	50% (Layanan)
Predikat keterbukaan informasi publik BPIP	Layanan Tata Kehumasan dan Pengelolaan Informasi Publik	1	50%	50% (Layanan)
	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1	50%	50% (Layanan)
Kategori Nilai pengawasan kearsipan	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1	50%	50% (Layanan)

Perhitungan kinerja pelaksanaan manajemen fasilitasi pimpinan, hubungan masyarakat, dan administrasi adalah periodisasi waktu pelayanan yang dilakukan selama 12 bulan (satu tahun) dan pelaporan-pelaporan yang diberikan setiap bulannya kepada instansi pembina. Pada Triwulan II Tahun 2026 telah terlaksana layanan selama 6 bulan dari 12 bulan yang dimana jika dipersentasikan adalah sebesar 50%. Adapun layanan yang diberikan adalah sebagai berikut:

- Layanan Protokoler secara khusus bertanggung jawab untuk memberikan layanan kepada Pimpinan, dengan berfokus pada

kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan dan stake holder sehingga mewujudkan tingkat kepuasan terhadap layanan keprotokolan, pengamanan, dan administratif yang diberikan. Beberapa aktifitas kegiatan yang diberikan dalam layanan protokoler meliputi:

1. Pengkoordinasian Layanan Tata Usaha;
2. Pengkoordinasian Layanan Kerumahtanggaan Pimpinan;
3. Penyusunan Agenda Pimpinan;
4. Fasilitasi dan Pendampingan Acara Pimpinan;
5. Penyusunan Materi Pimpinan;
6. Penyelenggaraan Rapat Unsur Pimpinan;
7. Fasilitasi Penerimaan Tamu Pimpinan;
8. Pelaksanaan Peringatan Hari Lahir Pancasila;
9. Pelatihan Layanan Keprotokolan; dan
10. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Layanan Protokoler.

Layanan Protokoler telah dilaksanakan Pada Triwulan II Tahun 2026. Kegiatan yang dilaksanakan di seluruh Indonesia, dengan konsentrasi di wilayah DKI Jakarta dan Pulau Jawa. Adapun layanan yang dilakukan berfokus pada pendampingan Unsur Pimpinan, Pengurusan tata usaha dan rumah tangga, serta pembuatan materi (berupa *speech notes* dan/atau bahan paparan), rapat pimpinan dan protokol kegiatan Unsur Pimpinan yang sejalan dengan pendampingan unsur pimpinan.

Sepanjang Triwulan II Tahun 2026, kegiatan pendampingan Unsur Pimpinan mengalami beberapa perbaikan seperti perencanaan yang lebih terarah, pelaksanaan kegiatan yang lebih tertata dan teratur, serta adanya evaluasi terhadap layanan protokol yang dilaksanakan oleh mitra unit kerja/kementerian/ lembaga/pemerintah daerah terkait pada kegiatan-kegiatan tersebut. Perencanaan itu diwujudkan dengan rutinnnya

dilaksanakan rapat-rapat persiapan kegiatan yang dilakukan dengan mitra unit kerja/kementerian/lembaga/pemerintah daerah terkait kegiatan-kegiatan masing-masing sebelum kegiatan dilaksanakan, juga disebarkan survei terkait evaluasi dari mitra sehubungan dengan kinerja layanan keprotokolan yang sudah diberikan, sebagai wujud nyata langkah perbaikan layanan keprotokolan.

Beberapa kegiatan Triwulan II Tahun 2026 dalam bagian Tata Usaha Pimpinan dan Keprotokoleran untuk pemenuhan dari pencapaian tata usaha dan administrasi adalah penyelenggaraan Rapat Pimpinan, Rapat Terbatas dan Rapat Pleno. Adapun rapat-rapat tersebut dilaksanakan pada:

RAPAT	TANGGAL
Rapat Terbatas	14 April 2026
Rapat Pleno	15 April 2026
Rapat Pleno	13 Mei 2026
Rapat Pleno	17 Juni 2026

b. Layanan Tata Kehumasan dan Pengelolaan Informasi Publik

Layanan Tata Kehumasan dan Pengelolaan Informasi Publik menunjukkan berdasarkan data laporan capaian kinerja Triwulan II Tahun 2026, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menunjukkan performa yang sangat impresif dalam mengelola strategi komunikasi publik dan diseminasi informasi. Secara keseluruhan, upaya pembangunan citra positif lembaga dilakukan melalui pendekatan multi-kanal yang mencakup media konvensional dan digital, dengan fokus utama pada penguatan nilai-nilai kebangsaan di ruang siber.

Capaian Triwulan II Tahun 2026 menggambarkan keberhasilan BPIP dalam menjaga relevansi Pancasila di era digital. Strategi komunikasi tidak lagi hanya bersifat searah, tetapi telah bertransformasi menjadi gerakan digital yang partisipatif. Tingginya angka engagement dan dominasi sentimen positif

menunjukkan bahwa masyarakat memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja lembaga. Capaian ini menjadi fondasi yang kuat bagi Humas BPIP untuk terus meningkatkan inovasi konten pada tahun mendatang, dengan tetap mempertahankan kredibilitas di media massa arus utama dan memperkuat resonansi ideologi di ruang publik digital yang dinamis.

Dalam Penilaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) yang merupakan suatu metode evaluasi yang digunakan untuk mengukur sejauh mana lembaga publik, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun badan publik lainnya, memenuhi prinsip transparansi dalam penyediaan informasi kepada masyarakat. Penilaian ini sangat penting untuk memastikan bahwa publik memiliki akses yang cukup terhadap informasi yang berkaitan dengan kebijakan publik, pengelolaan sumber daya, dan proses administrasi negara, yang pada akhirnya mendukung akuntabilitas, partisipasi, dan pengawasan publik.

Penilaian IKIP berlandaskan pada berbagai aturan hukum yang mengatur hak akses informasi publik, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), yang mengatur hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi yang dikuasai oleh badan publik, serta kewajiban badan publik untuk menyediakan informasi tersebut. Selain itu, aturan terkait pelaksanaan keterbukaan informasi juga diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia (KIP) seperti Peraturan KIP No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Secara umum, penilaian IKIP dilakukan dengan menggunakan sejumlah indikator yang mencerminkan sejauh mana badan publik memenuhi kewajibannya dalam memberikan akses informasi yang terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat.

Indikator-indikator tersebut dapat mencakup beberapa hal sebagai berikut:

1. Ketersediaan Informasi: Mengukur sejauh mana badan publik menyediakan informasi yang wajib diumumkan secara terbuka, baik melalui website atau media lainnya, sesuai dengan ketentuan dalam UU KIP.
2. Aksesibilitas Informasi: Menilai kemudahan bagi publik dalam mengakses informasi yang disediakan, termasuk kemudahan navigasi pada situs web badan publik, serta cara dan prosedur untuk mendapatkan informasi.
3. Kualitas Informasi: Mengevaluasi kelengkapan, kejelasan, dan ketepatan waktu informasi yang disediakan oleh badan publik, apakah informasi tersebut sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Peraturan Komisi Informasi.
4. Pelayanan Permohonan Informasi: Mengukur responsivitas dan efisiensi dalam menangani permohonan informasi yang diajukan oleh masyarakat, serta apakah prosedur yang diikuti transparan dan tidak berbelit-belit.
5. Partisipasi Masyarakat: Mengidentifikasi sejauh mana masyarakat diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses penyusunan atau pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan publikasi informasi.
6. Sanksi dan Pengawasan: Melihat sejauh mana badan publik mematuhi aturan keterbukaan informasi, serta adanya mekanisme pengawasan dan sanksi yang diberlakukan jika badan publik gagal memenuhi kewajibannya.

Penilaian terhadap indikator-indikator tersebut dilakukan oleh Komisi Informasi atau lembaga independen yang ditunjuk, dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang objektif tentang tingkat keterbukaan informasi suatu badan publik. Hal ini juga

bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan informasi publik guna memperkuat demokrasi dan akuntabilitas pemerintahan di Indonesia.

Adapun beberapa hal yang sudah dilakukan oleh BPIP dalam proses penilaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik meliputi:

1. Penilaian atas sarana dan prasarana BPIP;
2. Penilaian atas kualitas informasi yang diberikan BPIP kepada publik;
3. Penilaian atas jenis informasi yang diberikan BPIP kepada publik;
4. Penilaian atas komitmen BPIP melaksanakan tugas dan fungsinya;
5. Penilaian atas inovasi dan strategi dalam BPIP; dan
6. Penilaian atas digitalisasi di lingkungan BPIP.

Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Publik Tahun 2026 masih belum dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat.

c. Layanan Penyelenggaraan Kearsipan

Pengawasan kearsipan tahun 2026 dilaksanakan meliputi pengawasan kearsipan eksternal dan pengawasan internal. Sesuai Pasal 24 Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2029 tentang Pengawasan Kearsipan dan nilai. Pengawasan Kearsipan merupakan akumulasi nilai pengawasan kearsipan eksternal dengan bobot 60% dan nilai pengawasan kearsipan internal dengan bobot 40%. Akumulasi nilai hasil pengawasan kearsipan tersebut akan diterapkan dalam pengawasan kearsipan di BPIP. Selanjutnya Nilai Hasil

Pengawasan Kearsipan menjadi acuan dalam menentukan indeks kinerja penyelenggaraan kearsipan pada BPIP.

Indikator Kinerja Tahun 2026 adalah sebagai berikut: Prosentase dokumen penyelenggaraan Pengawasan Kearsipan yang ditindaklanjuti sesuai dengan NSPK. Berdasarkan Program Kerja Pengawasan Kearsipan Tahunan (PKPKT) BPIP Tahun 2026 yang disetujui pada 8 April 2026, Biro Fasilitas Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi (Unit Kearsipan BPIP) telah melaksanakan rangkaian pengawasan kearsipan internal. Kegiatan ini bertujuan untuk menilai kesesuaian penyelenggaraan kearsipan pada unit kerja (Unit Pengolah) dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan guna menyongsong Penilaian Akhir Pengawasan Kearsipan oleh ANRI pada akhir tahun 2026.

Rangkaian audit diawali dengan Entry Meeting pada tanggal 28 April 2026, yang dilanjutkan dengan verifikasi bukti dukung secara langsung pada 18-19 Mei 2026. Pengisian Instrumen ASKI oleh Unit Pengolah: oleh 21 Unit Pengolah di lingkungan BPIP.

Verifikasi Instrumen ASKI & Bukti Dukung : Tim Pengawas Kearsipan Internal melakukan verifikasi langsung pada tanggal 18 s.d. 19 Mei 2026. Untuk Nilai Sementara Terdapat 5 unit pengolah (23,8%) yang berhasil meningkatkan nilainya dari tahun 2025. Peningkatan tertinggi dicapai oleh Biro Umum dan SDM serta Biro Pengawasan Internal yang naik 3 poin (dari 80,50 menjadi 83,50). Peningkatan lainnya ditunjukkan oleh Pusdatin (+1,53), Biro Fasilitas Pimpinan, Humas, dan Administrasi (+2,31), serta Direktorat Jaringan dan Pembudayaan (+0,89).

Unit Kerja Prioritas Pembinaan Terdapat 4 unit pengolah dengan nilai terendah (di bawah 75) setelah masa perbaikan, yaitu: Direktorat Pengkajian Materi PIP (70,77), Direktorat Analisis dan Penyelarasan (73,08), Direktorat Pengkajian Implementasi PIP (73,08), dan Direktorat Pengendalian (73,08). Unit-unit ini menjadi

fokus pembinaan intensif pada Triwulan III sebelum penilaian eksternal ANRI. Selanjutnya akan dilakukan Verifikasi Pengawasan Kearsipan Internal Bersama ANRI dan melakukan Penyusunan Laporan Audit Kearsipan Internal dan Laporan Audit Kearsipan Internal Konsolidasi.

Terhadap Audit Sistem Kearsipan Eksternal (ASKE), Biro Fasilitas Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi telah Menindaklanjuti forum on desk evaluation serta Berita Acara Klarifikasi dan Verifikasi bersama Tim Asesor ANRI pada 8 Juni 2026. Biro Fasilitas Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi selaku Unit Kearsipan BPIP melakukan tindak lanjut serangkaian intervensi perbaikan sebagai berikut yaitu Akselerasi Program Penyusutan dan Pemusnahan Arsip yang mana dilakukan BPIP yaitu melakukan penyampaian Permohonan Persetujuan Pemusnahan Arsip Badan Pembinaan Ideologi Pancasila kepada Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), dilampiri Notula Rapat Panitia Penilai Arsip 11 Juni 2026, SK Kepala BPIP Nomor 12 Tahun 2026 tentang Panitia Penilai Arsip, dan Surat Pertimbangan Panitia Penilai Arsip.

Dalam hal informasi kearsipan sebagai simpul jaringan BPIP melaksanakan pameran tematik publik, melayangkan surat resmi Nomor 88/KA.04.01/06/2026/SU.04 pada tanggal 25 Juni 2026 kepada Direktur Informasi Kearsipan ANRI perihal Permohonan Pameran Virtual pada SIKN dan JIKN dengan judul “Jejak Hari Lahir Pancasila Dari Tahun Ke Tahun” dan telah di setujui.

Beberapa kendala dan rencana tindak lanjut capaian Indikator Kinerja Terlaksananya dukungan teknis dan administrasi, hubungan masyarakat dan keprotokolan bagi Pimpinan adalah sebagai berikut:

Beberapa kendala dan rencana tindak lanjut capaian Indikator Kinerja Terlaksananya dukungan teknis dan administrasi, adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 57 Pengawasan Kearsipan

No.	Aspek	Kegiatan	Kendala/Kondisi Saat Ini	Tindak Lanjut/Perkembangan
1	Aspek Audit Sistem Kearsipan Internal (ASKI)	Audit Sistem Kearsipan Internal (ASKI)	1. Telah melakukan <i>Entry meeting</i> 2. BPIP telah melaksanakan Verivikasi Internal 3. Kendala Tata Naskah Dinas (TND): Masih ditemukan ketidak sesuaian teknis pada draf naskah dinas, seperti: ketidak sesuaian format kop surat, batas margin tepi yang tidak konsisten, kesalahan penggunaan jenis huruf (font), kelalaian nomor halaman pada lampiran, serta kerapian estetika ketikan.	1. Verifikasi Pengawasan Kearsipan Internal Bersama ANRI dan 2. Menyampaikan dokumen Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI) beserta bukti dukung (SK Tim, formulir ASKI, dan portofolio) kepada Pusat Akreditasi Kearsipan ANRI untuk proses verifikasi eksternal. 3. Tindak Lanjut Tata Naskah Dinas (TND): Perlunya penguatan fungsi verifikasi dokumen sebelum dilakukan penandatanganan elektronik.
2	Aspek Audit Sistem Kearsipan Eksternal	Audit Sistem Kearsipan Eksternal (ASKE)	1. BPIP telah melaksanakan <i>on desk meeting</i> bersama tim pengawas ANRI pada tanggal 4 Juni 2026.	1. Tim internal akan melakukan reuiu akhir terhadap kesesuaian data dukung

No.	Aspek	Kegiatan	Kendala/Kondisi Saat Ini	Tindak Lanjut/Perkembangan
	(ASKE)			pengawasan ASKE.
		Penyusutan Arsip.	1. Terkait Usul Musnah Melakukan penyampaian permohonan Persetujuan Pemusnahan Arsip BPIP kepada ANRI, dilampiri Notula Rapat Panitia Penilai Arsip, SK Kepala BPIP Nomor 12 Tahun 2026 tentang Panitia Penilai Arsip, dan Surat Pertimbangan Panitia Penilai Arsip. 2. Terkait Usul Serah	1. Melakukan Verifikasi dan Asistensi oleh Tim ANRI Menghadiri dan mendampingi Tim Asesor/Verifikat or ANRI terhadap 495 berkas yang diusulkan musnah di Record Center BPIP. Di lanjutkan Penerbitan Keputusan Kepala BPIP tentang pemusnahan sebagai legalitas final eksekusi fisik. Dilanjutkan Eksekusi Pemusnahan dan Pembuatan Berita Acara (BA) 2. Pembentukan Panitia Penilai dan Penyusunan Daftar Usul Serah, Pengajuan Permohonan Verifikasi Arsip Statis ke ANRI, Pelaksanaan Serah Terima Arsip Statis
		Pengelolaan	1. Telah dilakukan	1. Penyampaian

No.	Aspek	Kegiatan	Kendala/Kondisi Saat Ini	Tindak Lanjut/Perkembangan
		Sumber Daya Manusia (SDM) Kearsipan	Pelatihan Pendidikan dan Pelatihan terhadap 2 Orang Ahli Pertama 2. BPIP telah melakukan pemetaan kompetensi SDM kearsipan. 3. Terhadap Pelatihan Arsip Reletronik telah di ajukan SDM Ke ANRI	Laporan Diklat Kepada SDM dan Bukti Dukung Pelatihan Fungsional di BPIP telah di tindak lanjuti 2. Biro Umum dan SDM akan diusulkan untuk merinci peran kearsipan di dalam <i>Human Capital Development Plan</i> (HCDP) BPIP. 3. Menunggu Program Diklat Pengelolaan Arsip Eletronik (PAE) Oleh ANRI
		Pengelolaan Sumber Daya Kearsipan <i>Record Center</i>	1. Identifikasi fisik arsip usul musnah telah dilaksanakan di <i>Record Center</i> PT Sigma Cipta Utama Tangerang. 2. Kapasitas ruang penyimpanan di <i>Record Center</i> terpantau kritis karena hanya tersisa ruang untuk kurang lebih 300 boks arsip.	1. BPIP akan segera melakukan penataan ulang letak boks berdasarkan jenis arsip dan mengganti boks yang sudah tidak layak di <i>Record Center</i>. 2. BPIP perlu segera merencanakan pemenuhan kebutuhan ruang simpan tambahan untuk mengantisipasi penambahan volume arsip tahunan

Aktivitas dan foto dokumentasi dalam rangka capaian kinerja pelaksanaan manajemen fasilitasi pimpinan, hubungan masyarakat dan administrasi pada Pada Triwulan II Tahun 2026 adalah:

Tabel 2. 58 Aktivitas Pelaksanaan Dukungan Teknis dan Administrasi, Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan bagi Pimpinan

No.	Kegiatan, tanggal Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Pendampingan Kegiatan Unsur Pimpinan-Dewan Pengarah (Protokol, Tata Usaha, dan Peliputan) (Januari s.d. Juni 2026)	
2.	Ratas Terbatas Unsur Pimpinan BPIP (Januari s.d. Juni 2026)	
3.	Rapat Pleno Unsur Pimpinan BPIP (Januari s.d. Juni 2026)	

No.	Kegiatan, tanggal Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
4.	Peliputan Kegiatan BPIP (Januari s.d. Juni 2026)	
5.	Rapat Pemenuhan Instrumen Audit Sistem Kearsipan Eksternal (ASKE) (Jakarta, tanggal 6 April 2026)	
6.	Koordinasi dan Bimbingan Teknis Nasional Input Data di Aplikasi SIKN (Jakarta, tanggal 7 s.d. 10 April 2026)	
7.	Pemenuhan Rekomendasi Laporan Audit Kearsipan Eksternal dan Pemenuhan Instrumen Audit Kearsipan Eksternal Tahun 2026 (Jakarta, tanggal 13 April 2026)	

No.	Kegiatan, tanggal Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
8.	Rapat Tata Kelola Kearsipan dan Pemenuhan Instrumen ASKE 2026 (Jakarta, tanggal 17 April 2026)	
9.	Persiapan Sosialisasi ASKI 2026 (Entry Meeting Pengawasan Internal 2026) (Jakarta, tanggal 20 April 2026)	
10.	Rapat Teknis Persiapan Raker Internal Biro Fasilitas Pimpinan, Humas dan Administrasi (Jakarta, tanggal 27 April 2026)	
11.	Entry Meeting Program Kerja Pengawasan Kearsipan dan Penyusunan Arsip Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2026 (Jakarta, tanggal 28 April 2026)	

No.	Kegiatan, tanggal Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
12.	<i>Benchmarking</i> Pengelolaan Arsip Vital (Arsip Kepegawaian) Di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangerang Selatan, tanggal 9 Februari 2026)	
13.	Verifikasi Daftar Arsip Usul Musnah Unit Pengolah Tahun 2026 (Jakarta, tanggal 6 Mei 2026)	
14.	Audiensi Dan Konsultasi Teknis Penyusutan Arsip di Lingkungan BPIP Dengan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) (Jakarta, tanggal 7 Mei 2026)	
15.	Verifikasi Pengisian Audit Sistem Kearsipan Internal (ASKI) dan Bukti Dukung Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2026. (Jakarta, tanggal 18 s.d. 19 Mei 2026)	

No.	Kegiatan, tanggal Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
16.	Klarifikasi dan Verifikasi Pengawasan Kearsipan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan Koordinasi Terkait Pengembangan Kompetensi Arsiparis dengan Arsip Nasional Republik Indonesia (Tangerang , tanggal 8 Juni 2026)	
17.	Rapat Panitia Penilai Arsip Biro Fasilitas Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi (Jakarta , tanggal 11 Juni 2026)	
18.	Kegiatan Kunjungan Kerja dan <i>Benchmarking</i> Pengelolaan Arsip Statis Pemerintah Daerah Kota Tangerang (Tangerang , tanggal 17 Juni 2026)	
19.	Tindak Lanjut Pengawasan Kearsipan, Pemusnahan Arsip Dan SIKN-JIKN (Jakarta , tanggal 19 Juni 2026)	

F.5. Pelaksanaan Pengawasan Internal di Lingkungan BPIP

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan BPIP Pada Triwulan II Tahun 2026 adalah:

Tabel 2. 59 Indikator Kinerja Kegiatan Pengawasan Internal di Lingkungan BPIP

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	Layanan Audit Internal	1	50%	50% (Dokumen)
Nilai tingkat Maturitas SPIP (Skala 1 s.d. 5)	Laporan Hasil Penilaian Maturitas SPIP	3	50%	50% (Nilai)

Perhitungan kinerja pelaksanaan manajemen pengawasan internal adalah periodisasi waktu pelayanan yang dilakukan selama 12 bulan (satu tahun) dan pelaporan-pelaporan yang diberikan setiap bulannya kepada instansi pembina. Pada Triwulan II Tahun 2026 Tahun Anggaran 2026 telah terlaksana layanan selama 6 bulan dari 12 bulan yang dimana jika dipersentasikan adalah sebesar 50%.

Sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 Organisasi dan tata Kerja BPIP Bahwa dalam melaksanakan tugas Biro Pengawasan Internal mempunyai Tugas dan fungsi melakukan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Pimpinan, penyusunan laporan hasil pengawasan, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Utama. Sebagaimana Keputusan Sekretaris Utama Nomor 5 tahun 2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Biro Pengawasan

Internal Tahun 2026 dimana memiliki Program Kerja, antara lain Audit, Reviu, Evaluasi, Pengawasan Lainnya.

1. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti;
2. Nilai tingkat Maturitas SPIP (Skala 1 s.d 5); dan
3. Prosentase Laporan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan indikator atau alat ukur dalam mencapai sasaran kegiatan, yang selanjutnya diharapkan dapat mewujudkan Sasaran Program. Di samping itu indikator kinerja kegiatan digunakan untuk mengukur efektivitas perencanaan pengawasan Biro Pengawasan Internal. Indikator Kinerja Biro pengawasan Internal 2 (dua) sasaran kegiatan Perjanjian Kinerja dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), yaitu:

- a. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti;

Pada Triwulan II Tahun 2026 Capaian indikator kinerja kegiatan pelaksanaan manajemen pengawasan internal pada indikator kinerja kegiatan persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti dimana merupakan hasil pengawasan dari evaluasi BPK yang telah ditindaklanjuti capaian dengan persentase 50%. (Layanan selama 6 bulan).

- b. Nilai tingkat Maturitas SPIP (Skala 1 s.d 5);

Nilai tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan indikator utama dalam mengukur kualitas tata kelola, efektivitas manajemen risiko, serta keandalan pengendalian intern di lingkungan BPIP.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) BPKP Tahun 2025, nilai maturitas SPIP BPIP tercatat sebesar 3,057 (Level 3 – Terdefinisi). Capaian ini melampaui target yang ditetapkan sebesar 3,0, dengan tingkat capaian kinerja mencapai 101,9%, yang menunjukkan bahwa secara umum sistem pengendalian intern telah berjalan secara terstruktur dan terdokumentasi dengan baik.

Secara internal, dalam rangka penguatan kualitas penilaian:

- Hasil penilaian mandiri (*self assessment*) mencapai nilai 3,958 pada tahun 2025.
- Hasil penjaminan kualitas (*quality assurance*) oleh APIP sebesar 3,831 pada tahun 2025.

Hal ini menunjukkan adanya optimisme capaian internal, namun terdapat koreksi pada saat evaluasi eksternal oleh BPKP yang menetapkan nilai pada 3,057, sehingga mengindikasikan masih adanya gap antara persepsi internal dan validasi eksternal.

Sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2025, Biro Pengawasan Internal telah melakukan pemetaan terhadap seluruh *Area of Improvement* (Aol) yang disampaikan oleh evaluator BPKP untuk memastikan setiap rekomendasi dapat ditindaklanjuti secara sistematis oleh unit kerja terkait. Pemetaan tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar Aol tidak hanya memerlukan penyempurnaan dokumen, tetapi juga perubahan pola pengelolaan organisasi agar penyelenggaraan SPIP semakin berorientasi pada pencapaian kinerja dan pengelolaan risiko.

Pada komponen Lingkungan Pengendalian, tindak lanjut difokuskan pada penguatan komitmen pimpinan dalam mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam proses pengambilan keputusan, peningkatan kompetensi Unit Pemilik Risiko (UPR), serta penyusunan kebijakan pengendalian fraud melalui penyusunan *Fraud Control Plan* (FCP). Langkah tersebut

diharapkan mampu memperkuat budaya pengendalian sehingga pengelolaan risiko tidak hanya menjadi tanggung jawab APIP, tetapi menjadi bagian dari proses manajemen pada setiap unit kerja.

Pada komponen Penetapan dan Pencapaian Tujuan, Biro Pengawasan Internal melakukan pendampingan penyelarasan antara sasaran strategis, indikator kinerja, register risiko, dan rencana tindak pengendalian. Pendampingan tersebut diarahkan agar proses penyusunan risiko tidak lagi dilakukan setelah dokumen perencanaan selesai disusun, tetapi menjadi bagian integral dalam penyusunan program, kegiatan, dan pengalokasian sumber daya. Dengan demikian, setiap sasaran organisasi memiliki keterkaitan yang jelas dengan risiko utama beserta strategi pengendaliannya.

Terhadap komponen Manajemen Risiko, tindak lanjut difokuskan pada penyempurnaan kualitas register risiko strategis dan operasional, reviu terhadap Rencana Tindak Pengendalian (RTP), serta peningkatan kualitas pemantauan implementasi pengendalian. Biro Pengawasan Internal juga mendorong agar efektivitas pengendalian diukur melalui indikator yang terukur sehingga keberhasilan pengendalian tidak hanya dinilai dari tersedianya dokumen, tetapi juga dari kemampuan pengendalian tersebut dalam menurunkan tingkat risiko organisasi.

Selanjutnya, pada komponen Pengendalian Korupsi, tindak lanjut diarahkan pada penguatan sistem pencegahan korupsi melalui penyusunan *Fraud Risk Assessment* (FRA), pengembangan *Fraud Control Plan* (FCP), penyempurnaan kebijakan antikorupsi, serta peningkatan koordinasi dengan unit terkait dalam pelaksanaan rencana aksi pengendalian korupsi. Langkah tersebut menjadi prioritas mengingat hasil evaluasi masih menunjukkan nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)

berada pada Level 2 sehingga diperlukan upaya yang lebih terstruktur untuk meningkatkan efektivitas pengendalian korupsi.

Selama Triwulan II Tahun 2026, implementasi tindak lanjut *Area of Improvement (Aoi)* telah difasilitasi melalui kegiatan pendampingan penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, konsultasi pembangunan manajemen risiko, asistensi penyusunan dokumen pengendalian intern, serta pelaksanaan kegiatan Penguatan Sistem Pengendalian Intern dan Manajemen Risiko melalui Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi. Kegiatan tersebut menghasilkan penyempurnaan dokumen manajemen risiko pada unit kerja, peningkatan pemahaman Unit Pemilik Risiko terhadap substansi *Area of Improvement*, serta tersusunnya rencana aksi percepatan penyelesaian rekomendasi hasil evaluasi BPKP. Pelaksanaan tindak lanjut *Area of Improvement* selama Triwulan II Tahun 2026 telah menjadi langkah strategis dalam memperkuat kualitas implementasi SPIP melalui pendampingan penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, penguatan penerapan manajemen risiko, penyempurnaan dokumen pengendalian intern, serta peningkatan kapasitas Unit Pemilik Risiko. Upaya tersebut tidak hanya diarahkan untuk memenuhi rekomendasi hasil evaluasi BPKP, tetapi juga untuk membangun tata kelola organisasi yang lebih adaptif terhadap risiko, akuntabel, dan berorientasi pada pencapaian kinerja organisasi.

Meskipun demikian, penyelesaian *Area of Improvement* masih memerlukan pengawalan pada Semester II Tahun 2026, terutama terhadap rekomendasi yang memerlukan penyusunan kebijakan, perubahan proses bisnis, penguatan sistem informasi, serta peningkatan komitmen implementasi oleh seluruh Unit Pemilik Risiko. Oleh karena itu, Biro Pengawasan Internal akan melaksanakan pemantauan secara berkala terhadap progres

penyelesaian Aol sebagai bagian dari mekanisme monitoring penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di lingkungan BPIP.

Aktivitas dan foto dokumentasi dalam rangka capaian kinerja pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan BPIP pada Triwulan II Tahun 2026 adalah:

Tabel 2. 60 Aktivitas Pelaksanaan Pengawasan Internal di Lingkungan BPIP

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Monitoring Kepatuhan Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) Tahun 2025 di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Jakarta, tanggal 2 Januari s.d. 30 April 2026)	
2.	Monitoring Kepatuhan Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) Tahun 2025 di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Jakarta, tanggal 2 Januari s.d. 30 April 2026)	
3.	Pendampingan atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2025 pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) (Jakarta, tanggal 20 Januari s.d. 30 April 2026)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
4.	Pendampingan atas Pelaksanaan Uji Petik di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Rangka Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) BPIP Tahun 2025 oleh Tim Pemeriksa BPK RI (Tanggal 30 Maret s.d. 15 April 2026)	
5.	Pemantauan pada Kegiatan Penyusunan Kurikulum Diklat PIP bagi BUMN/BUMD di Bekasi (Bekasi, tanggal 14 s.d. 17 April 2026)	(Kegiatan Rapat Internal Panitia dan Persiapan Pelaksanaan Kegiatan)
6.	Reviu Revisi Anggaran (Jakarta, tanggal 15 s.d. 28 April 2026)	
7.	Konsultasi Pembangunan Zona Integritas Ke BPKP (Jakarta, tanggal 29 April 2026)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
8.	Reviu pada Laporan Keuangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2025 (<i>Audited</i>) (Jakarta, tanggal 22 April s.d. 8 Mei 2026)	
9.	Koordinasi Daftar Arsip Musnah Biro Pengawasan Internal Periode Februari 2018 s.d. Desember 2025 (Jakarta, tanggal 13 Mei 2026)	
10.	Pendampingan Pembinaan SPIP Terintegrasi pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) (Jakarta, tanggal 11 s.d. 22 Mei 2026)	
11.	Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Tindak Lanjut Hasil SPI 2025 (Jakarta, tanggal 21 Mei 2026)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
12.	Pendampingan Tim Pemantauan BPK atas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK sampai dengan Semester I Tahun 2026 pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	

F.6. Pelaksanaan Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pelaksanaan pengelolaan data dan teknologi informasi mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Triwulan II Tahun 2026 adalah:

Tabel 2. 61 Indikator Keluaran Pelaksanaan Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Tingkat maturitas SPBE/ layanan data dan informasi	Layanan Data dan Informasi	1	50%	50% (Layanan)

Perhitungan kinerja pelaksanaan manajemen data dan informasi adalah periodisasi waktu pelayanan yang dilakukan selama 12 bulan (satu tahun) dan pelaporan-pelaporan yang diberikan setiap bulannya kepada instansi pembina. Pada Triwulan II Tahun 2026 telah terlaksana layanan selama 6 bulan dari 12 bulan yang dimana jika dipersentasikan adalah sebesar 50%. Berikut adalah Layanan yang telah diberikan Pusat Data dan Teknologi sampai dengan:

Pada Triwulan II Tahun 2026 ini, Pusat Data dan Teknologi Informasi, telah melakukan beberapa pencapaian guna mendukung tercapainya nilai indeks SPBE yang lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Saat ini sudah dilaksanakan beberapa kegiatan baik di bidang keamanan data dan informasi, maupun di bidang pengembangan aplikasi BPIP. Berikut rincian pencapaian hingga bulan Desember 2026, antara lain:

1. Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sangat penting dalam pemerintahan karena dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan publik. Berikut adalah beberapa alasan mengapa layanan TIK sangat penting dalam konteks pemerintahan:

- Peningkatan Efisiensi Administrasi

Penggunaan TIK memungkinkan untuk mengotomatiskan banyak proses administratif yang sebelumnya dilakukan secara manual, yang mengurangi beban kerja dan meningkatkan kecepatan pemrosesan data

- Transparansi dan Akuntabilitas

Sistem informasi yang transparan memungkinkan publik untuk melihat bagaimana anggaran dikelola, bagaimana kebijakan diambil, dan bagaimana keputusan-keputusan penting dibuat, sehingga meningkatkan akuntabilitas pemerintah terhadap rakyat.

- Pengambilan Keputusan yang Lebih Cepat dan Akurat

dengan TIK, data yang terkumpul bisa diproses dan dianalisis dengan cepat, memberikan informasi yang lebih akurat untuk pengambilan keputusan.

- Peningkatan Kolaborasi Antar Instansi Pemerintah

TIK memudahkan koordinasi dan kolaborasi antar berbagai lembaga pemerintahan. Sistem berbasis digital memungkinkan berbagai instansi untuk berbagi informasi dan beKerja Sama dalam menangani isu-isu nasional dengan lebih Efektif . Misalnya, aplikasi SAKTI untuk penganggaran, Srikandi untuk persuratan, aplikasi Transparansi untuk Paskibraka, dan lain sebagainya.

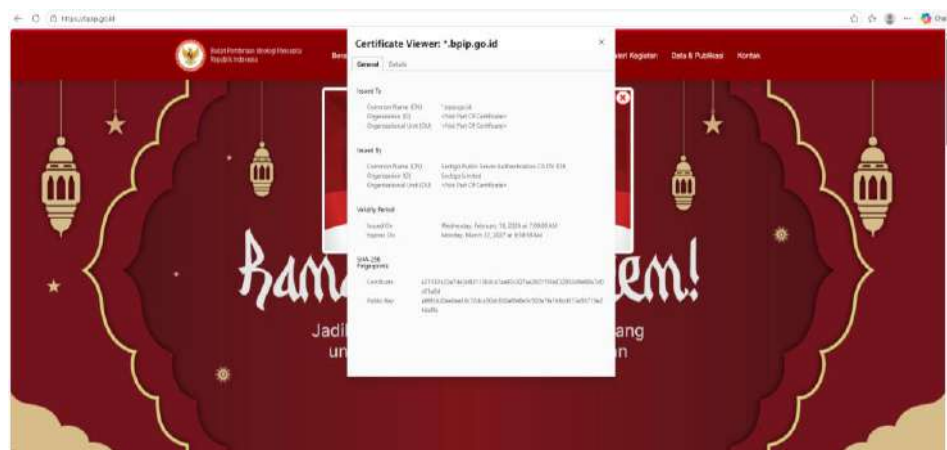
- Peningkatan Keamanan dan Perlindungan Data

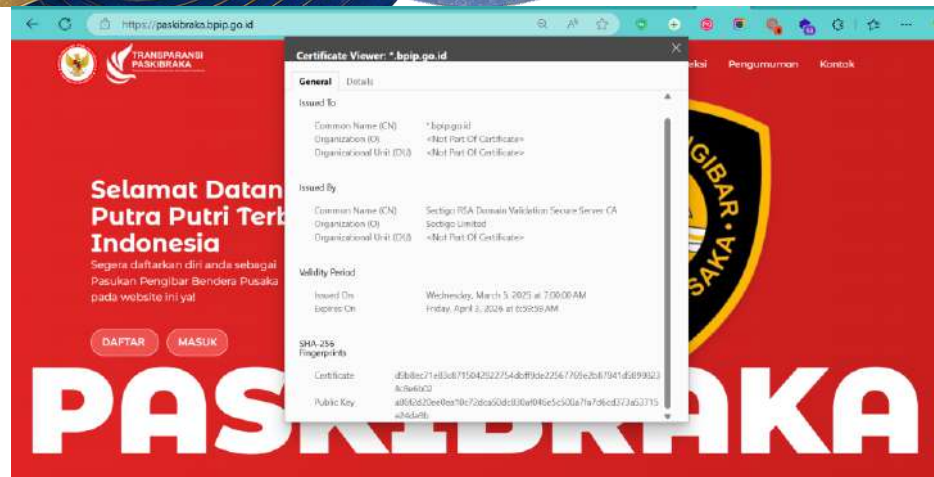
Teknologi memungkinkan pemerintah untuk mengamankan data sensitif. Sistem keamanan yang baik dapat melindungi data dari ancaman peretasan, penyalahgunaan, atau kebocoran informasi.

Pusat Data dan Teknologi Informasi BPIP telah melaksanakan beberapa kegiatan baik di bidang keamanan data dan informasi, maupun di bidang pengembangan aplikasi dalam rangka memenuhi sasaran kinerja layanan TIK. Berikut rincian pencapaian sampai dengan bulan Desember 2026, antara lain:

- a. Pemasangan *Secure Socket Layer (SSL) Website* BPIP Periode 2026-2027

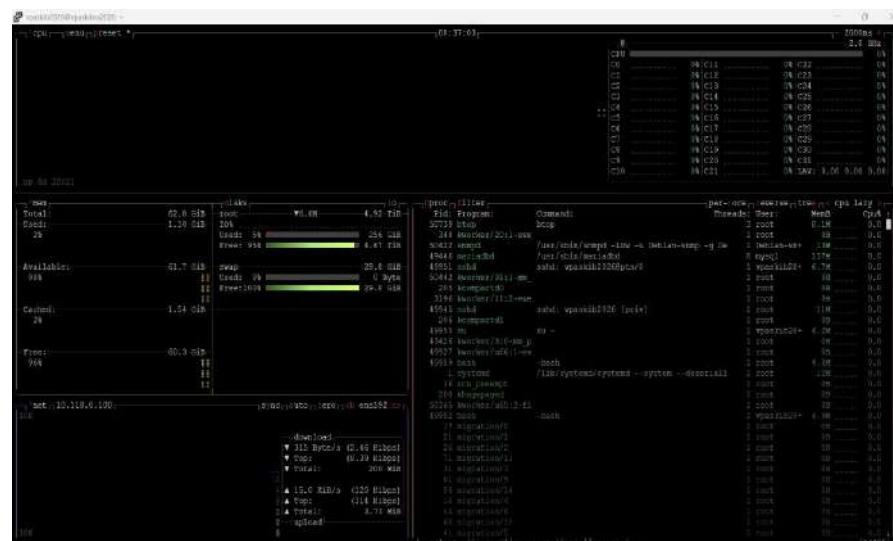
Pusat Data dan Teknologi Informasi telah melakukan pembaharuan periodiasi pada SSL untuk *website-website* BPIP untuk menjamin keamanan website BPIP:





b. Penyiapan Server Paskibraka BPPI tahun 2026

Penyiapan Server Paskibraka BPPI tahun 2026 dilakukan melalui pemberdayagunaan Server Sebelumnya yang sudah ada, dan dilakukan *re-install* menggunakan *Operating System* terbaru. Agar kestabilan kinerja Server Meningkat dan semakin Baik.

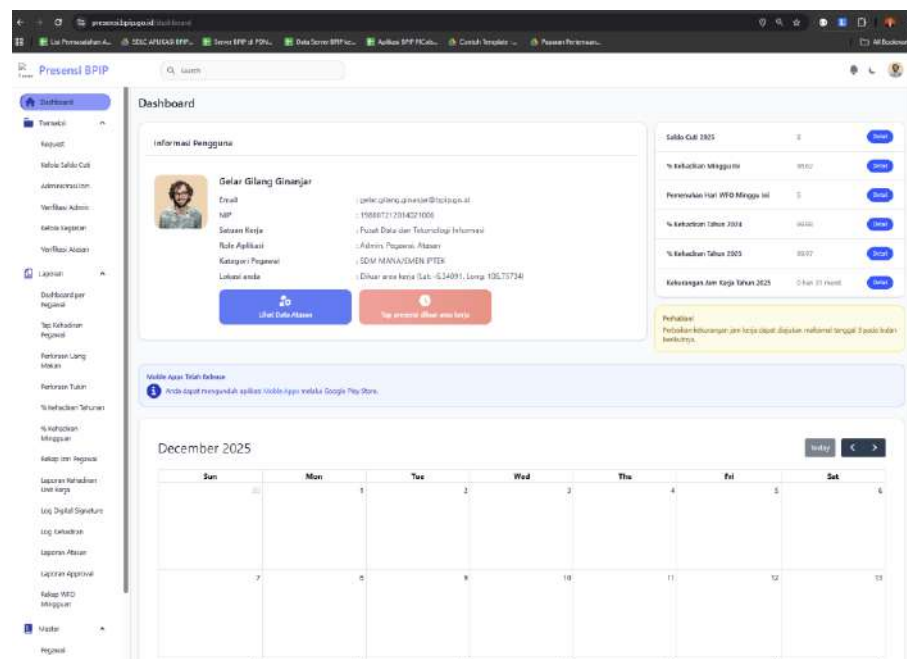


c. Implementasi Penyempurnaan Sistem Informasi

Pengembangan Sistem Presensi Digital BPPI dilaksanakan untuk menjawab tantangan operasional dalam pengelolaan kehadiran pegawai, khususnya terkait akurasi data, validasi kehadiran berbasis lokasi, pencatatan kehadiran pada kegiatan

husus seperti apel dan upacara hari besar, serta kebutuhan monitoring kehadiran secara *real-time* oleh Biro Umum dan Sumber Daya Manusia. Selain itu, sistem yang dikembangkan diharapkan mampu diintegrasikan dengan infrastruktur teknologi informasi BPIP dan dikelola secara terpusat dengan dukungan teknis dari Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatekin).

Diharapkan pengembangan Sistem Presensi Digital BPIP dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan, serta menjadi landasan yang kuat bagi proses implementasi, evaluasi, dan pengembangan sistem di masa mendatang dalam rangka mendukung tata kelola sumber daya manusia BPIP yang profesional dan akuntabel.



d. Pelaksanaan Verifikasi Infrastruktur Informasi Vital (IIV) pada Sistem Elektronik (SE) BPIP oleh BSSN

Sebagai bagian dari upaya penguatan keamanan siber dan perlindungan aset digital nasional pada Triwulan II, Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) BPIP telah melaksanakan kegiatan Verifikasi Identifikasi Infrastruktur Informasi Vital (IIV)

Sektor Administrasi Pemerintahan. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Nomor BA.316/BSSN/D3/KS.01.02/05/2026 yang ditandatangani pada hari Senin, 11 Mei 2026, bertempat di Kantor Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Proses verifikasi berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja, terhitung mulai tanggal 11 sampai dengan 13 Mei 2026, yang melibatkan Tim Verifikator dari Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BSSN selaku Pihak Pertama, serta perwakilan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) BPIP selaku Pihak Kedua.

Pelaksanaan verifikasi ini bertujuan untuk memvalidasi hasil identifikasi IIV yang telah dilakukan secara mandiri oleh pihak BPIP. Dalam lingkup administrasi pemerintahan, IIV atau Infrastruktur Informasi Vital merupakan sistem elektronik, jaringan, atau fasilitas teknologi informasi yang memiliki tingkat kepentingan sangat krusial, di mana gangguan atau kegagalan pada sistem tersebut dapat berdampak signifikan terhadap jalannya roda pemerintahan maupun layanan publik. Berdasarkan hasil inventarisasi aset yang diverifikasi, Pusdatin BPIP mengelola data dukung berupa 75 (tujuh puluh lima) sistem elektronik, 1 (satu) draf Keputusan Kepala BPIP tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI), dokumen Topologi Jaringan BPIP, serta data 21 personel yang telah mengikuti kegiatan pengembangan kapasitas SDM di bidang keamanan siber.

Dalam tahapan kategorisasi sistem elektronik, terdapat beberapa layanan utama BPIP yang diperiksa, antara lain portal Limasdiklat BPIP (*Learning Management System* Pembinaan Ideologi Pancasila), Sisdiklat BPIP (Sistem Informasi Registrasi Peserta Sertifikasi dan Akreditasi), Jurnal Pancasila, PPID

(Portal Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi), serta portal Satu Data di lingkungan BPIP. Lebih lanjut, Pusdatin BPIP juga melakukan pengukuran tingkat vitalitas terhadap sistem Transparansi Paskibraka, yaitu sistem rekrutmen daring (*online*) yang dikelola oleh BPIP untuk menjamin proses seleksi Paskibraka yang jujur, adil, objektif, dan akuntabel tanpa praktik titipan.

Sebagai tindak lanjut dan komitmen akhir dari pelaksanaan kegiatan ini, Pusdatin BPIP berkewajiban untuk melengkapi seluruh data dukung sesuai hasil verifikasi dan mengirimkannya kepada pihak BSSN paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah kegiatan dilaksanakan. Setelah seluruh data dukung terpenuhi, pihak BSSN akan menyampaikan Surat Penyampaian Hasil Verifikasi Identifikasi Infrastruktur Informasi Vital kepada BPIP. Terhadap sistem-sistem elektronik yang memenuhi kriteria dan dinyatakan sebagai Infrastruktur Informasi Vital (IIV), status penetapannya akan diterbitkan secara formal melalui Keputusan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara. Seluruh dokumen kesepakatan pelaksanaan ini telah disahkan di Jakarta dan ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat digital resmi yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

e. Pelaksanakan Verifikasi penilaian IKASANDI di BPIP oleh BSSN

Capaian kinerja keamanan siber dan sandi BPIP berdasarkan hasil verifikasi instrumen IKASANDI tahun 2026 secara umum menempatkan organisasi pada Level 2 (Berulang / *Emerging*). Peringkat ini menunjukkan bahwa BPIP telah berhasil melampaui tahap inisiasi awal dan mulai membangun fondasi tata kelola keamanan informasi yang terstruktur. Keberhasilan kinerja ini ditandai dengan adanya komitmen strategis yang

tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) organisasi yang sudah mengintegrasikan aspek keamanan siber, serta berjalannya prosedur formal dalam manajemen perubahan teknologi melalui pencatatan *Request for Change* (RFC) log secara tertib.

Di sisi infrastruktur dan operasional, capaian kinerja BPIP diperkuat oleh adopsi teknologi yang aman, seperti pemanfaatan *Master Image OS* yang tersertifikasi dari Pusat Data Nasional (PDN) Kementerian Komdigi. Selain itu, pemisahan lingkungan kerja antara server pengembangan (*development*) dan server produksi (*production*) telah berhasil diterapkan untuk meminimalkan risiko gangguan sistem. BPIP juga telah memfungsikan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) atau CSIRT secara aktif, yang kinerjanya dibuktikan melalui publikasi penanganan insiden dan kegiatan siber secara transparan kepada publik melalui kanal resmi organisasi.

Namun, hasil verifikasi lapangan yang dilakukan oleh tim BSSN menunjukkan adanya penurunan skor yang signifikan di seluruh domain utama—termasuk Identifikasi, Proteksi, Deteksi, Gulih (Pemulihan), dan Persandian. Fakta ini mengindikasikan adanya kesenjangan performa antara pemenuhan dokumen di atas kertas dengan konsistensi penerapannya di lingkungan kerja nyata. Banyaknya rancangan kebijakan, seperti draf dokumen Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) dan draf prosedur pemulihan yang belum disahkan secara regulasi, menjadi faktor utama yang menahan laju peningkatan indeks kematangan kinerja siber BPIP ke tingkat yang lebih tinggi.

Secara makro, capaian kinerja saat ini menegaskan bahwa BPIP masih berada dalam fase pemenuhan kepatuhan (*compliance-driven*) yang bersifat periodik dan retrospektif. Untuk mengoptimalkan output kinerja ke depan, organisasi

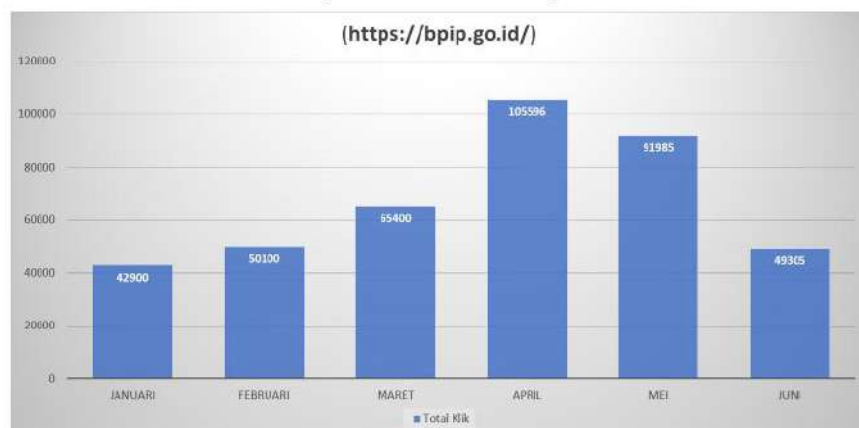
dituntut untuk mengubah orientasi dari sekadar menjaga status formalitas dokumen menjadi pembangunan kapabilitas ketahanan siber (*cyber resilience*). Hal ini memerlukan transformasi operasional agar seluruh sistem deteksi anomali, manajemen risiko yang spesifik, serta mekanisme mitigasi insiden dapat berjalan secara otomatis, konsisten, dan berkelanjutan dalam menghadapi ancaman siber yang dinamis.

Indikator Pemerintah Digital	Target Nilai Kematangan	Nilai Kematangan	Kategori Tingkat Kematangan
Keamanan Siber	2.51	2.19	Level 2 - Emerging
Kriptografi *)	2.51	1.00	Level 1 - Initiate
Penanganan Insiden	2.51	2.18	Level 2 - Emerging

f. Kunjungan website utama BPIP

Selama Pada Triwulan II Tahun 2026 website utama BPIP <https://bpip.go.id> telah dikunjungi sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini:

Statistik Pengunjung Website BPIP 2026
(Januari – Juni)



Aktivitas dan foto dokumentasi dalam rangka capaian kinerja Pelaksanaan Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan BPIP pada Triwulan II Tahun 2026 adalah:

Tabel 2. 62 Aktivitas Pelaksanaan Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Pembahasan Rancangan Surat Keputusan CSIRT dan Koordinasi Teknis Pengolahan Data BPIP (Bekasi, tanggal 8 s.d. 10 April 2026)	
2.	Pembahasan Strategi Persiapan Penilaian Indeks Pemerintah Digital di Lingkungan BPIP (Tangerang Selatan, tanggal 16 s.d. 17 April 2026)	
3.	<i>Workshop</i> Pengelolaan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS/CSIRT) Organisasi Pemerintah Pusat Tahun 2026 (Jakarta, tanggal 5 Mei 2026)	
4.	Observasi Simpul Jaringan Informasi Geospasial dalam Rangka Optimalisasi Penilaian Indeks Pemerintahan Digital (Jakarta, tanggal 6 Mei 2026)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
5.	Observasi Transformasi SPBE dalam Rangka Persiapan Penilaian Indeks Pemerintah Digital di Kabupaten Banyumas (Banyumas, tanggal 12 s.d. 14 Mei 2026)	
6.	Studi Implementasi Simpul Jaringan Informasi Geospasial di Kota Padang Panjang (Sumatera Barat, tanggal 9 s.d. 11 Juni 2026)	
7.	Evaluasi Hasil Penilaian IKASANDI (Garut, tanggal 23 s.d. 25 Juni 2026)	

BAB III REALISASI ANGGARAN TRIWULAN II TAHUN 2026

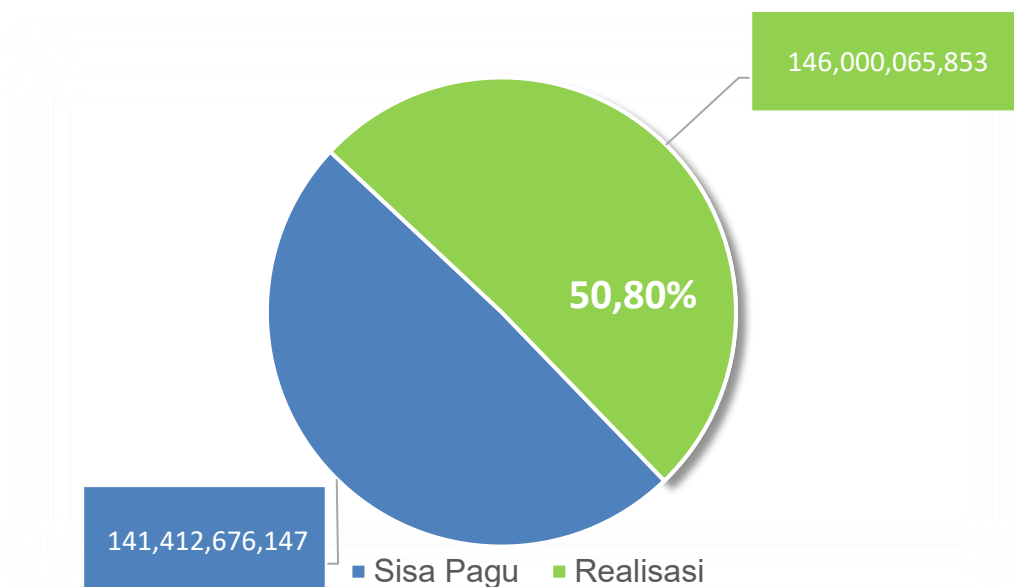
Tahun Anggaran 2026 BPIP mendapat alokasi pagu anggaran sebesar Rp287.412.742.000,00 (Dua ratus delapan puluh tujuh miliar empat ratus dua belas juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah). Anggaran digunakan mendukung 2 Program, yaitu:

- Program PIP, sebesar Rp 111.979.719.000;
- Program Dukungan Manajemen, sebesar Rp175.433.023.000.

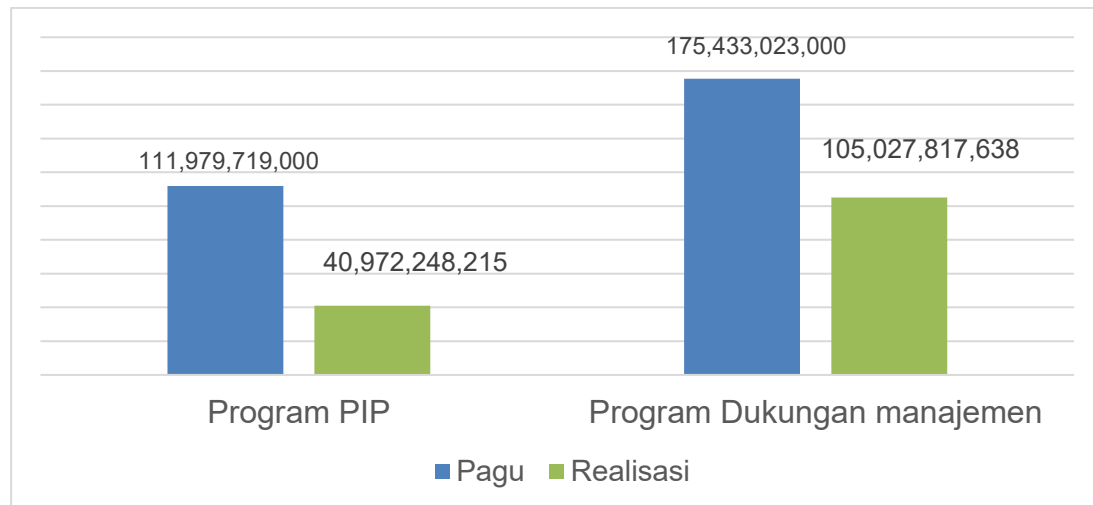
Realisasi Anggaran hingga 30 Juni 2026 (sumber: aplikasi SAKTI) adalah:

Realisasi Anggaran Total: **Rp146.000.065.853,00** (Seratus empat puluh enam miliar enam puluh lima ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah.) atau sebesar 50,80% dari pagu.

Gambar 3.1 Realisasi Anggaran Total



Realisasi anggaran per program:



Gambar 3.2 Realisasi Anggaran per Program

Adapun realisasi anggaran berdasarkan unit kerja adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 1 Realisasi Anggaran berdasarkan Unit Kerja

NO	UNIT KERJA	PAGU	REALISASI	PERSENTASE REALISASI	SISA DANA
Sekretariat Utama		175,433,023,000	105,027,817,638	59.87%	70,405,205,362
1	Biro Fasilitas Pimpinan, Hubungan Masyarakat dan Administrasi	13,156,035,000	10,572,265,959	80.36%	2,583,769,041
2	Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	155,649,796,000	90,581,785,109	58.20%	65,068,010,891
3	Biro Perencanaan dan Keuangan	2,443,372,000	1,751,441,949	71.68%	691,930,051
4	Biro Hukum dan Organisasi	2,418,293,000	1,026,062,988	42.43%	1,392,230,012
5	Biro Pengawasan Internal	978,607,000	562,722,717	57.50%	415,884,283
6	Pusat Data dan Informasi	786,920,000	533,538,916	67.80%	253,381,084
Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan		44,517,548,000	15,549,454,133	34.93%	28,968,093,867
1	Direktorat Hubungan antar Lembaga dan Kerjasama	2,163,689,000	809,889,265	37.43%	1,353,799,735
2	Direktorat Sosialisasi dan Komunikasi	14,058,365,000	10,793,081,936	76.77%	3,265,283,064
3	Direktorat Jaringan dan Pembudayaan	28,295,494,000	3,946,482,932	13.95%	24,349,011,068

NO	UNIT KERJA	PAGU	REALISASI	PERSENTASE REALISASI	SISA DANA
Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi		19,352,440,000	1,839,138,435	9.50%	17,513,301,565
1	Direktorat Analisis dan Penyelarasan	15,894,906,000	375,656,193	2.36%	15,519,249,807
2	Direktorat Advokasi	1,559,149,000	702,428,653	45.05%	856,720,347
3	Direktorat Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan Regulasi	1,898,385,000	761,053,589	40.09%	1,137,331,411
Deputi Bidang Pengkajian Materi		9,465,148,000	4,195,488,223	44.33%	5,269,659,777
1	Direktorat Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila	4,808,742,000	2,386,481,231	49.63%	2,422,260,769
2	Direktorat Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila	2,253,101,000	889,881,878	39.50%	1,363,219,122
3	Direktorat Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila	2,403,305,000	919,125,114	38.24%	1,484,179,886
Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan		32,556,806,000	17,049,247,809	52.37%	15,507,558,191
1	Direktorat Perencanaan, Standardisasi Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan	4,518,045,000	1,302,030,297	28.82%	3,216,014,703
2	Direktorat Penyelenggaraan Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka	23,544,953,000	13,082,998,248	55.57%	10,461,954,752
3	Direktorat Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan	4,493,808,000	2,664,219,264	59.29%	1,829,588,736
Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi		6,087,777,000	2,338,919,615	38.42%	3,748,857,385
1	Direktorat Pengendalian	1,543,761,000	366,323,690	23.73%	1,177,437,310
2	Direktorat Evaluasi	1,559,715,000	524,555,720	33.63%	1,035,159,280
3	Direktorat Pengukuran Pelebagaan Pancasila	2,984,301,000	1,448,040,205	48.52%	1,536,260,795
TOTAL		287,412,742,000	146,000,065,853	50.80%	141,412,676,147

BAB IV | EVALUASI DAN UPAYA PERBAIKAN

Bab ini merupakan hasil evaluasi terhadap kendala-kendala yang dihadapi unit kerja dalam rangka mencapai Sasaran Program dan kegiatan. Terhadap kendala tersebut dilakukan upaya tindak lanjut. Usulan rekomendasi merupakan upaya perbaikan guna peningkatan kinerja di waktu mendatang. Kendala dan tindak lanjut atau rekomendasi atau usulan perbaikan dikelompokkan per Sasaran Program, yaitu:

1. Kendala dan Rekomendasi Terwujudnya Penguatan Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi dan Pembudayaan Ideologi Pancasila

Kendala dan faktor penghambat pelaksanaan program, yaitu:

Tabel 4. 1 Kendala dan Tindak Lanjut Terwujudnya Hubungan Antar Lembaga, Kerja Sama, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan, serta Pembudayaan PIP

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
Persentase Rekomendasi Implementasi Peta Jalan PIP yang Ditindaklanjuti	1. Adanya keterlambatan pelaporan, di mana 10 dari 46 (K/L) belum melengkapi dan mengunggah draf capaian implementasi Peta Jalan PIP TW 1. 2. Adanya kesulitan teknis dari para pelaksana K/L dalam menerjemahkan dan mengonversikan indikator makro Peta Jalan PIP ke dalam program kerja sektoral instansinya. 3. Belum optimalnya sinergi dan pengondisian awal dari capaian secara berjenjang di tingkat klaster Kementerian Koordinator. 4. Belum terdapat petunjuk teknis/SOP yang jelas	1. Memberikan perpanjangan waktu terbatas serta melakukan komunikasi intensif untuk mengawal 10 K/L tersebut agar segera melengkapi dokumen capaiannya. 2. Menyelenggarakan asistensi proaktif melalui program bimbingan teknis secara berkala untuk memandu para pelaksana di instansi mitra. 3. Mengoptimalkan peran Kementerian Koordinator (terutama klaster terkait) untuk memfasilitasi pemantauan awal dan pembinaan berkala di lingkup klasternya. 4. Menyusun Petunjuk

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
	dalam pelaksanaan penyusunan Rekomendasi	teknis/SOP yang jelas dan terukur dalam pelaksanaan penyusunan Rekomendasi
Persentase Sosialisasi dan Komunikasi nilai-nilai Pancasila yang Efektif	1. Materi sosialisasi dan komunikasi nilai-nilai Pancasila belum sepenuhnya disesuaikan dengan karakteristik, kebutuhan, dan segmentasi sasaran sehingga efektivitas penyampaian pesan belum optimal. 2. Belum tersedianya pedoman teknis yang terstandar mengenai metode, mekanisme, dan format pelaksanaan sosialisasi serta komunikasi nilai-nilai Pancasila. 3. Jangkauan sosialisasi belum merata, khususnya pada wilayah yang akses komunikasinya masih terbatas dan kelompok masyarakat khusus/tematik.	1. Melakukan kurasi dan pembaruan materi sosialisasi secara berkala berdasarkan segmentasi sasaran, perkembangan isu strategis, serta pendekatan komunikasi yang kontekstual, adaptif, dan mudah dipahami masyarakat. 2. Menyusun dan mengembangkan pedoman teknis pelaksanaan sosialisasi dan komunikasi sebagai acuan bersama yang tetap memberikan fleksibilitas sesuai karakteristik wilayah dan kelompok sasaran. 3. Memperluas jangkauan sosialisasi melalui penguatan kolaborasi dengan pemangku kepentingan, optimalisasi ruang publik, serta pemanfaatan berbagai kanal komunikasi, termasuk radio dan media digital, sesuai karakteristik wilayah dan sasaran.
Persentase Penguatan Jaringan dan Pembudayaan Pancasila yang Efektif	Belum disusunnya pengukuran hasil pembudayaan Pancasila yang efektif	Menyusun pengukuran hasil pembudayaan Pancasila yang efektif
Persentase Implementasi Peta Jalan PIP	Belum optimalnya pemanfaatan sarana komunikasi antar K/L, PEMDA, Orsospol dan Komponen masyarakat lainnya	Memaksimalkan semua sarana baik di unit kerja dan mitra dalam meningkatkan komunikasi dengan K/L, PEMDA, Orsospol dan Komponen masyarakat lainnya

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
Persentase Konten Sosialisasi dan Komunikasi Pembinaan Ideologi Pancasila yang Efektif	1. Pengembangan komunikasi publik melalui berbagai kanal media belum dimanfaatkan secara maksimal sehingga penyebarluasan pesan belum menjangkau masyarakat secara luas dan berkelanjutan. 2. Belum tersedianya instrumen pengukuran yang komprehensif untuk mengevaluasi efektivitas sosialisasi dan komunikasi, baik dari aspek jangkauan, keterlibatan audiens, maupun perubahan pemahaman masyarakat. 3. Inovasi dan pengembangan format konten komunikasi masih terbatas sehingga penyampaian pesan belum mampu meningkatkan keterlibatan berbagai kelompok masyarakat. 4. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan dukungan teknis dalam pelaksanaan sosialisasi dan pengembangan komunikasi.	1. Mengintensifkan strategi komunikasi publik melalui integrasi media konvensional, digital, dan media komunitas untuk memperluas jangkauan serta meningkatkan efektivitas diseminasi nilai-nilai Pancasila. 2. Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis indikator kinerja, meliputi jangkauan, keterlibatan audiens, umpan balik, dan hasil evaluasi sebagai dasar penyempurnaan program sosialisasi dan komunikasi. 3. Mengembangkan konten komunikasi yang lebih kreatif, inovatif, dan multiplatform sesuai preferensi serta karakteristik masing-masing kelompok sasaran. 4. Memperkuat kapasitas sumber daya manusia melalui peningkatan kompetensi, optimalisasi pembagian tugas, serta pemenuhan kebutuhan personel sesuai beban kerja dan prioritas program.
Persentase Rekomendasi Hasil Sosialisasi dan Komunikasi yang Ditindaklanjuti	Belum tersusunnya pedoman baku terkait mekanisme penyusunan, penyampaian, dan tindak lanjut rekomendasi hasil sosialisasi dan komunikasi.	Melakukan penyusunan pedoman teknis dan penyampaian rekomendasi hasil sosialisasi dan komunikasi pembinaan ideologi Pancasila.
Persentase Rekomendasi Hasil Pembudayaan Pancasila yang Ditindaklanjuti	Saat ini masih dalam tahap kegiatan pembudayaan Pancasila sehingga belum dapat memberikan rekomendasi hasil pembudayaan Pancasila	Menyelesaikan dan membuat draf rekomendasi hasil pembudayaan Pancasila yang ditindaklanjuti

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
	yang ditindaklanjuti	
Persentase Jaringan Relawan yang Mengaktualisasikan Pancasila	Saat ini masih dalam tahap kegiatan pembudayaan Pancasila	Menyelesaikan dan membuat draf hasil persentase jaringan relawan yang mengaktualisasikan Pancasila

Rekomendasi guna perbaikan dan peningkatan kinerja program, yaitu:

- Penyusunan Pedoman Optimalisasi dan Monitoring dan Evaluasi Kerjasama PIP;
- Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan Ideologi Pancasila di Tingkat Pusat dan Daerah dalam rangka mendukung implementasi Arah Kebijakan dan Peta Jalan PIP 2026-2029;
- Pelaksanaan Optimalisasi Kerjasama PIP kepada mitra eksternal dan internal BPIP;
- Mengkoordinir pelaksanaan implementasi peta jalan PIP bersama dengan K/L dan Pemda;
- Dilakukan peninjauan/evaluasi terhadap nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama yang telah ditanda tangani yang sudah lewat masa berlakunya agar seluruh kegiatan kerja sama dapat dilaksanakan dengan optimal;
- Penyusunan rencana kerja yang sesuai dengan prioritas kerja Direktorat Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama;
- Mengupayakan secara intensif terkait pelaksanaan sosialisasi pada wilayah dan kelompok tematik yang belum terjangkau secara memadai, melalui sinergi yang lebih kuat dengan pemerintah daerah, komunitas, dan pemangku kepentingan terkait.
- Memaksimalkan strategi komunikasi di berbagai kanal media (digital, penyiaran, dan ruang publik) dengan pendekatan yang inklusif dan sesuai karakteristik sasaran agar penyebaran nilai Pancasila lebih masif dan berkelanjutan.

- i) Menyusun dan mengkurasi materi sosialisasi yang adaptif, relevan, dan kontekstual agar mudah dipahami serta mampu menjawab dinamika isu di masyarakat.
- j) Mempercepat penyusunan dan implementasi instrumen survei efektivitas pembudayaan Pancasila sehingga hasil kegiatan dapat diukur secara objektif dan menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis data (*evidence-based policy*).
- k) Memperluas penguatan jejaring strategis dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, komunitas budaya, tokoh agama, tokoh adat, serta sektor swasta untuk memperluas jangkauan internalisasi nilai-nilai Pancasila.
- l) Meningkatkan kualitas pembinaan Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila melalui pembinaan yang berkelanjutan, penyusunan modul yang lebih aplikatif, serta sistem monitoring dan evaluasi terhadap implementasi nilai-nilai Pancasila di masyarakat.
- m) Mengoptimalkan pemanfaatan media komunikasi digital dan media sosial sebagai instrumen sosialisasi nilai-nilai Pancasila sehingga penyebaran pesan kebangsaan dapat menjangkau kelompok masyarakat yang lebih luas, khususnya generasi muda.
- n) Memperkuat koordinasi lintas unit kerja di lingkungan BPIP agar kegiatan hubungan antar lembaga, sosialisasi, komunikasi, jaringan, pendidikan, pengkajian, dan regulasi berjalan secara terintegrasi dalam mendukung peningkatan Indeks Pelembagaan Pancasila.
- o) Menyusun rekomendasi kebijakan hasil pembudayaan Pancasila berdasarkan evaluasi pelaksanaan kegiatan di daerah sebagai masukan bagi penyusunan kebijakan nasional maupun kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila.

p) Meningkatkan efektivitas pelaksanaan anggaran melalui percepatan pelaksanaan kegiatan prioritas pada semester II sehingga target output, outcome, dan realisasi anggaran dapat tercapai secara optimal sesuai dengan rencana kerja tahun 2026.

2. Kendala dan rekomendasi tindak lanjut Terwujudnya Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyusunan dan Pengawasan Regulasi, serta Advokasi Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila.

Kendala dan faktor penghambat pelaksanaan program, yaitu:

Tabel 4. 2 Kendala dan Tindak Lanjut Terwujudnya Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyusunan dan Pengawasan Regulasi, serta Advokasi Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
Persentase Rekomendasi Hasil Penyeragaman Rancangan Produk Hukum yang ditindaklanjuti	Para mitra strategis belum memahami secara lengkap Indikator Nilai Pancasila dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan belum digunakannya secara maksimal hasil penyeragaman yang disampaikan.	Diperlukan penguatan bentuk hukum Indikator Nilai Pancasila dan sosialisasi/internalisasi yang lebih masif terhadap makna dan penggunaan Indikator Nilai Pancasila.
Persentase Rekomendasi Hasil Advokasi Nilai-Nilai Pancasila dimanfaatkan	1. Belum semua instansi memahami urgensi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan mereka; 2. Keterbatasan pemahaman teknis dalam mengimplementasikan rekomendasi; dan 3. Minimnya regulasi operasional yang menjadi rujukan pelaksanaan advokasi	1. Menyusun pedoman teknis dalam bentuk Peraturan Badan; 2. Melaksanakan sosialisasi dan asistensi ke instansi/Lembaga; dan 3. Menyusun materi advokasi yang lebih aplikatif dan kontekstual.
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Regulasi yang ditindaklanjuti	1. Belum disusunnya pedoman dalam pelaksanaan analisis dan evaluasi terhadap hasil kajian kebijakan dan regulasi 2. Belum terbentuk kesatuan pemahaman terhadap ruang lingkup kajian kebijakan dan	Melaksanakan koordinasi internal Direktorat PRKR dan konsultasi dengan unsur Pimpinan terkait dengan tahapan dalam pelaksanaan analisis dan evaluasi hasil kajian dan ruang lingkup kajian Direktorat PRKR

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
	regulasi yang dilaksanakan oleh Direktorat PRKR (berbasis Indikator Nilai Pancasila sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan BPIP Nomor 4 Tahun 2022)	
Persentase rekomendasi hasil analisis dan penyesuaian rancangan produk hukum nasional dengan nilai-nilai Pancasila yang ditindaklanjuti	Terdapat kesulitan dalam menderivasi meta norma Pancasila yang terdapat dalam Indikator Nilai Pancasila kedalam setiap norma rancangan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan.	Penyusunan penjelasan teknis masing-masing butir dalam Indikator Nilai Pancasila.
Persentase rekomendasi hasil advokasi pembinaan ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti	1. Koordinasi antar lembaga belum terbangun secara optimal; 2. Belum ada sistem pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi; dan 3. Rekomendasi belum sepenuhnya masuk ke agenda kerja lembaga sasaran.	1. Menjalin kerja sama melalui PKS dengan instansi terkait; 2. Menyusun mekanisme monitoring dan evaluasi berbasis indikator; dan 3. Menyesuaikan substansi rekomendasi dengan prioritas program lembaga sasaran.
Persentase rekomendasi hasil pengawasan kebijakan dan regulasi yang bertentangan dengan nilai Pancasila yang ditindaklanjuti	1. Belum disusunnya pedoman dalam pelaksanaan analisis dan evaluasi terhadap hasil kajian kebijakan dan regulasi 2. Belum terbentuk kesatuan pemahaman terhadap ruang lingkup kajian kebijakan dan regulasi yang dilaksanakan oleh Direktorat PRKR (berbasis Indikator Nilai Pancasila sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan BPIP Nomor 4 Tahun 2022)	Melaksanakan koordinasi internal Direktorat PRKR dan konsultasi dengan unsur Pimpinan terkait dengan tahapan dalam pelaksanaan analisis dan evaluasi hasil kajian dan ruang lingkup kajian Direktorat PRKR

Rekomendasi guna perbaikan dan peningkatan kinerja program, yaitu:

- a) Untuk melaksanakan perpanjangan tugas Deputy bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi sebagaimana diatur dalam organisasi dan tata kerja, perlu disusun arah kebijakan internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi dalam bentuk Peraturan BPIP;
- b) Perlu adanya penyempurnaan tata laksana guna mendukung pelaksanaan tugas analisis dan penyelarasan di Direktorat Analisis dan Penyelarasan;
- c) Mendorong penyusunan pedoman pelaksanaan advokasi pembinaan ideologi Pancasila dalam bentuk Peraturan Badan, sebagai acuan normatif dan operasional dalam penyelenggaraan kegiatan advokasi di seluruh tingkatan dan sektor. Kedua rekomendasi ini diharapkan memperkuat tata kelola serta efektivitas pelaksanaan advokasi ideologi Pancasila secara nasional;
- d) Mendorong disusunnya Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan mitra strategis sebagai dasar pelaksanaan kegiatan kajian dan advokasi pembinaan ideologi Pancasila secara berkelanjutan dan terarah; dan
- e) Mendorong tingkat Pimpinan dan melibatkan Biro Perencanaan dan Keuangan dalam hal Menyusun format atau bentuk Surat Pengantar penyampaian Rekomendasi hasil Kajian Regulasi dan Kebijakan melalui tahap Deputy Bidang Hukum Advokasi dan Pengawasan Regulasi ke Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan meminta arahan dan pertimbangan dari Ketua Dewan Pengarah BPIP.

3. Kendala dan rekomendasi tindak lanjut terwujudnya perumusan arah kebijakan, pengkajian, dan standardisasi materi PIP.

Kendala dan faktor penghambat pelaksanaan program, yaitu:

Tabel 4. 3 Kendala dan Tindak Lanjut Terwujudnya Perumusan Arah Kebijakan, Pengkajian, dan Standardisasi Materi PIP

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
Persentase rekomendasi hasil pengkajian kebijakan yang dimanfaatkan	Masih dilakukan penyusunan dokumen kajian sehingga belum dapat dimanfaatkan oleh pihak lain.	Melakukan pelaporan progres penyusunan rekomendasi secara berkala kepada pimpinan.
Persentase rekomendasi hasil pengkajian materi yang dimanfaatkan	Adanya efisiensi anggaran di setiap Lembaga.	1. Melaksanakan kolaborasi dengan Kementerian Pendidikan dasar dan menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi sains dan Teknologi dan Kementerian/Lembaga terkait; dan 2. Melaksanakan kegiatan di dalam kantor dengan melibatkan narasumber.
Persentase rekomendasi hasil pengkajian implementasi yang dimanfaatkan	1. Kendala Pengolahan data dan penyusunan laporan masih berlangsung 2. Pembahasan kerangka konseptual dan metodologi	1. Menyelesaikan laporan dan hasil kajian 2. Integrasi seluruh hasil kajian.
Persentase Rekomendasi Kajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti	Proses penyusunan rekomendasi yang melibatkan lintas <i>stakeholder</i> sehingga diperlukan waktu yang cukup panjang;	Peningkatan efektivitas komunikasi dengan <i>stakeholder</i> terkait;
Persentase rekomendasi kajian standardisasi materi PIP yang ditindaklanjuti	Adanya efisiensi anggaran di setiap Lembaga.	Melaksanakan kegiatan di dalam kantor dengan melibatkan narasumber.
Persentase rekomendasi kajian implementasi PIP yang ditindaklanjuti	1. Pada Triwulan II, kegiatan masih berada pada tahap awal (perencanaan, pengumpulan	1. Mempercepat tahapan kajian melalui penguatan DKT, forum koordinasi, dan pengumpulan data

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
	data, analisis awal), sehingga dokumen rekomendasi belum tersusun; dan 2. Kompleksitas isu lintas sektor memerlukan pendalaman analisis sebelum perumusan rekomendasi.	lapangan; dan 2. Menerapkan pendekatan untuk mempercepat perumusan rekomendasi yang tajam dan aplikatif.

Rekomendasi guna perbaikan dan peningkatan kinerja program yaitu:

- Menyusun prioritas kegiatan didasarkan pada ketersediaan anggaran agar unit kerja tetap dapat melaksanakan kegiatan secara maksimal;
- Komitmen bersama antar unit kerja dalam mempertanggung jawabkan pelaksanaan kegiatan dalam bentuk laporan keuangan maupun laporan kegiatan;
- Melanjutkan proses finalisasi dan akseptasi dokumen rekomendasi kajian identifikasi nilai ideologi Pancasila agar dapat segera dimanfaatkan sebagai dasar kebijakan dan penguatan materi pembinaan ideologi Pancasila;
- Memperkuat integrasi data sektoral dari kementerian/lembaga terkait, termasuk pemerintah daerah, untuk meningkatkan representativitas, validitas, dan aplikasi rekomendasi kebijakan secara nasional;
- Mengoptimalkan pendekatan sampling berbasis wilayah, tipologi kelembagaan, dan karakteristik satuan pendidikan untuk mendukung kajian yang representatif dan aplikatif, terutama pada satuan pendidikan swasta yang jumlahnya besar;
- Memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas unit kerja serta forum pemangku kepentingan untuk memastikan tindak lanjut rekomendasi dapat diterapkan secara efektif;

- g) Mengembangkan mekanisme *review* substansi dan *quality assurance* dalam penyusunan rekomendasi agar tetap berbasis evidensi, relevan, dan adaptif terhadap dinamika sosial, budaya, dan kebijakan nasional;
- h) Menyelesaikan proses penyempurnaan dan finalisasi Pedoman Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila sebagai pedoman operasional yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan pengkajian implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila secara sistematis, objektif, dan terukur.
- i) Menuntaskan penyelesaian empat kajian implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila yang dimulai pada Triwulan I melalui penyelesaian dokumen hasil kajian, validasi substansi, dan penyusunan rekomendasi kebijakan sesuai dengan hasil pengkajian.
- j) Melanjutkan pengembangan Kajian Implementasi Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagai kajian utama melalui penyempurnaan kerangka konseptual, metodologi, serta integrasi hasil pengkajian sebagai dasar pelaksanaan kajian implementasi pada sektor-sektor strategis.
- k) Melaksanakan pengumpulan data lapangan pada tiga kajian antara, yaitu Kajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila pada Duta Pancasila Paskibraka Indonesia, Bidang Pendidikan, dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan jadwal pelaksanaan Triwulan III Tahun 2026.
- l) Memperkuat koordinasi dan sinergi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, serta pemangku kepentingan lainnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan pengkajian, peningkatan kualitas data, dan validitas hasil kajian.
- m) Mengoptimalkan pelaksanaan analisis dan pengolahan data, validasi (akseptasi), penyusunan rekomendasi kebijakan, serta diseminasi hasil pengkajian agar rekomendasi yang dihasilkan berbasis bukti (*evidence-based policy*), implementatif, dan dapat

ditindaklanjuti oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, maupun pemangku kepentingan terkait.

- n) Melaksanakan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara berkala guna memastikan seluruh tahapan pengkajian, penyelesaian rekomendasi kebijakan, serta pencapaian target Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

4. Kendala dan rencana tindak lanjut Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Kendala dan faktor penghambat pelaksanaan program, yaitu:

Tabel 4. 4 Kendala dan Tindak Lanjut Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
Persentase tenaga pengajar Pancasila yang tersertifikasi	Banyak peserta yang belum mengetahui prosedur pendaftaran sertifikasi pengajar Diklat PIP.	Melakukan sosialisasi pendaftaran sertifikasi pengajar Diklat PIP melalui sistem aplikasi kepada Kementerian, Lembaga, dan Pemda.
Persentase lembaga penyelenggara diklat pembinaan ideologi Pancasila yang terakreditasi	Belum maksimalnya Diklat PIP oleh Lembaga penyelenggara Diklat PIP.	Melakukan rapat koordinasi menindaklanjuti hasil akreditasi penyelenggara Diklat PIP.
Persentase peserta Diklat berkepribadian Pancasila dengan tingkat baik	Belum tersedianya peraturan terkait mekanisme secara teknis operasional dalam hal sinergi, kolaborasi dan gotong-royong pemanfaatan sumber daya nasional dalam penyelenggaraan Diklat PIP.	Melakukan komunikasi strategis dalam rangka pengembangan dan penerapan kebijakan/strategi untuk mewujudkan kesepakatan/peraturan terkait hubungan lembaga antara BPIP dengan K/L/Instansi terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah demi terselenggaranya Diklat PIP yang terstruktur, sistematis, dan masif secara nasional.

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
Persentase Pengajar Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila yang Bersertifikat	1. Keputusan Kepala BPIP Nomor 60 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Pengajar Diklat PIP belum diketahui oleh seluruh K/L/Instansi terkait di tingkat pusat dan daerah; 2. Terbatasnya SDM dalam sekretariat tim asesor sertifikasi pengajar Diklat PIP dalam melakukan verifikasi dan validasi berkas; 3. Durasi proses rekam jejak oleh Badan Intelijen Negara yang memerlukan waktu estimasi selama tiga bulan menjadi hambatan dalam akselerasi pemenuhan kebutuhan pengajar; 4. Belum adanya kekuatan hukum tetap pada hasil keputusan sertifikasi pengajar Diklat PIP mengakibatkan ketetapan tersebut masih bersifat <i>debatable</i> dan dapat diganggu gugat oleh peserta, yang pada gilirannya berpotensi menurunkan kredibilitas lembaga serta menciptakan ketidakpastian administratif dalam penetapan kelulusan; 5. Mekanisme penandatanganan sertifikat pengajar Diklat PIP yang masih dilakukan secara manual oleh Kepala BPIP menimbulkan hambatan administratif berupa durasi waktu penyelesaian yang cukup lama, sehingga menghambat distribusi sertifikat dan legalitas kewenangan pengajar	1. Melakukan diseminasi Keputusan Kepala BPIP Nomor 60 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Pengajar Diklat PIP dengan mengundang K/L/Instansi terkait di tingkat pusat dan daerah; 2. Berkoordinasi dengan bagian Biro Umum dan SDM BPIP untuk pemenuhan kekurangan SDM tersebut; 3. Diperlukan penguatan koordinasi interlembaga untuk memastikan proses rekam jejak tetap berjalan sesuai prosedur tanpa menghambat proses berikutan dalam sertifikasi pengajar Diklat PIP; 4. perlu dilakukan penguatan aspek legalitas melalui penyusunan regulasi atau pakta integritas yang menetapkan bahwa hasil penilaian tim asesor bersifat final dan mengikat (final and binding), serta didukung oleh transparansi rubrik penilaian dan berita acara yang akuntabel untuk memitigasi risiko gugatan di kemudian hari; 5. berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam melakukan transisi menuju implementasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) yang tersertifikasi guna memangkas birokrasi, mempercepat proses penerbitan sertifikat, dan menjamin validitas dokumen secara lebih aman dan akuntabel; dan 6. Sebagai langkah

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
	di lapangan; dan 6. Pemanfaatan pengajar Diklat PIP pasca-sertifikasi belum berjalan secara optimal akibat belum terintegrasinya sistem manajemen database pengajar, sehingga distribusi penugasan dan pemantauan kinerja pengajar belum dapat terpetakan secara sistematis dan maksimal.	strategis, perlu dikembangkan platform manajemen pengajar terintegrasi yang mencakup repositori kompetensi dan rekam jejak penugasan guna memastikan pendayagunaan alumni sertifikasi dilakukan secara profesional, merata, dan berbasis pada kebutuhan.
Persentase Penyelenggara Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila yang Terakreditasi	1. Penjaminan mutu Diklat PIP oleh lembaga terakreditasi diselenggarakan melalui standarisasi tata kelola dan audit kompetensi yang komprehensif guna memastikan seluruh proses instruksional berjalan selaras dengan parameter NSPK demi menghasilkan <i>output</i> pembelajaran yang kredibel dan berdampak luas; 2. Keputusan Kepala BPIP Nomor 52 Tahun 2024 tentang Pedoman Akreditasi Penyelenggara Diklat PIP belum diketahui oleh seluruh K/L/Instansi terkait di tingkat pusat dan daerah; dan 3. Belum tersedianya Dana Alokasi Khusus (DAK) bagi lembaga penyelenggara yang telah terakreditasi mengakibatkan keterbatasan ruang gerak finansial dalam mengimplementasikan Diklat PIP, sehingga standarisasi mutu yang telah ditetapkan sulit diwujudkan secara konsisten di tingkat daerah maupun	1. Berkoordinasi dengan Direktorat Pelaksanaan Diklat BPIP untuk setiap pelaksanaan Diklat PIP oleh Lembaga terakreditasi akan dilakukan monitoring dan evaluasi untuk penjaminan mutu terhadap Diklat PIP; 2. Melakukan diseminasi Keputusan Kepala BPIP Nomor 52 Tahun 2024 tentang Pedoman Akreditasi Penyelenggara Diklat PIP dengan mengundang K/L/Instansi terkait di tingkat pusat dan daerah; dan 3. Sebagai langkah strategis, perlu dilakukan advokasi kebijakan dan koordinasi lintas sektoral untuk mendorong perumusan regulasi mengenai skema pendanaan yang inovatif atau pengalokasian DAK spesifik guna memastikan keberlanjutan operasional serta pemerataan kualitas pelaksanaan Diklat PIP di seluruh lembaga terakreditasi.

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
	instansi.	
Persentase Standardisasi dan Kurikulum Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila yang dimanfaatkan.	Penyelenggaraan Diklat PIP dan Diklat bagi Pengajar Diklat PIP belum secara optimal sesuai dengan Keputusan Kepala BPIP Nomor 44 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Diklat PIP dan Keputusan Kepala BPIP Nomor 45 Tahun 2024 tentang Standar dan Kurikulum Diklat PIP.	Melakukan koordinasi internal dan menyampaikan hasil evaluasi hasil Diklat PIP dan Diklat bagi Pengajar Diklat PIP kepada Direktorat Penyelenggaraan Diklat.
Persentase Purnapaskibraka yang menjadi Duta Pancasila	Diklat bagi Purnapaskibraka bisa dilakukan setelah Hari Lahir Pancasila agar Paskibraka yang bertugas di tahun sebelumnya bisa disebut sebagai Purnapaskibraka. Saat ini proses diklat PIP masih terus berjalan untuk 2 angkatan. Diklat PIP diselenggarakan oleh Direktorat Pelaksanaan Diklat.	Segera mengagendakan diklat PIP bagi Purnapaskibraka yang belum mendapatkan diklat setelah pelaksanaan tugas pada Hari Lahir Pancasila pada Tahun 2026..
Persentase peserta Diklat berkepribadian Pancasila	1. Belum adanya rumusan variabel dan indikator pada Instrumen Indeks Aktualisasi Pancasila yang terkait dengan penyelenggaraan Diklat PIP; 2. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan Diklat PIP; dan 3. Belum tersedianya sarana dan prasarana Diklat PIP mandiri.	1. Melakukan komunikasi strategis dalam rangka penyempurnaan Instrumen Indeks Aktualisasi Pancasila; 2. Melakukan pengembangan sistem manajemen terintegrasi Diklat PIP berbasis teknologi informasi dan komunikasi berupa Learning Management System, yang spesifik dan sesuai dengan karakteristik segmen peserta diklat; dan 3. Memanfaatkan sarana dan prasarana Diklat yang dimiliki K/L/Instansi terkait di tingkat pusat dan daerah, dan memenuhi kebutuhan sarana prasarana minimal penyelenggaraan Diklat PIP.

Penyelenggaraan Diklat PIP pada Triwulan II Tahun 2026 menghadapi kendala-kendala dari aspek dukungan regulasi/kebijakan, keterbatasan sumber daya, sehingga perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan program kegiatan pada Triwulan II Tahun 2026 dengan melakukan komunikasi strategis dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal BPIP dalam rangka kolaborasi/gotong royong dalam:

- a) Akselerasi pelaksanaan kegiatan dan kepatuhan terhadap jadwal pelaksanaan kegiatan;
- b) Pengembangan dan penerapan kebijakan strategis dan program teknis untuk mewujudkan gotong royong kolaboratif, integratif, dan sinergis dalam pemanfaatan sumber daya (SDM, finansial, sarana prasarana, data informasi) antara BPIP dengan lembaga negara, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Diklat PIP yang terstruktur, sistematis, dan masif secara nasional bagi aparatur negara, orsospol, dan komponen masyarakat lainnya;
- c) Pembangunan dan penerapan Sistem Manajemen Terintegrasi Diklat PIP berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan Diklat PIP dan pelaksanaan PIP dalam Diklat calon Paskibraka;
- d) Akselerasi pelaksanaan kegiatan dan kepatuhan terhadap jadwal pelaksanaan kegiatan;
- e) Pembangunan sarana dan prasarana pelaksanaan Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila sesuai standard dan kebutuhan;
- f) Pengembangan sistem dan metode pelaksanaan Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- g) Fasilitasi pelaksanaan akreditasi penyelenggara Diklat PIP serta sertifikasi penceramah/fasilitator dan pengajar Diklat

PIP untuk mendorong penyelenggaraan Diklat PIP secara instansional di lembaga negara, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah;

- h) Eskalasi pelaksanaan sertifikasi pengajar dan akreditasi penyelenggara Diklat PIP secara masif memerlukan penguatan payung hukum sekurang-kurangnya pada tingkat Peraturan Presiden guna memberikan landasan konstitusional yang kuat bagi kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah dalam mengalokasikan sumber daya secara optimal demi teralisasinya ekosistem pendidikan dan pelatihan yang terstandarisasi dan berkesinambungan;
- i) Segera merealisasikan pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bagi pengurus DPPI guna menyamakan persepsi, visi, dan standar gerakan di seluruh tingkatan;
- j) Mempercepat pengembangan dan implementasi sistem pelaporan tugas DPPI berbasis digital yang terkoneksi langsung antara pusat dan daerah, sehingga monitoring performa serta dampak aksi daerah dapat terukur secara *real-time*;
- k) Menyusun linimasa (*timeline*) yang ketat untuk segera mengagendakan dan menyelesaikan sisa gelombang Diklat PIP bagi Purnapaskibraka yang belum terjaring setelah penugasan Hari Lahir Pancasila; dan
- l) Meningkatkan koordinasi intensif dengan Direktorat Pelaksanaan Diklat guna memastikan kesiapan kapasitas dan kelancaran proses diklat PIP bagi angkatan-angkatan berikutnya.

5. Kendala dan rencana tindak lanjut Terlaksananya pengukuran dan evaluasi pembinaan ideologi Pancasila

Kendala dan faktor penghambat pelaksanaan program, yaitu:

Tabel 4. 5 Kendala dan Tindak Lanjut Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi PIP

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
Persentase rekomendasi hasil pengendalian pembinaan ideologi Pancasila yang dimanfaatkan	1. Belum tersedianya dokumen atau payung hukum sebagai acuan resmi dalam pelaksanaan pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP). Ketidadaan landasan hukum formal menyebabkan belum adanya kepastian regulatif yang menjadi rujukan dalam pelaksanaan fungsi pengendalian. Hal ini turut menghambat proses penyusunan rekomendasi yang berbasis kebijakan secara sistematis dan kredibel; 2. Belum disahkannya pedoman pengendalian program PIP hal ini menyebabkan belum adanya kerangka teknis yang dapat dijadikan panduan dalam proses pengendalian. Akibatnya, pelaksanaan pengendalian terhadap kegiatan PIP berjalan tidak seragam dan kurang terdokumentasi secara konsisten.	1. Menyusun dokumen kebijakan dalam bentuk Peraturan BPPI atau pedoman teknis yang menjadi dasar hukum pelaksanaan pengendalian PIP; 2. Mensahkan metode pengendalian. Agar metode ini bisa diaplikasikan dan dapat diterapkan secara menyeluruh, meliputi prosedur pelaksanaan, instrumen pengendalian, serta mekanisme pelaporan dan tindak lanjut; 3. Melakukan konsolidasi dalam rangka penyampaian informasi secara aktif kepada seluruh unit kerja internal maupun mitra eksternal terkait fungsi dan mandat Direktorat Pengendalian. Ini dilakukan melalui forum koordinasi; 4. Melakukan penguatan kapasitas tim pengendalian melalui pelatihan teknis, dan pendampingan agar mampu menjalankan peran pengendalian secara efektif dan adaptif; dan 5. Mendorong integrasi peran Direktorat Pengendalian dalam setiap tahapan pelaksanaan program PIP, agar pengendalian menjadi bagian integral dalam tata pelaksanaan program.

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
	3. Masih rendahnya pemahaman terhadap peran Direktorat Pengendalian dalam pelaksanaan program PIP di lingkungan internal BPIP maupun mitra eksternal.	
Persentase rekomendasi hasil evaluasi pembinaan ideologi Pancasila yang dimanfaatkan	1. Membutuhkan koordinasi dan diskusi lebih lanjut untuk mengharmonisasikan draf pedoman pengendalian dan evaluasi dengan Biro Hukum dan Organisasi dan unit kerja lainnya untuk dijadikan Peraturan Badan. 2. Perlunya revisi hasil validasi konten instrumen evaluasi hasil kebudayaan nilai - nilai Pancasila. 3. Evaluasi Hasil Diklat PIP dilaksanakan secara online. 4. Perlunya uji reliabilitas instrumen Evaluasi Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.	1. Dilaksanakannya koordinasi lintas direktorat dan biro untuk mengharmonisasikan substansi draf pedoman pengendalian dan evaluasi. 2. Dilaksanakannya pemuktahiran instrumen evaluasi hasil kebudayaan nilai - nilai Pancasila. 3. Dilaksanakannya follow up pengisian survei melalui grup - grup alumni diklat yang ada. 4. Dilaksanakannya Uji Coba kedua Evaluasi Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka untuk validitas konstruk instrumen.
Persentase rekomendasi hasil pengukuran aktualisasi Pancasila yang dimanfaatkan	1. Buku pedoman pengukuran pelebagaan Pancasila sudah ditetapkan dan namun untuk Pengukuran IAP masih berproses; 2. Rekomendasi pengembangan metodologi tersebut masih perlu mendapatkan legitimasi dari pejabat yang berwenang agar dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan pengukuran tahun 2026; dan 3. BPIP belum optimal dalam menyediakan dan	1. Melakukan koordinasi untuk melakukan penyusunan pengembangan metodologi pengukuran pelebagaan dan pengukuran IAP dengan BHO; dan 2. Perlunya pendistribusian data IAP secara terbuka, terstruktur, dan mudah diakses. Data tersebut sangat dibutuhkan oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk melakukan intervensi dalam menyusun kebijakan dan regulasi.

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
	mendiseminasikan data hasil Indeks Aktualisasi Pancasila (IAP) kepada pemerintah daerah.	
Persentase rekomendasi hasil pengendalian pembinaan ideologi Pancasila yang dimanfaatkan	1. Belum tersedianya dokumen atau payung hukum sebagai acuan resmi dalam pelaksanaan pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP); 2. Ketiadaan landasan hukum formal menyebabkan belum adanya kepastian regulatif yang menjadi rujukan dalam pelaksanaan fungsi pengendalian. Hal ini turut menghambat proses penyusunan rekomendasi yang berbasis kebijakan secara sistematis dan kredibel; 3. Belum tersusunnya metode pengendalian program PIP secara terstandarisasi. Ketiadaan metode yang baku menyebabkan belum adanya kerangka teknis yang dapat dijadikan panduan dalam proses pengendalian. Akibatnya, pelaksanaan pengendalian terhadap kegiatan PIP berjalan tidak seragam dan kurang terdokumentasi secara konsisten; dan 4. Fungsi Pengendalian	1. Menyusun dokumen kebijakan dalam bentuk Peraturan BPPIP atau pedoman teknis yang menjadi dasar hukum pelaksanaan pengendalian PIP; 2. Merancang metode pengendalian yang bersifat aplikatif dan dapat diterapkan secara menyeluruh, meliputi prosedur pelaksanaan, instrumen pengendalian, serta mekanisme pelaporan dan tindak lanjut; 3. Melakukan konsolidasi dalam rangka penyampaian informasi secara aktif kepada seluruh unit kerja internal maupun mitra eksternal terkait fungsi dan mandat Direktorat Pengendalian. Ini dilakukan melalui forum koordinasi; 4. Melakukan penguatan kapasitas tim pengendalian melalui pelatihan teknis, dan pendampingan agar mampu menjalankan peran pengendalian secara efektif dan adaptif; dan 5. Mendorong integrasi peran Direktorat Pengendalian dalam setiap tahapan pelaksanaan program PIP, agar pengendalian menjadi bagian integral dalam tata pelaksanaan program.

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
	belum dianggap hal yang sangat penting oleh penerima manfaat.	
Persentase Rekomendasi Evaluasi Pembinaan Ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti	1. Membutuhkan koordinasi dan diskusi lebih lanjut untuk mengharmonisasikan draf pedoman pengendalian dan evaluasi dengan Biro Hukum dan Organisasi dan unit kerja lainnya untuk dijadikan Peraturan Badan. 2. Perlunya revisi hasil validasi konten instrumen Evaluasi Hasil Pembudayaan Nilai - Nilai Pancasila. 3. Evaluasi Hasil Diklat PIP dilaksanakan secara <i>online</i>. 4. Perlunya uji reliabilitas instrumen Evaluasi Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka	1. Dilaksanakannya koordinasi lintas direktorat dan biro untuk mengharmonisasikan substansi draf pedoman pengendalian dan evaluasi. 2. Dilaksanakannya pemuktahiran instrumen evaluasi hasil pembudayaan nilai - nilai Pancasila. 3. Dilaksanakannya <i>follow up</i> pengisian survei melalui grup - grup alumni diklat yang ada. 4. Dilaksanakannya Uji Coba kedua Evaluasi Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka untuk validitas konstruk instrumen.
Persentase Pengukuran Pelembagaan Pancasila yang ditindaklanjuti	1. Pelaksanaan pengukuran masih dipengaruhi oleh dinamika organisasi serta keterbatasan ruang pengaturan, sehingga belum dapat berjalan secara optimal dan menyeluruh; dan 2. Sehubungan dengan upaya efisiensi anggaran, terdapat rencana untuk melakukan penghematan lebih lanjut. Rencana efisiensi ini juga berpotensi berdampak pada pelaksanaan pengukuran, baik dari sisi cakupan kegiatan, waktu pelaksanaan, maupun sumber daya yang tersedia.	1. Penguatan legitimasi bisa dalam bentuk penyusunan peraturan sebagai landasan pengukuran; dan 2. Penyesuaian kegiatan Pengukuran Pelembagaan Pancasila agar sesuai anggaran yang tersedia.

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
Persentase Pengukuran Aktualisasi Pancasila yang ditindaklanjuti	Hasil capaian IAP yang masih bersifat tertutup Dengan capaian IAP bersifat tertutup, maka <i>output</i> rekomendasi pengukuran Aktualisasi Pancasila tidak dapat disampaikan ke pihak terkait.	Penguatan dasar hukum dalam bentuk penyusunan Surat Keputusan Kepala tentang Pedoman Pengukuran Aktualisasi Pancasila sebagai landasan pengukuran IAP.

Rekomendasi peningkatan atau perbaikan Sasaran Program terlaksananya pengendalian dan evaluasi PIP adalah:

- Mendorong percepatan penyusunan dan penetapan regulasi yang menjadi dasar hukum pelaksanaan pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila, baik dalam bentuk Peraturan BPIP maupun pedoman teknis internal;
- Memprioritaskan pengesahan metode pengendalian program PIP, agar pelaksanaan fungsi pengendalian dapat dilakukan secara terukur, konsisten, dan terdokumentasi dengan baik;
- Mensosialisasikan kepada pihak internal dan eksternal untuk meningkatkan pemahaman terhadap posisi strategis Direktorat Pengendalian sebagai pengawal kesesuaian implementasi program PIP dengan kebijakan dan arah strategis BPIP;
- Memastikan integrasi fungsi pengendalian dalam seluruh siklus pelaksanaan program PIP;
- Penyelesaian Penyelesaian Pedoman Evaluasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan ditetapkan melalui regulasi sesuai ketentuan yang berlaku;
- Pembuatan Petunjuk Teknis pelaksanaan Evaluasi Pembinaan Ideologi Pancasila;
- Perlu dilakukan percepatan finalisasi dan penetapan metodologi pengukuran agar sepenuhnya selaras dengan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila. Penyempurnaan metodologi yang telah dihasilkan melalui evaluasi sebelumnya harus diterjemahkan ke dalam pedoman teknis yang lebih operasional

- dan terstandar, sehingga implementasi di lapangan dapat berlangsung lebih konsisten dan akuntabel;
- h) Perlu dilakukan penguatan dasar hukum melalui penyusunan Surat Keputusan Kepala tentang Pedoman Pengukuran Aktualisasi Pancasila serta regulasi pendukung lainnya guna meningkatkan legitimasi dan keterbukaan hasil pengukuran. Selain itu, diperlukan penyesuaian desain dan pelaksanaan kegiatan pengukuran agar lebih adaptif terhadap dinamika organisasi dan keterbatasan anggaran, tanpa mengurangi kualitas dan cakupan substansi pengukuran. Optimalisasi perencanaan, prioritas kegiatan, serta efisiensi penggunaan sumber daya menjadi kunci agar pengukuran tetap berjalan efektif dan berkelanjutan;
 - i) Proses pengajuan kebutuhan SDM yang telah berjalan harus segera ditindaklanjuti melalui percepatan pengisian peta jabatan yang telah diusulkan. Posisi-posisi strategis yang berkaitan langsung dengan pengukuran harus menjadi prioritas untuk diisi agar pelaksanaan program dapat berlangsung lebih optimal; dan
 - j) BPIP belum optimal dalam menyediakan dan mendiseminasikan data hasil Indeks Aktualisasi Pancasila (IAP) kepada pemerintah daerah dan pihak terkait. Padahal, pendistribusian data IAP secara terbuka, terstruktur, dan mudah diakses sangat penting bagi pemerintah daerah sebagai landasan dalam melakukan intervensi kebijakan. Data hasil Indeks Aktualisasi Pancasila (IAP) dapat menjadi rujukan untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan selaras dengan arah kebijakan nasional dalam RPJMN, sekaligus mendukung penyusunan dokumen perencanaan daerah (RPJMD).

6. Kendala dan rencana tindak lanjut terlaksananya Dukungan Manajemen

Tabel 4. 6 Kendala dan Tindak Lanjut terlaksananya Dukungan Manajemen

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
Persentase pemenuhan dokumen perencanaan sesuai standar	Keterlambatan penyampaian dokumen usulan revisi anggaran dari unit kerja sehingga menghambat penerbitan dokumen revisi anggaran.	Perlu diadakan rapat bersama unit kerja tata cara revisi anggaran.
Persentase laporan keuangan yang tepat waktu keuangan	laporan keuangan 2026 audited sedang dalam proses penyusunan, kemarin terhambat akibat maintenance aplikasi SAKTI.	Melakukan komunikasi dengan pihak terkait, seperti Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Direktorat Sistem Informasi Teknologi Perbendaharaan, dan Badan Pemeriksa Keuangan.
Persentase pemenuhan dokumen laporan kinerja sesuai standar	Penyampaian Laporan dari unit kerja melebihi waktu yang telah ditetapkan sehingga memperhambat dalam penyusunan laporan kinerja.	Mengadakan rapat kepada unit kerja untuk menentukan penanggung jawab dalam penyusunan laporan kinerja.
Persentase rancangan produk hukum yang ditindaklanjuti	- RUU BPIP belum dilakukan pembahasan oleh DPR RI dan Pemerintah; dan - Unit organisasi pemrakarsa tidak menyampaikan draf Rancangan Peraturan BPIP sebagaimana tercantum dalam Program Penyusunan Peraturan BPIP Triwulan II Tahun 2026. Dari target sebanyak 6 Peraturan BPIP yang diundangkan hanya 1 Peraturan BPIP (16,6%).	- Menunggu Surat Presiden untuk penunjukan wakil pemerintah dalam pembahasan RUU BPIP; dan - Meningkatkan intensitas koordinasi dan asistensi Biro Hukum dan Organisasi dan mendorong komitmen kepada unit organisasi pemrakarsa.
Persentase rekomendasi penataan organisasi dan reformasi birokrasi yang ditindaklanjuti	- Respon unit kerja terhadap Evaluasi Peta Proses Bisnis; dan - Perubahan Mekanisme dan Evaluasi Pelaksanaan RB.	- Melakukan Rapat Koordinasi Penyusunan Peta Proses Bisnis; dan - Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian RB dengan pihak Internal BPIP dan Eksternal baik Instansi Pembina

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
		maupun Instansi Meso.
Persentase kepuasan unit kerja terhadap layanan kerumahtanggaan, layanan pengelolaan BMN, dan layanan manajemen SDM	1. Kurangnya pengembangan Kompetensi SDM terkait BMN; 2. Pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi melibatkan koordinasi dengan berbagai pihak sehingga diperlukan sinkronisasi jadwal, kesiapan peserta, dan dukungan administrasi; dan 3. Belum seluruh unit kerja menyampaikan hasil verifikasi dan validasi dokumen rumpun jabatan secara lengkap sesuai target waktu.	1. Segera menyusun rencana pengembangan Kompetensi SDM terkait BMN; 2. Meningkatkan koordinasi dengan penyelenggara pelatihan, unit kerja, dan peserta melalui monitoring berkala serta penyempurnaan mekanisme persiapan kegiatan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program pengembangan kompetensi; dan 3. Melakukan monitoring dan tindak lanjut kepada unit kerja yang belum menyampaikan hasil verifikasi, serta melakukan finalisasi dokumen rumpun jabatan sebagai dasar penyusunan rencana pengembangan kompetensi lima tahunan.
Persentase kepuasan unsur pimpinan terhadap dukungan layanan keprotokolan dan administrasi yang diberikan	Kompetensi SDM Biro masih rendah.	Peningkatan Kompetensi SDM melalui Diklat Kompetensi atau Bimbingan Teknis.
Nilai indeks Keterbukaan Informasi Publik BPIP	Pelaksanaan tahapan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik masih berlangsung sehingga beberapa dokumen dukung dari unit kerja masih dalam proses penyempurnaan dan pengumpulan.	Melakukan koordinasi intensif dengan seluruh unit kerja untuk melengkapi dokumen dukung, memperbarui Daftar Informasi Publik, meningkatkan kualitas layanan PPID, serta

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
		memastikan seluruh tahapan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan..
Nilai pengawasan kearsipan	Pengawasan Kearsipan Internal, masih banyak Unit Kerja yang belum melakukan pengelolaan arsip Aktif pada Unit Kerja dengan Baik, hal tersebut karena BPIP belum memiliki SDM Kearsipan yang fokus untuk melakukan Pengelolaan arsip, dan BPIP belum memiliki NSPK Kearsipan yang menjadi syarat pelaksanaan kearsipan Internal.	Melakukan sosialisasi kepada Unit Kerja yang belum melakukan pengelolaan arsip Aktif pada Unit Kerja dengan Baik.
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	1. Masih perlu meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMN serta memproses hasil inventarisasi peralatan dan mesin yang tidak diketahui keberadaannya; 2. Masih terdapat proses penghapusan BMN belum tertib; 3. Terdapat Kesalahan Pembebanan Penggunaan Mata Anggaran Belanja; 4. Penatausahaan atas Persediaan Belum Tertib; 5. Penatausahaan atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin Belum Tertib; dan 6. Belanja Barang dan Jasa pada Kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Belum Sesuai Ketentuan.	1. Telah memberikan surat jawaban dari petugas pengelola BMN yang menyatakan kesediaan melaksanakan perintah Sestama untuk lebih tertib dalam proses penghapusan aset dan surat jawaban Kepala Subbag Manajemen BMN yang menyatakan kesediaan melaksanakan perintah Sestama untuk lebih tertib dalam proses penghapusan aset.
Nilai tingkat Maturitas SPIP (Skala 1 s.d. 5)	1. Memperbaiki perencanaan dengan memperhatikan <i>cascading</i> kinerja sesuai proses bisnis yang didukung dengan indikator kinerja yang berorientasi outcome, memenuhi kriteria SMART, dan didukung target yang tepat; 2. Menerapkan dan melakukan penyempurnaan implementasi manajemen	1. Pemenuhan Regulasi atas Manajemen Risiko; 2. Pemenuhan <i>Area of Improvement</i> atas Pelaksanaan Evaluasi pada tahun sebelumnya;

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
	risiko secara menyeluruh di seluruh unit kerja; 3. Memperbaharui kebijakan Manajemen Risiko dengan menambahkan substansi terkait pembangunan budaya risiko, penetapan risk appetite, strategi <i>antifraud</i>; 4. pelaksanaan evaluasi atas desain dan implementasi manajemen risiko; 5. Melakukan identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko kemitraan pada seluruh kemitraan/kerja sama internal dan eksternal serta risiko <i>fraud</i> pada seluruh proses bisnis; 6. Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk penerapan manajemen risiko dan peningkatan pemahaman SDM terkait manajemen risiko; 7. Menetapkan unit pengelola risiko yang bertugas melakukan monitoring pelaksanaan RTP dan efektivitasnya; 8. Menerapkan manajemen risiko mulai dari perencanaan, pelaksanaan proses bisnis, dan dalam pengambilan keputusan di unit kerja; 9. Menyusun dan mengimplementasikan kebijakan antikorupsi dan kode etik serta didukung SOP yang mencakup tiga prinsip dalam pengelolaan risiko korupsi, yakni cegah, deteksi, dan respon; dan 10. Mengoptimalkan penggunaan saluran pengaduan dengan memastikan perlindungan terhadap pelapor dan ditindaklanjutinya pengaduan.	3. Penyediaan Jasa Konsultansi Pendampingan atas Penilaian Manajemen Risiko di Lingkungan BPIP kepada seluruh Unit Kerja; 4. Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Manajemen Risiko di Lingkungan BPIP; 5. Penyediaan Jasa Konsultansi Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi; dan 6. Pelaksanaan Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi.

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
Tingkat maturitas SPBE/ layanan data dan informasi	1. Keterbatasan SDM Teknis; 2. Teknologi yang terus berkembang dengan cepat; dan 3. Terjadi serangan ransomware pada 20 Juni 2026 pada Pusat Data Nasional yang mengakibatkan aplikasi BPIP tidak dapat diakses.	1. Perlu penambahan SDM Teknis; 2. Perlu melakukan pengembangan kompetensi SDM; dan 3. Melakukan rapat koordinasi untuk pembahasan langkah dan tindakan kedepannya.

Rekomendasi peningkatan atau perbaikan Sasaran Program terlaksananya pengendalian dan evaluasi PIP adalah:

- a) Perlu adanya penguatan area perbaikan melalui koordinasi antar unit kerja dan/atau unit organisasi di lingkungan BPIP serta penguatan kompetensi APIP dalam rangka penilaian SPIP selaku tim penjamin kualitas;
- b) Pada tindak lanjut dari temuan BPK perlu adanya kolaborasi antar unit kerja di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- c) Perlu peningkatan koordinasi, komunikasi dan perhatian yang lebih dari para pengelola Keuangan (PPK) dalam penyediaan data Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa serta TP3DN (Penggunaan Produk Dalam Negeri) sehingga data yang didapat menjadi representatif dalam menghasilkan kualitas informasi yang dibutuhkan oleh BPKP untuk pelaporannya kepada Presiden RI;
- d) Perlu adanya Pembuatan *Timeline* yang jelas mengenai pelaksanaan Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas di BPIP sehingga sesuai dengan batas waktu penyampaian laporan hasil maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi yang ditentukan oleh BPKP serta Pelaksanaan monitoring dan pendampingan secara berkala oleh Biro Pengawasan Internal atas

- penyampaian data dukung SPIP Terintegrasi sehingga proses Penilaian Mandiri oleh Manajemen tidak mengalami kendala;
- e) Untuk meningkatkan kualitas penetapan tujuan, perlunya untuk BPIP melakukan monitoring beserta evaluasi secara berkala terhadap perencanaan kinerja sampai ke realisasi sehingga dapat memastikan Indikator Kinerja Utama, Sasaran Program, Target Kinerja mendukung Sasaran Strategis, Hal yang perlu dilaksanakan adalah melakukan dokumentasi secara lebih tertib terhadap pelaksanaan monitoring tersebut;
 - f) Melanjutkan proses verifikasi dan validasi dokumen Rumpun, Fungsi, dan Peran Jabatan hingga seluruh unit kerja menyampaikan data yang lengkap dan tervalidasi sebagai dasar penyusunan *Human Capital Development Plan* (HCDP);
 - g) Meningkatkan koordinasi dan pendampingan kepada unit kerja dalam implementasi aplikasi presensi guna memastikan penerapan berjalan optimal dan seragam di seluruh lingkungan BPIP;
 - h) Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program pengembangan kompetensi untuk mengukur efektivitas pelatihan serta dampaknya terhadap peningkatan kinerja organisasi;
 - i) Memperkuat sinergi dengan instansi pembina dan mitra penyelenggara pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas program pengembangan kompetensi aparatur sesuai kebutuhan organisasi dan perkembangan kebijakan kepegawaian;
 - j) Pengelolaan arsip aktif pada beberapa Unit Kerja belum optimal, dan belum adanya NSPK Kearsipan sebagai syarat pelaksanaan kearsipan Internal. Oleh karena itu, tindak lanjut yang diusulkan mencakup identifikasi unit dengan performa kearsipan rendah, implementasi NSPK Kearsipan, serta evaluasi dampak pelatihan dan implementasi NSPK terhadap kinerja pengelolaan arsip aktif. Langkah-langkah tindak lanjut

diarahkan pada penetapan jadwal rutin untuk pengawasan internal dan eksternal, dukungan tim pengawasan dengan pelatihan dan sumber daya yang diperlukan, serta analisis mendalam terhadap hasil pengawasan untuk perbaikan berkelanjutan. Rekomendasi melibatkan pembentukan tim internal untuk memastikan pengawasan berkelanjutan dan terintegrasi dalam sistem manajemen mutu;

- k) Salah satu unsur penilaian Manajemen Risiko Indeks yakni adalah penguatan kompetensi penjaminan mutu dan kualitas pelaksanaan MRI melalui pelaksanaan sertifikasi pengelola risiko lingkup BPIP dengan kompetensi pelatihan serta bimbingan teknis Manajemen Risiko sektor Publik baik melalui penyelenggaraan BPKP maupun internal BPIP;
- l) Diperlukan Kerja Sama dan sinergi dari semua unit kerja dan pegawai untuk mendukung peningkatan indeks maturitas SPBE Triwulan II Tahun 2026. Dukungan dari pemangku kebijakan juga diperlukan untuk penguatan dari sisi regulasi dengan menerbitkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan data dan informasi di lingkungan BPIP;
- m) Melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk memenuhi Sistem Merit di BPIP;
- n) Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait kebutuhan pengembangan kompetensi dan pemenuhan data dukung proses penilaian dan pemenuhan indeks profesionalisme ASN; dan
- o) Melakukan Penghapusan Barang Milik Negara yang telah dalam kondisi rusak berat untuk menunjang Pendapatan Negara Bukan Pajak berupa penerimaan Pendapatan dari Penjualan peralatan dan mesin.

BAB V | PENUTUP

Kinerja BPIP harus lebih memberikan dampak dan manfaat dimasa-masa mendatang. Gerak langkah Aktualisasi Pancasila harus dapat sampai pada masyarakat, agar dapat memunculkan rasa percaya diri dan ketangguhan karakter dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Indikator kinerja BPIP harus dapat diukur agar Akuntabilitas Kinerja terjaga diiringi dengan pengelolaan anggaran yang makin bijaksana dan mengedepankan asas kepatutan.

SALAM PANCASILA!

Jakarta, 17 Juli 2026

KEPALA,

YUDIAN WAHYUDI

BPIP 2026



bpip.go.id



persuratan@bpip.go.id



[@bpipri](https://www.instagram.com/bpipri)



Jl. Veteran III No. 2,
Jakarta Pusat 10110

